

**STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGRAAN  
PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DI KABUPATEN SIDOARJO**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik  
dan Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Magister Strata-2  
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



**Oleh :**

**LILA KARINA DEWANTARI**

**1162200025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGRAAN  
PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DI KABUPATEN SIDOARJO**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik  
dan Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Magister Strata-2  
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

**LILA KARINA DEWANTARI**  
1162200025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 6 JULI 2024:**

Oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS**  
NPP. 20110.86.0062

**Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM**  
NPP. 20110.96.0463

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Mengetahui;  
Dekan**

**Mengesahkan;  
Kaprodi**

**Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, MP**  
NPP. 20120.87.0103

**Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS**  
NPP. 20120.90.0203

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

**TESIS INI TELAH DITETAPKAN PANITIA PENGUJI TESIS  
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
PADA TANGGAL 06 JULI 2024**

**Panitia Penguji :**

**1. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS**  
NPP. 20110.86.0062

**2. Dr. Bambang Kusbandrijo, MS**  
NPP. 20110.92.0239

**3. Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si**  
NPP. 20150.96.0463

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Prof. Dr. Agus Sukrisyanto, MS**  
NPP. 20120.90.0203

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lila Karina Dewantari  
NPM : 1162200025  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul Tesis : Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah (LPPD) Di Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa;

1. Tesis yang saya buat adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bukan hasil plagiat dari karya ilmiah orang lain yang telah dipublikasikan dan/atau karya ilmiah orang lain yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik tertentu.
2. Jika saya mengambil, mengutip atau menulis sebagian dari karya ilmiah orang lain, akan mencantumkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari ternyata Tesis saya terbukti sebagian dan/atau seluruhnya sebagai plagiat dari karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi terberat yaitu pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar.

Surabaya, 12 Januari 2024

Tertanda tangan

  
Dewantari  
1162200025



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)  
Email: [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lila Karina Dewantari  
NPM : 1162200025  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***“Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Di Kabupaten Sidoarjo”***

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 06 Juli 2024

Yang Menyatakan,  
  
ina Dewantari  
1162200025



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis pemerintah daerah dalam menyusun dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang mana Bagian Pemerintahan memiliki peran sebagai Sekretariat penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), diharuskan melaksanakan menyusun strategi penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui dibangunnya Sistem Informasi Portal Data Kinerja yakni sistem yang memuat fitur pengumpulan data, evaluasi data oleh evaluator internal dan eksternal, monitoring oleh pimpinan maupun kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi, yakni pendampingan terhadap keabsahan data capaian dan data dukung yang dilaksanakan oleh evaluator internal dan eksternal. Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan (2009:19), yang berfokus terhadap 5 aspek strategi yakni tujuan (Purpose), Lingkungan (Environment), Pengarahan (Direction), Aksi (Action) dan Pembelajaran (Learning). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi aspek strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, selain itu dilakukan analisa matriks SWOT terhadap faktor internal dan eksternal pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo. Faktor internal dan eksternal untuk menunjang strategi pemerintah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari faktor internal yakni kekuatan yaitu jaringan internet, motivasi aparatur, sarana dan prasarana dan adanya dasar hukum. Adapun kelemahan yaitu kurangnya skill, dan kurangnya anggaran. Sedangkan pada faktor eksternal terdiri dari peluang yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah. Adapun ancaman yaitu Kebocoran Sistem Keamanan dan Adanya Perubahan Kebijakan. Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukannya, Strategi Penyusunan LPPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk strategi ideal dalam pelaksanaan analisis SWOT yang ada.

**Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Strategi**

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the strategic role of local governments in compiling the Regional Government Implementation Report (LPPD) document in Sidoarjo Regency in accordance with the mandate of Law 23 of 2014 concerning Regional Government, in article 69 it is stated that regional heads have the obligation to submit the Regional Government Implementation Report (LPPD), where the Government Section has a role as the Secretariat for the preparation of the Government Implementation Report document Regions (LPPD), are required to carry out a strategy for the preparation of Regional Government Implementation Report (LPPD) documents through the construction of the Performance Data Portal Information System, which is a system that contains data collection features, data evaluation by internal and external evaluators, monitoring by leaders and Assistance and Pre-evaluation activities, namely assistance to the validity of achievement data and supporting data carried out by internal and external evaluators. This study uses the basis of strategy analysis proposed by Mulgan (2009:19), which focuses on 5 aspects of strategy, namely Purpose, Environment, Direction, Action and Learning. The results of this study show that the implementation of the Strategy for the Preparation of Local Government Implementation Reports (LPPD) in Sidoarjo Regency has fulfilled the aspects of the strategy proposed by Geoff Mulgan, in addition to that a SWOT matrix analysis was carried out on internal and external factors for the implementation of the preparation of the Regional Government Implementation Report (LPPD) in Sidoarjo Regency. Internal and external factors to support the government's strategy in the preparation of the Regional Government Implementation Report (LPPD) in Sidoarjo Regency which consists of internal factors, namely strength, namely the internet network, apparatus motivation, facilities and infrastructure, and the existence of a legal basis. The weaknesses are lack of skills, and lack of budget. Meanwhile, external factors consist of opportunities, namely the rapid development of technology and government policies. The threats are Security System Leaks and Policy Changes. Based on the SWOT analysis carried out, the LPPD Preparation Strategy carried out by the Sidoarjo Regency Government is an ideal form of strategy in the implementation of the existing SWOT analysis.*

**Keywords: Regional Government, Regional Government Implementation Report (LPPD), Strategy**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas melimpahnya Anugerah, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul “Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo” sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini penulis telah dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

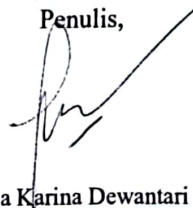
1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA. CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta jajaran;
2. Dr. Ayun Maduwinarti, MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS. selaku dosen pembimbing I dan ibu Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan arahan di dalam penyusunan Tesis ini serta rekan-rekan satu bimbingan yang telah membantu memberikan saran dan semangat dalam melaksanakan bimbingan;
4. Para Dosen, beserta seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan kepribadian selama penulis menjalani perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945.
5. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya segenap pejabat serta staf di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

yang telah banyak membantu memberikan arahan dan informasi serta fasilitas dalam proses penelitian.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Alm. Bapak Tri Harianta, Bapak Sukardi, Ibunda tercinta Ibu Upik Harianta dan Ibu Sridatin Setyorini yang selama ini selalu mengiringidi setiap Langkah penulis dengan doa. Suamiku Firdaus Arditya Utama yang tiada henti memberikan support untuk penulis dalam menyelesaikan study dan penyusunan tesis, Anak-anakku Ayra Rahmadani Firdaus dan Harfizan Al Kaffa Firdaus yang telah sabar mendampingi ibunda dalam setiap moment study serta penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Sidoarjo, 06 Juli 2024

Penulis,



Lila Karina Dewantari

## DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN TESIS .....	iii
LEMBAR PENETAPAN TESIS .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Landasan Teori.....	26
2.2.1 Administrasi Publik.....	26
2.2.2 Konsep Strategi .....	32
2.2.3 Konsep Otonomi Daerah .....	39
2.2.4 Konsep Strategi Pemerintah .....	43
2.2.5 Analisis SWOT.....	44

2.2.6 Akuntabilitas .....	47
2.3 <i>Critical Review</i> .....	50
2.4 Kerangka Berfikir.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	55
3.2 Fokus Penelitian .....	56
3.3 Lokasi Penelitian.....	56
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	57
3.5 Sumber Data.....	59
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.6 Teknik Analisa Data.....	61
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	65
<b>BAB IV DESKRIPSI OBJEK, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
4.1 Deskripsi Objek.....	69
4.2 Penyajian Data .....	74
4.2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo .....	74
4.2.2 Transformasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo .....	77
4.2.3 Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo.....	83
4.2.4 Strategi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo .....	93
4.2.5 Faktor Internal dan Eksternal dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo melalui Analisis SWOT .....	161
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>185</b>
5.1 Kesimpulan .....	185

5.2 Saran.....	188
DAFTAR PUSTAKA.....	189
LAMPIRAN .....	193

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target Status Kinerja LPPD dalam Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 .....	10
Tabel 1.2	Skor LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022.....	32
Tabel 1.3	Status Kinerja LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019.....	11
Tabel 1.4	Status Penilaian berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020.....	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu terkait penyusunan LPPD.....	15
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu Terkait dengan Strategi .....	26
Tabel 3.1	Data Informan.....	58
Tabel 4.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023 .....	70
Tabel 4.2	Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023 .....	72
Tabel 4.3	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	73
Tabel 4.4	Aspek yang dilaporkan pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 .....	32
Tabel 4.5	Aspek yang dilaporkan pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 .....	81
Tabel 4.6	Sistematika Laporan LPPD.....	85
Tabel 4.7	Tabel Rekapitulasi IKK Outcome dan Output Per Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) .....	86
Tabel 4.8	Data Perangkat Daerah Pengampu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Urusannya.....	88
Tabel 4.9	Keanggotaan TIM Koordinasi Penyusunan LPPD.....	90
Tabel 4.10	Timeline Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 .....	104

Tabel 4.11	Tabel hasil capaian dari kegiatan Pra-reviu serta pendampingan dan evaluasi oleh evaluator internal dan eksternal.....	136
Tabel 4.12	Daftar Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo .....	168
Tabel 4.13	Matriks analisis SWOT.....	177

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir .....	53
Gambar 4.1	Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.....	70
Gambar 4.2	Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Sidaorjo .....	71
Gambar 4.3	Bagan Pola Koordinasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo .....	76
Gambar 4.4	File Arsip Data Bukti Dukung LPPD Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	79
Gambar 4.5	Pelaksanaan Desk tatap muka pada proses pengumpulan data dari Perangkat Daerah Pelaksana LPPD tahun 2021 .....	80
Gambar 4.8	Tampilan Website Portal Data Kinerja .....	95
Gambar 4.9	Fitur Pengumpulan Data Bagi Perangkat Daerah Penyelenggara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).....	96
Gambar 4.10	Fitur Evaluasi dan Rekomendasi bagi Tim evaluator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) .....	97
Gambar 4.11	Fitur Monitoring Bagi Jajaran Pimpinan .....	98
Gambar 4.12	Fitur Penyimpanan Berdasarkan Tahun.....	99
Gambar 4.13	Pola Jenjang Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo.....	101
Gambar 4.14	Surat Penyampaian Himbauan Pengisian Data LPPD Tahun 2023.....	105
Gambar 4.15	Surat Permohonan Pra-reviu oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melalui Website Portal Data Kinerja...	106
Gambar 4.16	Fitur Reviu APIP di Website Portal Data Kinerja .....	107
Gambar 4.17	Diargam Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidaorjo per tanggal 22 Januari 2024 .....	108



Gambar 4.18	Hasil Pra-reviu Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 22 Januari 2024 .....	109
Gambar 4.19	Surat Penyampaian hasil Pra-reviu oleh inspektorat .....	110
Gambar 4.20	Surat Permohonan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.....	112
Gambar 4.21	Surat Undangan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.....	114
Gambar 4.22	Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.....	115
Gambar 4.23	Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo per tanggal 20 Februari 2024.....	116
Gambar 4.24	Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 20 Februari 2024 .....	117
Gambar 4.25	Surat Permohonan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur	120
Gambar 4.26	Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo per tanggal 20 Februari 2024 .....	121
Gambar 4.27	Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 28 Februari 2024.....	122

Gambar 4.28	Foto Kegiatan Rapat penyampaian hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.....	124
Gambar 4.29	Surat Penyampaian Permohonan Pendampingan dan Pra-evaluasi ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. ....	125
Gambar 4.30	Foto Kegiatan Rapat penyampaian hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) secara <i>Hybrid</i>	126
Gambar 4.31	Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 15 Maret 2024....	128
Gambar 4.32	Finalisasi Catatan Hasil Reviu (CHR) tim APIP inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap Data dan Bukti Dukung LPPD Tahun 2024 pada Website SILPPD Kementerian Dalam Negeri.....	130
Gambar 4.33	Grafik Trend Keterisian Data dan Bukti Dukung LPPD oleh Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.....	133
Gambar 4.34	Grafik Trend Status Data dan Bukti Dukung LPPD oleh Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.....	134

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi proses penelitian .....	193
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	196
Lampiran 3 Lembar Revisi .....	221
Lampiran 4 LOA Publikasi Jurnal Sinta 5.....	224
Lampiran 5 Hasil Check Turnitis Tesis.....	225

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga pemerintahannya. Adapun prinsip ini dikenalkan dalam era reformasi pada tahun 1999, setelah berakhirnya rezim Orde Baru yang sentralistik. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian bagi daerah dalam rangka mengelola sumber daya dan Pembangunan di wilayahnya. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah (Undang-undang 23 Tahun 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 5, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Adapun klasifikasi urusan pemerintahan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan pemerintah absolut

Urusan ini merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, terdiri dari:

- a. Urusan politik luar negeri
- b. Urusan pertahanan
- c. Urusan keamanan
- d. Urusan yustisi
- e. Urusan mineter dan fiskal nasional
- f. Urusan agama

2) Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat,, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan ini meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindunagn masyarakat; dan sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja; pemberdayaan Perempuan dan perlindungan; pangan ; pertanian; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan Masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan

keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistic; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.

- c. Urusahn pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; perdagangan; Perindustrian; dan transmigrasi

### 3) Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuanbangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
- d. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Adapun dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) bahwa penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai bentuk tindak lanjut pelaporan tersebut, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur ruang lingkup LPPD, LKPJ, dan RLPPD. Sedangkan peraturan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dilaksanakan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun dalam rangka memenuhi kewajiban yang telah diatur tersebut, maka setiap setelah masa anggaran berakhir sampai dengan batas waktu yang di tentukan yakni 3 (tiga) bulan setelah masa berakhir anggaran disusunlah laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo. LPPD pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran. LPPD sendiri memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun sebelumnya saat penyusunan LPPD itu sendiri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD Kabupaten Sidoarjo berisi tentang :

- a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro (indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan); capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (diukur berdasarkan Indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah); dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sisten akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)
- b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri dari capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja



pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi sebuah sarana yang penting dalam rangka merekatkan ikatan hirarkis antara pusat serta daerah, sehingga aktivitas Pemerintahan daerah senantiasa jadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam bentuk LPPD. LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). LPPD Merupakan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun dan menjadi dasar evaluasi untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD disusun oleh Biro Pemerintahan untuk Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan disusun oleh Bagian Pmeerintahan Kabupaten/Kota

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bagian Pemerintahan memainkan peran penting antara lain :

a. Menyusun Bahan LPPD

Bagian Pemerintahan bertanggung jawab untuk menyusun bahan-bahan yang akan menjadi bagian dari LPPD yang melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun

b. Menghimpun Informasi LPPD

Bagian Pemerintahan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyusun LPPD. Hal ini melibatkan koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah di pemerintahan untuk memastikan data yang akan disampaikan dalam pelaporan tersedia, relevan dan akurat

Jadi secara keseluruhan, bagian pemerintahan berperan dalam memastikan koordinasi yang efektif dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Dalam Pelaksanaannya terdapat banyak kendala dalam melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), salah satunya saat Bagian Tata Pemerintahan memberikan batas waktu pengumpulan data yang diperlukan kepada Perangkat Daerah yang menjadi acuan OPD dalam tenggat waktu pengumpulan. Namun, sering terjadinya keterlambatan pengumpulan data oleh OPD. Keterlambatan dalam pengumpulan data tersebutlah yang menghambat Bagian Tata Pemerintahan dalam penyusunan data LPPD. Mengingat pentingnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah , pemahaman OPD terkait pentingnya data LPPD sangat diharapkan oleh bagian tata pemerintahan sehingga tidak terjadinya keterlambatan dan anggapan sebelah mata tentang pentingnya LPPD.

Dalam pelaksanaannya, Pelaporan LPPD bersifat mandatory dari pemerintah pusat, sehingga tidak terdapat peraturan pemerintah yang

secara khusus mengatur mekanisme palporan LPPD. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim penyusun LPPD yang dibakukan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Penyusun LPPD yang didalamnya berisi tentang tugas tim. Dalam pelaksanaannya, penyusunan LPPD juga menemui banyak kendala sehingga mengakibatkan penyusunan LPPD menjadi tidak maksimal, beberapa kendala yang ditemui dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo antara lain, adanya perubahan aturan tentang petunjuk teknis penyusunan LPPD berupa Surat Edaran yang disampaikan setiap tahun oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah namun tidak disertai penjelasan serta sosialisasi yang memadai, sehingga menyebabkan kurang pemahamnya tim penyusun LPPD di daerah

Selain itu terbitnya manual pedoman penyusunan LPPD tersebut serta merta tidak dapat menjawab permasalahan terkait dengan indikator kinerja karena terdapat beberapa rumus penghitungan indikator yang berubah namun tidak disertai dengan penjelasan yang detail sehingga menyulitkan tim penyusun LPPD di daerah untuk memenuhi data capaian serta bukti dukung yang diinginkan.

Adanya beberapa data indikator kinerja yang tidak relevan dengan kondisi di kabupaten Sidoarjo, seperti urusan pertanahan kehutanan, energi dan sumber daya mineral serta transmigrasi. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan Kawasan yang masuk ke dalam lingkup daerah penyangga kota Surabaya dengan Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, Dimana sudah tidak terdapat lagi Kawasan hutan di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo juga sudah tidak terdapat pengolahan sumber energi dan mineral selain itu berdasarkan kondisi

penduduk di kabupaten Sidoarjo, sudah tidak terdapat penduduk imigran antar daerah di kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa pusat seolah olah menyamaratakan kondisi di setiap daerah sehingga dalam hal ini IKK yang dimunculkan menjadi tidak relevan dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo karena tidak dapat dipenuhi datanya.

Adanya penataan kelembagaan pada rentang waktu penyusunan LPPD juga menyebabkan tim penyusun LPPD berganti-ganti sehingga diperlukan sosialisasi serta pendampingan ulang yang cukup menyita waktu dan tenaga. Penataan kelembagaan berupa mutasi dan promosi menyebabkan pergantian personil penyusun LPPD di masing-masing perangkat daerah. Selain harus menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah yang baru, juga harus berkoordinasi ulang dengan personal baru sehingga diperlukan pendampingan dalam penyusunan LPPD.

Dalam beberapa urusan terdapat juga capaian kinerja yang masih rendah, tidak mengalami peningkatan dan cenderung menurun. Hal ini tentu memberikan pengaruh terhadap skor LPPD yang diberikan oleh tim evaluator yang ada di daerah dan pusat.

Selain hal tersebut, adanya tuntutan terhadap skor dan status kinerja LPPD daerah yang harus meningkat dari tahun ke tahun yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 – 2026. Untuk skor dan status kinerja LPPD sendiri, melekat pada Rencana Strategi Sekretariat Daerah, selaku sekretariat pelaporan LPPD di kabupaten Sidoarjo, berikut adalah target yang telah dijadikan target

dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 :

**Tabel 1.1 Target Status Kinerja LPPD dalam Dokumen  
Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo Tahun 2021 - 2026**

Indikator Tujuan	DO dan Formulasi	Target Skor dan Status Kinerja					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Status Kinerja LPPD	Hasil evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) Merupakan hasil dari LPPD 2 (dua) tahun sebelumnya dan EKPPD 1 (satu) tahun sebelumnya	3,61 (Tinggi)	3,64 (Tinggi)	3,69 (Tinggi)	3,72 (Tinggi)	3,75 (Tinggi)	3,78 (Tinggi)

*Sumber : Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026*

Beberapa hal tersebut di atas kemudian menarik penulis untuk mendeskripsikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, LPPD menjadi salah satu komponen penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mendasar hal tersebut, penulis juga ingin mengetahui apa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk mempertahankan skor LPPD dari tahun ke tahun sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Skor LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Skor LPPD	Kategori
1	2018	3.549	Sangat Tinggi
2	2019	<i>Tidak dikeluarkan oleh Kemendagri</i>	-
3	2020	<i>Tidak dikeluarkan oleh Kemendagri</i>	-
4	2021	3.61	Tinggi
5	2022	3.78	Tinggi

*Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo*

Skor Kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dari tahun-ketahun, pada tahun 2018 skor kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo yakni 3.549 dengan status “Sangat Tinggi”, di tahun 2019 dan 2020 tidak dikeluarkan skor kinerja LPPD dikarenakan adanya transisi dasar hukum pelaksanaan pelaporan LPPD, dimana yang awalnya dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Penilaian sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Status Kinerja LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019**

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	0 – 1	Rendah
2	1 – 2	Sedang
3	2 – 3	Tinggi
4	3 – 4	Sangat Tinggi

*Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Adapun Dasar Hukum yang terbaru mengatur tentang pelaksanaan Pelaporan LPPD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana kategori penilaiannya terdiri dari 5 status yaitu :

**Tabel 1.4 Status Penilaian berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020**

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019*

Ditahun 2021 skor kinerja LPPD di Kabupaten Sidoarjo yakni 3,61 dengan status kinerja “Tinggi”, dan ditahun 2022 skor kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo 3,78 dengan status kinerja “Tinggi”. Jika dilihat dari trend skor kinerja, Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan skor kinerja, namun untuk status kinerja LPPD nya menurun dari “Sangat Tinggi” menjadi “Tinggi”, dikarenakan adanya perubahan regulasi mengenai dasar penentuan kategori status kinerja LPPD.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut diatas, kemudian menarik penulis untuk mendeskripsikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan dan meningkatkan Skor LPPD yang dalam beberapa tahun terakhir. Adapun judul yang dipilih yaitu **“Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di Kabupaten Sidoarjo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana Strategi pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo?
- 2) Apa faktor internal dan eksternal dalam penerapan Strategi pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan hasil yang ingin diperoleh dari sebuah penelitian sehingga dapat disusun jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo
2. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis menjadi faktor internal dan eksternal dalam strategi pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat dari segi praktis dan juga akademis:

- a) Manfaat Akademis :



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b) Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi *best practices* bagi institusi yang melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi ilmu administrasi publik dan bagi peneliti lain yang memiliki fokus yang sama terkait strategi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan mempunyai korelasi baik itu locus maupun fokus pada penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana perkembangan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait *Strategi Penyusunan LPPD*, sehingga peneliti dapat menemukan gap yang dapat peneliti gunakan sebagai bahan pengkajian dan nantinya akan menjadi dasar dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 2 Jenis Penelitian terdahulu mengenai Strategi Penyusunan LPPD. Adapun hasil-hasil penelitian ini adalah bentuk artikel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu terkait penyusunan LPPD**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Henry Nelson Momuat (2020)	Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan	mengetahui penyusunan LPPD pada sekretariat Daerah Minahasa Selatan	Metode Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
2	Irma Mutia Sari, Azhar dan M. Husni Tahmrin (2021)	Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang	menganalisa pengimplementasian kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut	Metode Deskriptif kualitatif	pelaksanaan implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Kota Pangkal Pinang sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan telah terlaporkannya LPPD kepada pemerintah pusat secara tepat waktu yakni tidak melewati batas penyempulan yaitu 3 bulan setelah masa anggaran berakhir.
3	Nindy Syafrilia (2020)	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Yogyakarta	Untuk mendeskripsikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik.
4	Muhammad Rizky Dwi Putra	Efektivitas Bagian Tata Pemerintahan	untuk mengetahui dan	deskriptif kualitatif	Hasil dalam penelitian ini ialah koordinasi dalam

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	Panggato, 2022	Dalam Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	mendeskripsikan bagaimana efektivitas bagian tata pemerintahan dalam koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) di kabupaten banggai provinsi sulawesi tengah penyusunan lppd,		penyusunan LPPD antara Bagian Tata Pemerintahan dengan Perangkat Daerah sudah berjalan dengan efektif.
5	Arif Siswadi, 2019	Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara	untuk mendeskripsikan mendalam dan menganalisis evaluasi penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Utara	Metode Deskriptif kualitatif	pelaporan LPPD Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan dengan tepat waktu, namun dari sisi validitas laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya valid.
6	Darmawati, SH., 2021	Pelaporan Kinerja Kepala Daerah Kepada Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-undang	mengetahui dan memahami pelaksanaan pelaporan kinerja kepala	Yuridis Empiris	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menyampaikan LPPD sejak 2016-2021 kepada menteri Dalam

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir	daerah kepada pemerintah pusat dan apa saja hambatan dalam penyampaian laporan kinerja tersebut.		Negeri melalui gubernur, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7	Veneranda Moi	Determinasi Penghambat Kualitas penyusunan LPPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	mengetahui kualitas penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sub fokus penelitian; (a) relevansi data dan informasi; (b) keandalan dan dapat dibandingkan; (c) kelengkapan data dan informasi. Kedua; identifikasi faktor-faktor penghambat penyusunan laporan	penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui study dokumen dan wawancara.	kualitas penyusunan LPPD Provinsi NTT sebagai media informasi pertanggung jawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi NTT di pengaruhi beberapa faktor, yaitu; kompetensi sumber daya manusia, evaluasi kinerja mandiri, dan koordinasi.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			<p>penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sub fokus penelitian;</p> <p>(a) kompetensi sumber daya manusia; (b) evaluasi kinerja mandiri (self assessment); (c) koordinasi.</p>		
8	Desyi Yushardiana Putri, 2023	Efektifitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan LPPD dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan perhatian dan dalam menyampaikan laporan data kinerjanya ketika diminta oleh tim</p>	Metode kualitatif deskriptif	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh masih belum efisien namun demikian masih terus adanya upaya dari tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			<p>penyusun LPPD dan mengetahui kendala yang mempengaruhi koordinasi dan komunikasi sehingga menyebabkan terhambatnya mendapatkan data dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Pemerintahan.</p>		
9	Imam Mashudi dan Budiyawati Mokodompit (2020)	Implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	<p>untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara</p>	pendekatan kualitatif dan jenis penulisan deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan	implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan fokus penulisan lima aspek yang diteliti pada Inspektorat daerah sudah sesuai dengan jenis data yang diminta oleh bagian tata pemerintahan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				dokumentas	
10	Esa Meutia (2019)	Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang	Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah daerah dilihat melalui penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	studi literatur dan studi lapangan	Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance yang dibuktikan dengan disusunnya laporan pemerintahan secara akuntabel serta disajikannya informasi pemerintahan daerah yang dipublikasikan kepada masyarakat secara bertanggungjawab.
11	Herry Simon (2020)	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan	Mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan di sekretariat daerah Kabupaten Pelalawan	Gabungan metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif	Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai coordinator pelaksanaan penyusunan LPPD di kabupaten Pelalawan
12	Hru Puji Suwito (2022)	Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Penyusunan	untuk mengetahui dan menganalisis	kualitatif deskriptif pendekatan induktif	Dalam pelaksanaannya, tim penyusun belum bisa



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur	kinerja, faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat aparatur sipil negara dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.		mendapatkan data dengan cepat karena keterlambatan data, ketidakadaan ketetapan serta keterlambatan petunjuk teknis, belum ada aplikasi LPPD khusus kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak adanya sosialisasi atau bimbingan teknis bagi tim penyusun. Upaya dari masalah tersebut yakni dengan jempuk bola terkait data, koordinasi mengenai ketetapan serta percepatan petunjuk teknis, inovasi pembuatan aplikasi, serta pemberian sosialisasi atau bimbingan teknis.
13	Dhimas Prasetyo (2022)	Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat	Bagaimana Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022	Deskriptif Kualitatif	Implementasi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep dalam hal komitmen pimpinan OPD masih kurang maksimal. Selain

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Daerah Kabupaten Sumenep	di Kabupaten Sumenep		itu juga berdasarkan hasil penelitian penyediaan sarana dan prasarana dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumenep telah dialokasikan dan dilaksanakan dan masih ditemukan adanya kekurangan berupa kurangnya sarana komputer dan lain-lain
14	Citra Ramadhani Ayu Nur Virdanti , R. Widodo Triputro (2022)	Analisa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19	Mengetahui pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di era covid-19	metode kualitatif eksploratif	Adanya komitmen yang baik dari pimpinan Kabupaten Sleman untuk dapat melakukan penyusunan dan pengumpulan buku LPPD secara maksimal dan tepat waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya SK Tim Penyusunan LPPD, saran serta perhatian khusus pimpinan yang mau ikut terlibat dalam koordinasi penyusunan LPPD. Dalam rangka pengumpulan data

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
					dan penyusunan laporan, koordinasi dengan OPD dan seluruh stakeholder terkait berjalan sangat baik, dibuktikan dengan adanya koordinasi secara rutin melalui tatap muka, daring, whatsapp group maupun telepon karena situasi pandemi covid-19

Sumber; dikelola penulis dari jurnal yang relevan dengan penelitian ini pada tanggal 06 Maret 2024

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Terkait dengan Strategi**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Tri Joko Istanto, 2018	Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017	Mengidentifikasi factor yang mempengaruhi kinerja di bagian organisasi secretariat daerah Kabupaten Gunungkidul, mengevaluasi/ Menganalisis bagaimana kinerja bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Deskriptif	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gubungkidul berada pada posisi kuadran II, ini menggambarkan bahwa bagian organisasi mempunyai peluang besar, tetapi disilain adanya kendala kelemahan internal
2	Andini Hayrunnisyah, 2023	Analisis Strategi Pengembangan Bisnis PT. KBN	Menganalisis strategi Pengembangan	Deskriptif kualitatif	Hasilnya adalah posisi PT. KPL berada di kuadran

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		PRIMA LOGISTIK (PT. KPL) Jakarta	Bisnis PT. KBN PRIMA LOGISTIK (PT. KPL) Jakarta dengan mengidentifikasi factor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap Perusahaan.		dengan kondisi Perusahaan dapat menerapkan strategi agresif yang sifatnya growth oriented dengan memanfaatkan sumberdaya yang potensial yang telah dimiliki
3	Judith Wira Satya Ambara, 2022	Analisis Strategi Komunikasi Pimpinan Terhadap Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai Pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin	Menganalisis Strategi komunikasi antara pimpinan terhadap pegawai (bawahan) dalam peningkatan kualitas kinerja pada Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.	Deskriptif kualitatif	Strategi yang dilaksanakan pimpinan terhadap peningkatan kualitas kinerja pegawai meliputi beberapa tahapan, yaitu strategi komunikasi pimpinan dan peningkatan kualitas kerja.
4	Ihsan, 2012	Strategi Peningkatan Mutu MTs Negeri Tambun Di Tolitoli	untuk merumuskan pertama, mengetahui strategi peningkatan mutu, kedua untuk menganalisis faktor pendukung dan penghabat serta upaya mengatasi hambatan dalam peningkatan mutu MTs Negeri	kualitatif deskriptif	strategi peningkatan mutu madrasah masih perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, baik Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional maupun Pemerintah Daerah, agar lebih sinergis dalam

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			Tambun di Tolitoli		mengatur dan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan

Sumber; dikelola penulis dari jurnal yang relevan dengan penelitian ini pada tanggal 06 Maret 2024

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008:2) "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011:6).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen. Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

- a. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.

- b. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik
- c. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
- d. Kesatuan komando, Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.
- e. Kesatuan arah, Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum.
- f. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
- g. Pemberian upah, pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
- h. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- i. Rentang Kendali, garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai saklar.
- j. Tata tertib, orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
- k. Keadilan, manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahnya.
- l. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.

- m. Inisiatif, tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
- n. Rasa persatuan, kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

- a) Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
- b) Teori Perspektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
- c) Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
- d) Teori asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
- e) Teori instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini



menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi meliputi :

- a. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tidak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.
- b. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Disamping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari *linear programming*, *critical path scheduling*, *inventory models*, *site location models*, serta berbagai bentuk *resource allocation models*.
- c. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Teori ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
- d. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan penghasil.

- e. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan organisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensi diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The Lianggie (dalam Pasalong, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif, dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

## 2.2.2 Konsep Strategi

### A. Definisi Strategi

Menurut Salusu (2006), strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya, strategi sangat penting untuk dipahami oleh setiap seluruh lapisan strata dalam organisasi mulai dari yang paling tinggi hingga yang terendah, karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat dalam rangka efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang telah ditetapkan diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi, sehingga strategi dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi guna ketercapaian tujuan organisasi.

### B. Dimensi-dimensi strategi

Menurut J. Winardi (2003), dimensi dalam strategi pada suatu organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran

menyatakan apa saja yang perlu untuk dicapai, kapan hasil-hasil harus dicapai. Dari sasaran-sasaran nilai, menyatakan kearah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi dan menetapkan target bagi setiap kesatuan organisasinya.

2. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (policies) merupakan peraturan atau prosedur yang menggariskan batas di dalam mana kegiatan yang akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan tersebut demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.
3. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan yang perlu dilakukan guna mencapai sasaran-sasaran utama yang ditetapkan. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur.

### **C. Tipe - tipe strategi**

Setiap satuan organisasi parti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasinya sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga tujuan suatu instansi dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Tipe stratego yang digunakan dalam organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tentu tidak sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Kooten dalam salusi (2018), terdapat beberapa tipe strategi, yaitu antara lain :

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi ini memastikan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan teknologi.

4. Strategi Kelembagaan (*Institusional Strategy*)

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

#### **D. Tahap – tahap Strategi**

Menurut Bambang Hariadi (2005) menjelaskan bahwa ada 2 tahap strategi, yaitu :

##### **1. Perumusan**

- a. aktor tahap pertama yang mencakup analisis lingkungan didalan mencakup (intern) maupun keluar(ekstern) adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.
- b. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.
- c. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin. Pemimpin harus mampu menentukan misi untuk mencapai visi yang telah dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- d. Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
- e. Tentukan tujuan dan target.
- f. Dalam sebuah tahap strategi seorang pemimpin atau pengambil keputusan memulai dengan menentukan visinya dan menentukan langkah-langkah di masa depan dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut.

## 2. Pelaksanaan

- a. Setelah bagian perumusan strategi diselesaikan maka selanjutnya yaitu merupakan tahap krusial.
- b. Strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.
- c. Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan dilaksanakan melalui pembangunan struktur atau bagan, pengembangan program, budget dan prosedur pelaksanaan.

Implementasi strategi merupakan sebuah langkah yang sulit dalam suatu proses strategi mengingat banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dilapangan dan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan yang capable dengan seorang pemimpin yang solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi.

Menurut teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan yang menyatakan bahwa *“Public strategy is the systematic use public resourcer and power, by public agencies, to achieves public goods”* yang berarti strategi publik adalah penggunaan sistematis sumber daya dan kekuasaan publik oleh badan-badan publik untuk mencapai tujuan barang-barang milik umum. Strategi Geoff Mulgan ini lebih berbicara mengenai strategi sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan pengertian diatas, indikator strategi pemerintahan diuraikan menjadi 5 yaitu :

- Tujuan (purposes), dapat diartikan sebagai sebuah tujuan membutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut.
- Lingkungan (environment), indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari sebuah perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar (changes in ambient conditions) dan perubahan pada kesehatan manusia (change of human health).
- Pengarahan (directions), yaitu usaha untuk menggerakkan anggota-anggota atau organisasi hingga berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran tersebut. Bagian dari pengarahan yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi dan perintah.
- Aksi (action), yaitu dilihat dari situasi eksternal (luarnya), perangkat yang digunakan dan pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan melakukan sebuah tindakan.
- Belajar (learning), pada bagian ini menggunakan metode perbandingan dan identifikasi. Tujuan dari strategi adalah kunci dari arah perubahan masa depan, yang mengarah pada apa yang hendak dikejar waktu yang akan datang dan arahan tersebut harus jelas arah dan tujuannya.



## **E. Peranan Strategi**

Dalam lingkup organisasi, strategi memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan bagi organisasi dalam mencapai tujuan, karena memerlukan keselarasan antara tindakan serta koordinasi dalam mencapai tujuan. Adapun menurut Grant (1999:21) strategi mencakup 3 peranan penting dalam mencapai suatu tujuan manajemen yaitu :

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan  
Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan, strategi sebagai suatu hal yang akan memberikan suatu ikatan hubungan antara hasil-hasil dari ide yang diambil oleh individu atau instansi terkait
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi  
Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- c. Strategi sebagai target  
Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu seorang individu dalam menetapkan suatu strategi sehingga nantinya aspirasi dari tiap individu dapat didengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

## **F. Prinsip - prinsip mensukseskan strategi**

Menurut Hatten dan Hatten (1998) dalam Salusu menjelaskan tentang petunjuk untuk mensukseskan strategi :

- a. Strategi harus mempunyai konsistensi dengan lingkungan. Dalam hal ini pembuatan strategi hendaklah jangan bertentangan dengan arus perkembangan masyarakat.
- b. Organisasi jangan hanya membuat satu strategi, keadaan tersebut tergantung pada ruang lingkup kegiatannya.
- c. Strategi yang efektif memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak memisahnya.
- d. Strategi seharusnya lebih memperhatikan pada sesuatu yang merupakan kekuatannya(strengths) dan tidak hanya pada sesuatu hal yang justru adalah kelemahannya(weakness).
- e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.
- f. Penyusunan suatu strategi juga harus memperhitungkan resiko kecil agar nantinya tidak menjadi sebuah ancaman dalam organisasi.
- g. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.

Hal-hal yang menjadi tanda-tanda dari berhasilnya suatu strategi terlihat dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para pimpinan teratas, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi/instansi.

### **2.2.3 Konsep Otonomi Daerah**

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan dalam rangka untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak relevan lagi dengan

perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan daerahnya. Dengan kata lain pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat Keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, artinya wewenang dan tanggungjawab di transfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dalam hal ini pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari pemerintah pusat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan penerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sedangkan DPRD merupakan Lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Said Ruphina berpendapat agar tujuan pemberian otonomi luas, nyata dan pertanggungjawab kepada daerah dapat dicapai secara maksimal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisiensi, diperlukan penataan-penataan dalam berbagai aspek pemerintahan perlu segera dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh di letakan pada daerah kabupaten/kota sedagkan otonomi daerah propinsi adalah otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah pusat atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas desentralisasi di letakan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk

melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah.

8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan di mungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan public dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahn daerah melalui asas umum tata Kelola pemerintahan yang baik (good local governance). Dallah konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai sakah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. LPPD disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **2.2.4 Konsep Strategi Pemerintah**

Kinerja secara mentah diartikan sebagai suatu penilaian untuk mengetahui apa yang menjadi akhir yang ingin di capai oleh individu, kelompok maupun organisasi. Dalam artian lain kinerja merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur Tingkat prestasi atau kebijakan yang telah di tetapkan oleh kelompok maupun individu. Beberapa pendapat mengenai kinerja juga di kemukakan oleh beberapa para ahli seperti Keban (2004) berpendapat bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk rasa atau prestasi. Yang mana hal ini juga sependapat dengan pendapat Mangkunegara (2008) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yakni presttasi kerja atau prestasi yang ingin dicapai.

Adapun menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) (dalam Pasolong, 2007) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Selain itu Prawirosoentono (dalam Pasolong, 2007) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Berdasarkan berbagai pendapat yang ada, dapat di katakana bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian yang oleh individu dalam hal ini pegawai maupun kelompok suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan, program, kebijaksanaan guna mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Dimana hal ini menjelaskan pula bahwa konsep kinerja berhubungan erat dengan konsep organisasi. Menurut Mooney (dalam Wursanto, 2005) menyatakan bahwa "Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose" (organisasi merupakan bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai satu tujuan bersama) selain itu organisasi juga dipahami sebagai kelompok orang individu yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Yang mana Kumpulan pegawai dalam suatu sistem yang disebut pemerintahan juga termasuk dalam bentuk organisasi, karena dalam pelaksanaannya organisasi pemerintahan memiliki tujuan, sasaran serta struktur pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas.

### **2.2.5 Analisis SWOT**

Analisis Swot merupakan identifikasi sebagai faktor untuk merupuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengts) dan kelemahan (opportunities) namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan (weaknes) dan ancaman (threats). Keputusan sebuah strategi dalam organisasi perlu mempertimbangkan faktor internal yang termasuk kekuatan dan kelemahan termasuk faktor eksternal yang

mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu dalam pelaksanaan strategi organisasi penting untuk dilakukan analisis SWOT, sehingga nantinya setiap kekurangan dan peluang bisa ditingkatkan serta kelemahan dan ancaman yang ada bisa di minimalisirkan. Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam prganisai, maka sangat diperlukan penelitian yang sangat cermat sehingga mampu menemukan strategi yang sanagt cepat dan tepat dalam mengatasi ancaman masalah yang timbul salam organisasi. Beberapa pertimbangan yang perlu untuk diperhatiakn dalam mengambil sebuah keputusan antara lain :

#### **A. Kekuatan (Strenght)**

Kekuatan adalah sesuatu yang dapat diandalkan atau di unggulkan oleh instansi atau organisasi tersebut contohnya keunggulan dalam bentuk hasil atau keluaran yang dapat diandalkan, memiliki inovasi dan berbeda dengan hasil lainnya. sehingga dapat membuat lebih kuat dari organisasi lainnya. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap organisasi lain dan hasil yang dihasilkan oleh organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi organisasi. Kekuatan terdapat pada sumber daya, anggaran, citra, kepemimpinan organisasi, hubungan antar instansi, dan faktor-faktor lain

#### **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan adalah suatu kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya ada pada organisasi baik itu keterampilan



maupun kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi itu sendiri. Keterbatasan dalam sumber daya, keterampilan yang secara serius menghambat kinerja efektif organisasi. Fasilitas, Anggaran, kapabilitas manajemen, keterampilan analisa merupakan sumber klemahan.

### **C. Peluang (Opportunity)**

Peluang merupakan berbagai hal atau suatu kondisi yang menguntungkan bagi suatu organisasi, serta kecenderungan-kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang, keadaan dan kondisi yang merupakan peluang yang ada diluar suatu organisasi atau instansi juga memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

### **D. Ancaman (Treats)**

Ancaman merupakan hal-hal diluar organisasi yang tidak menguntungkan bagi keberlangsungan organisasi, yang mana jika tidak dapat diatasi maka akan menjadi hambatan bagi organisasi baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi organisasi.

Faktor kekuatan dan juga kelemahan yang ada di dalam suatu organisasi, serta peluang dan ancaman merupakan unsur-unsur lingkungan yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Maka dapat dikenal bahwa analisis swot merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi organisasi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang agar berperan sebagai suatu

alat untuk mengurangi kelemahan yang terdapat dalam suatu organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi

### **2.2.6 Akuntabilitas**

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-enpat mengandung arti yang sanget berhubungan erat dengan bagaimana pembentukan pemerintah di Indonesia. Hal tersebut yang dijadikan pedoman atas kewenangan pemerintah dalam menjalankan kinerjanya baik pada Tingkat pusat hingga daerah. Landasan utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang didasari pada akuntabilitas publik yang dijalankan dan tata Kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu Tindakan penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, Dimana dari Tindakan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak yaitu Masyarakat. Konsep ini didasari oleh pendapat beberapa para ahli, antara lain :

Menurut Mariasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang Amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktifitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah, yaitu masyarakat.

Sedangkan menurut Romzek dan Dubnick (1998) “akuntabilitas pada dasarnya dimaknakan sebagai Upaya individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diharapkan oleh pihak lain”. Berdasarkan pandangan tersebut, akuntabilitas lebih

diartikan sebagai tuntutan moral individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala kewenangan yang telah diberikan kepadanya oleh pemegang otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini pemerintah daerah menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada pemerintah pusat selaku pemegang otoritas yang lebih tinggi dalam sistem pemerintahan.

Lebih lanjut Koppel (2005) kemudian mengajukan lima dimensi akuntabilitas. Yang mana kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas dan responsivitas. Kelima kategori tersebut tidaklah mutually exclusive, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Adapun demikian transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya.

#### a. Transparansi

adalah kondisi dimana seorang individu maupun organisasi dikaakan akuntabel apabila mampu menjelaskan atau menilai Tindakan atau aksinya. Dengan demikian, individu atau organisasi yang akuntabel tidak dapat menyembunyikan kesalahan atau menghindarkan dirinya dari sebuah penyelidikan. Transparansi juga mensyaratkan kebenaran informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta kepada publik

#### b. Liabilitas

Liabilitas merupakan kecenderungan individu untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai bentuk konsekuensi yang berkenaan dengan kinerja dari Tindakan yang telah dilakukan. Dimana sebuah organisasi dinyatakan akuntabel jika berani mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

#### c. Kontrol

Seorang individu dalam hal ini birokrat yang akuntabel dibatasi oleh perintah dari para principal. Namun birokrat dan organisasi dibatasi oleh hukum, peraturan dan norma-norma. Dalam pembahasan Kontrol, saat sebuah Lembaga birokrasi mendapatkan perintah atau mandat, maka akuntabilitas dinilai berdasarkan kepatuhan dalam menjalankan perintah tersebut.

#### d. Responsibilitas

Yang dimaksud dengan reponsibilitas adalah keckapan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya Dimana organisasi dapat dikatakan akuntabel jika mengikuti segenap peraturan yang ada.

#### e. Responsivitas

Cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan (customer-oriented) yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Yang mana organisasi

dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya, dalam hal ini pemerintah melayani kebutuhan Masyarakat.

Berdasarkan kelima konsep tersebut, Koppel kemudian menjelaskan bahwasanya “yang terjadi dalam pelaksanaannya adalah bahwa organisasi hanya mungkin dapat focus pada satu dimensi akuntabilitas pada satu waktu. Hal tersebut terjadi karena sebuah organisasi tidak bisa akuntabel terhadap kelima dimensi tersebut sepanjang waktu”

Adapun konsep akuntabilitas dalam sistem pemerintahan kemudian dijelaskan sebagai suatu konsep etika pada administrasi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthability*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*). Dimana konsep tersebut merupakan wajib ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan serta kewenangan atas sesuatu, dalam konteks ini pihak yang dimaksudkan adalah pemerintah. Karena pemerintahan yang baik membutuhkan akuntabilitas sebagai salah satu sistem pemerintahan yang efektif dan sebagai jembatan antara kepentingan Masyarakat dan pemerintah.

### **2.3 Critical Review**

1. Henry Nelson Momuat (2020) Keterkaitan antara penelitian ini dan penulis adalah pada penggunaan pendekatan yang sama yaitu kualitatif, kemudian penggunaan subjek penelitian yakni Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), perbedaannya terdapat pada lokus masalah dan alat analisis yang digunakan

2. Irma Mutia Sari, Azhar dan M. Husni Tahmrin (2021) Perbedaannya terdapat pada alat analisis yang digunakan dimana penelitian yang akan dilakukan fokus pada implementasi dan perbedaan lainnya juga terdapat pada lokus masalah yang diambil.
3. Nindy Syafrilia (2020), ketertarikan penulis pada penelitian ini adalah karena penelitian ini sama-sama memiliki focus tentang penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan memiliki pendekatan penelitian yang sama yakni pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, namun perbedaannya yakni penelitian ini tidak menggunakan teori yang sama dan lokus penelitian yang berbeda
4. Muhammad Rizky Dwi Putra Panggato (2022) penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama yakni deskriptif kualitatif dan memiliki sumber data yang sama adapun lokus dan analisis data yang berbeda.
5. Arif Siswadi (2019), penulis tertarik pada penelitian ini karena peneliti memiliki fokus penelitian yang sama yaitu pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memiliki metode penelitian yang sama, yaitu Deskriptif Kualitatif, namun berbeda untuk lokus penelitian dan analisa berfokus pada evaluasi bukan strategi
6. Darmawati, SH (2021) Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini adalah kesamaan dalam objek penelitian yakni pelaporan kinerja kepala daerah, namun berbeda dalam metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan lokus

dilakukannya penelitian ini yang berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis.

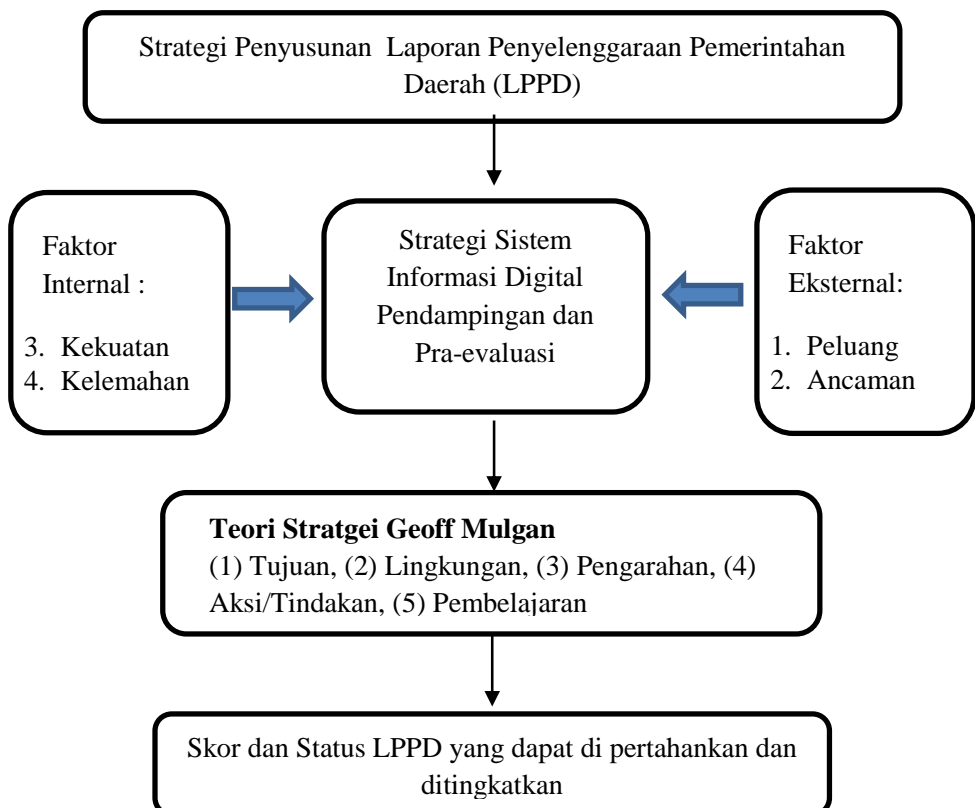
7. Veneranda Moi, penulis tertarik untuk menanjuk penelitian ini karena memiliki focus dan subjek penelitian yang sama yakni Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan membahas tentang hambatan pelaksanaan penyusunan LPPD yang di hadapi oleh sekretariat pelaporan LPPD, Selain itu juga ada upaya untuk memecahkan solusi terhadap hambatan dan kendala yang muncul. Adapun metode penelitian yang berbeda dan lokus penelitian yang berbeda
8. Desyi Yushardiana Putri (2023) ketertarikan penulis pada penelitian ini adalah karena penelitian ini sama-sama memiliki focus tentang penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemenrintah Daerah (LPPD) dan memiliki pendekatan penelitian yag sama yakni pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, namun perbedaanya yakni penelitian ini tidak menggunakan teori yang sama dan lokus penelitian yang berbeda
9. Imam Mashudi dan Budiyawati Mokodompit (2020) Penulis tertarik pada penulisan ini karena adanya kedamaan dalam metode penlitian yakni sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatid dan menggunkana teknik teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang sama dengan penulis susun. Objek penelitian juga sama, yakni Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, adapun yang berbeda adalah Lokus dan Fokus penelitian, penulis membahas tentang bagaimana penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

10. Esa Meutia (2019) penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama dengan penulis, yakni penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintha Daerah (LPPD) Namun ada perbedaan dalam pemilihan metode penelitian dan lokus penelitian

## 2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah identifikasi pemikiran dari suatu data, fakta, maupun bukti pendukung lainnya untuk menjelaskan alur/gambaran yang akan disusun dalam suatu penelitian. Dengan adanya kerangka berfikir, peneliti dapat menghasilkan rancangan secara komprehensif yang kemudian bermanfaat dalam penafsiran suatu masalah penelitian

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**





*Halaman Ini Sengaja Dikosongi*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi pada suatu entitas. Proses pelaksanaan penelitian ini bertumpu pada prinsip-prinsip metodologi penelitian yang kuat dan benar. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menggambarkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Pelaporan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian deskriptif kualitatif ini berfokus pada analisa strategi pelaksanaan penyusunan LPPD dengan menginvestigasi keadaan yang menggambarkan objek dan subjek penelitian secara faktual (Nawawi, 1992)

Penelitian jenis deskriptif berfokus pada menemukan sebuah alternatif strategi untuk tantangan-tantangan terkini yang sesuai dengan konteks dan situasi saat penelitian berlangsung. Peneliti mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan kemudian menggambarkannya sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan. Oleh karena itu, penelitian serupa yang dilaksanakan di masa mendatang mungkin tidak akan memiliki relevansi yang sama dengan temuan yang diperoleh saat ini.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian. Fokus penelitian bertujuan agar data penelitian tidak meluas. Dalam penelitian kualitatif, menurut ada batas kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus penelitian. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batasan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya (Hasibuan et al. 2022). Fokus penelitian sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian. Fokus penelitian bertujuan agar data penelitian tidak meluas. Dalam penelitian kualitatif, ada batas kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus penelitian. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan batasan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya. Fokus pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang Strategi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo dan apa faktor internal dan eksternal pelaksanaan strategi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Fokus tersebut peneliti tuliskan dan nyatakan dengan jelas untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam

melakukan penelitian. Dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data - data penelitian yang akurat peneliti perlu melakukan penetapan sebuah lokasi penelitian (Fadli 2021). Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang hendak dilaksanakan. Seleksi lokasi penelitian harus mencerminkan inti dari penelitian itu sendiri, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan memiliki akuntabilitas yang tepat dan akurat. Dalam konteks penelitian mengenai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di Sekertariat Pelaporan Dokumen LPPD yakni Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

### **3.4 Teknik Penentuan Informan**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan informan/narasumber yang dapat menyampaikan gambaran kondisi dan situasi sebenarnya di dalam suatu organisasi. Unit Analisa penelitian ini adalah pada Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Informan pada penelitian ini diambil secara purposive, meliputi ASN yang bertugas di beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :

**Tabel 3.1 Data Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Asmara Hadi, S.STP, M.AP	42	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sidoarjo	Koordinator Pelaksanaan LPPD
2	Candra Yuniarti, S.IP	48	Tim Penyusun LPPD dari Bagian Pemeirntahan	Penyusun Laporan LPPD
3	Kasiatun	58	Tim Penyusun LPPD dari Bagian Pemeirntahan	Penyusun Laporan LPPD
4	Dinda Andyarta Putra Yawandae, A.Md.Akun	36	Auditor terampil	TIP APIP Inspektorat Kabupaten Sidaotjo
5	Mohammad Lukman Arif, SE	56	Analisis Perencanaan Sekretariat	OPD Pelaksana IKK LPPD
6	Tyas Kurnia Sari	29	Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja	OPD Pelaksana IKK LPPD
7	Nur Aini, S.KM	34	Pengelola Bahan Perencanaan	OPD Pelaksana IKK LPPD
8	Dini Chaya, S.Kom	36	Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD	OPD Pelaksana IKK LPPD

*Sumber : Data diolah oleh penulis (2024)*

### **3.5 Sumber Data**

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevan, dan lengkap (Sahir 2022). Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer, meruakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari narasumber yang kredibel dan terpercaya. Sumber data primer dapat diperoleh dari beberapa cara yakni wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo. Dokumen yang dimaksud misalnya jurnal, internet, perundangan, studi pustaka ataupun dokumen kinerja lainnya.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan pemaparan

di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah (Fadli 2021).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut;

1. Observasi

Nasution, 1988 (dalam Sugiyono, 2005:64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Marshall, 1995 (dalam Sugiyono, 2005:64) menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

2. Wawancara

Esterberg, 2002 (dalam Sugiyono, 2005:72) mendefinisikan interview atau wawancara sebagai berikut: “a meeting of two persons to exchange information and idea through question and

responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara akan dimintai pendapat dan ide-idenya.

### 3. Dokumentasi

Bogdan dalam (Sugiyono, 2005:82) menyatakan “in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience dan belief”. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini dokumen dapat berupa profil Kabupaten Sidoarjo, foto kegiatan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, dan peraturan atau kebijakanterkait penyusunan LPPD.

## **3.6 Teknik Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan- dugaan atau kesimpulan sementara. Berdasarkan kesimpulan awal yangdirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan



data lagi secara berulang - ulang sehingga dapat disimpulkan apakah dugaan itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan yang dapat dikelola. Disamping itu mensintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sahir 2022).

Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berdasarkan pandangan Milles, Huberman, & Saldaña (2014), analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga aktivitas, yaitu (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*); (2) Penyajian Data (*Display Data*); (3) Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

#### A. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Menurut Milles, Huberman, & Saldaña (2014), kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya. Kondensasi bertujuan untuk membuat data penelitian menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Kondensasi data juga dapat diartikan sebagai bentuk analisis data yang bertujuan untuk mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa hingga didapatkan kesimpulan. Kondensasi data dapat dilakukan melalui kegiatan penulisan ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, pembuatan kategori, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memilah data atau informasi yang tidak relevan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

#### B. Penyajian Data (*Display Data*)

Aktivitas analisis data yang kedua yaitu penyajian data (*Display Data*). Penyajian data adalah kumpulan data atau informasi terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, lalu disusun dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data dapat berbentuk matriks, diagram, tabel, dan bagam. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif. Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.

C. Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and verifying conclusion*)

Aktivitas analisis data yang ketiga atau yang terakhir yaitu Menggambarkan data dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*). Pada awalnya, kesimpulan sementara yang dilakukan oleh peneliti belum terlihat jelas maknanya. Namun, setelah adanya penambahan data hasil penelitian, makna yang terdapat dalam data-data tersebut akan terlihat lebih jelas. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dapat diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Peneliti harus mampu sampai pada tahap melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, makna yang akan diungkapkan merupakan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Dari data tersebut, diperoleh kesimpulan yang belum jelas dan meragukan, sehingga perlu adanya verifikasi data. Verifikasi data dilakukan dengan cara melakukan kembali kondensasi data dan penyajian data (*display data*), sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang sesuai. Kesimpulan yang diambil bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Dalam penelitian ini, kesimpulan

disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan data hasil penelitian di lapangan

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Menguji keabsahan merupakan langkah yang tidak bisa dihilangkan dalam penelitian kualitatif. Moleong (2014:320) mendefinisikan uji keabsahan data adalah pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Creswell (2014:251-252) menyebutkan ada delapan strategi utama dalam uji keabsahan data yaitu:

1. Melakukan triangulasi terhadap berbagai sumber data informasi dengan memeriksa bukti dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun pembenaran yang koheren.

2. Gunakan pengecekan anggota untuk menentukan keakuratan temuan kualitatif dengan mengambil akhir atau deskripsi atau tema tertentu kembali ke responden dan menentukan apakah responden merasa bahwa ini akurat. Prosedur ini dapat melibatkan melakukan wawancara lanjutan dengan responden dalam penelitian dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengomentari temuan-temuan tersebut
3. Gunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyampaikan temuan.
4. Memperjelas bias yang dibawa oleh peneliti ke dalam penelitian.
5. Sajikan informasi negatif atau informasi yang tidak sesuai dengan tema.
6. Menghabiskan waktu yang lama di lapangan. Dengan cara ini, peneliti mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang mendalam tentang fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan detail tentang situs dan orang-orang yang kredibilitas pada laporan naratif.
7. Gunakan tanya jawab dengan rekan sejawat untuk meningkatkan keakuratan akun.
8. Gunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek.

Dalam penelitian ini Teknik uji keabsahan yang dilakukan yaitu Teknik triangulasi data. Teknik pengujian keabsahan data diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data (Moleong, 2014:332). Teknik keabsahan dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan terkait strategi

penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data. Sumber data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipadukan satu sama lain untuk mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

*Halaman Ini Sengaja Dikosongi*

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI OBJEK, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek**

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara  $7,3^{\circ}$ –  $7,5^{\circ}$  LS (Lintang Selatan) dan antara  $112,5^{\circ}$ –  $112,9^{\circ}$ BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km<sup>2</sup> ini terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa, dan 28 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya disebelah utara dan Kali Porong disebelah selatan.



Kondisi geografis Kabupaten Sidoarjo

**Gambar 4.1 Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

**Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023**

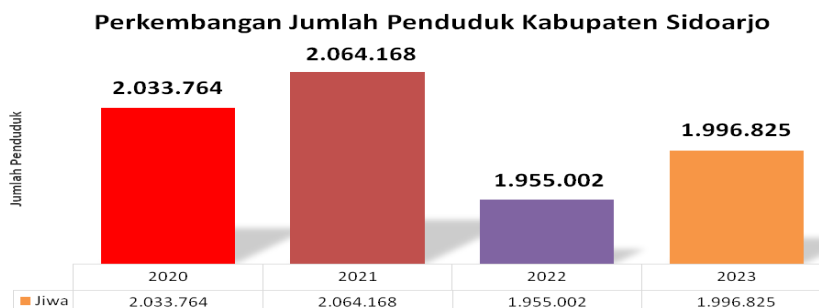
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Tarik	36,06
2	Prambon	34,22
3	Krembung	29,55
4	Porong	29,82
5	Jabon	81,00
6	Tanggulangin	32,29
7	Candi	40,67
8	Tulangan	31,21
9	Wonoayu	33,92
10	Sukodono	32,68
11	Sidoarjo	62,56
12	Buduran	41,03

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
13	Sedati	79,43
14	Waru	30,32
15	Gedangan	24,06
16	Taman	31,54
17	Krian	32,50
18	Balongsendo	31,40
Jumlah		714,24

*Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024*

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2023, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.996.825 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

**Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Sidoarjo**



*Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri*

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2023 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023**

<b>Struktur Usia</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
75 <	14.647	20.475	35.122
70 -74	17.232	17.792	35.024
65 -69	32.572	31.703	64.275
60 - 64	45.908	49.455	95.363
55 -59	60.405	64.519	124.924
50 -54	74.472	79.301	153.773
45 -49	72.806	78.136	150.942
40 -44	80.079	82.475	162.554
35 -39	73.154	71.794	144.948
30 -34	73.381	71.087	144.468
25 -29	78.666	75.926	154.592
20 -24	83.427	79.342	162.769
15 -19	74.180	69.818	143.998
10 – 148	81.512	76.637	158.149
05 - 09	75.542	70.698	146.240
00 - 04	62.084	57.600	119.684
<b>JUMLAH</b>	<b>1.000.067</b>	<b>996.758</b>	<b>1.996.825</b>

*Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri*

Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.

**Tabel 4.3 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023**

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1	TARIK	34.009	33.449	67.458
2	PRAMBON	39.650	38.810	78.460
3	KREMBUNG	34.209	34.193	68.402
4	PORONG	35.282	34.888	70.170
5	JABON	27.701	27.452	55.153
6	TANGGULANGIN	43.601	43.560	87.161
7	CANDI	76.901	77.021	153.922
8	SIDOARJO	98.027	99.729	197.756
9	TULANGAN	50.737	50.440	101.177
10	WONOAYU	42.245	41.519	83.764
11	KRIAN	65.942	64.470	130.412
12	BALONGBENDO	37.461	36.472	73.933
13	TAMAN	100.366	100.039	200.405
14	SUKODONO	61.383	60.571	121.954
15	BUDURAN	49.530	49.469	98.999
16	GEDANGAN	59.289	59.049	118.338
17	SEDATI	47.751	47.526	95.277
18	WARU	95.983	98.101	194.084
JUMLAH		1.000.067	996.758	1.996.825

*Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri*

## **.2 Penyajian Data**

Dibawah ini merupakan penyajian data dari hasil pengumpulan dan pengelolaan data primer ataupun data skunder yang didapatkan melalui teknik pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi, Penjelasannya disampaikan dibawah ini :

### **4.2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo**

Organisasi perangkat daerah ialah wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. berikut ini adalah susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud :

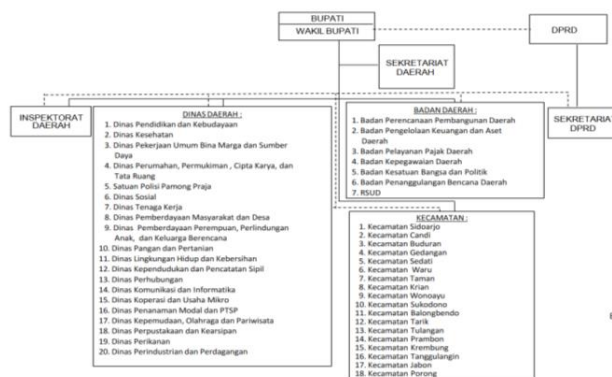
- A. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- B. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
- C. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- D. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - 2) Dinas Kesehatan
  - 3) Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja
  - 6) Dinas Sosial
  - 7) Dinas Tenaga Kerja

- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana
  - 10) Dinas Pangan dan Pertanian
  - 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
  - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 13) Dinas Perhubungan
  - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 15) Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
  - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
  - 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - 19) Dinas Perikanan
  - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- E. Badan Daerah terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - 3) Badan Pelayanan Pajak Daerah
  - 4) Badan Kepegawaian Daerah
  - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- F. Kecamatan terdiri dari
- 1) Kecamatan Sidoarjo
  - 2) Kecamatan Candi
  - 3) Kecamatan Buduran
  - 4) Kecamatan Gedangan
  - 5) Kecamatan Sedati

- 6) Kecamatan Waru
- 7) Kecamatan Taman
- 8) Kecamatan Krian
- 9) Kecamatan Wonoayu
- 10) Kecamatan Sukodono
- 11) Kecamatan Balongbendo
- 12) Kecamatan Tarik
- 13) Kecamatan Tulangan
- 14) Kecamatan Prambon
- 15) Kecamatan Krembung
- 16) Kecamatan Tanggulangin
- 17) Kecamatan Jabon
- 18) Kecamatan Porong

Pola Koordinasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo digambarkan dalam bagan berikut :

**Gambar 4.3 Bagan Pola Koordinasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**



Sumber : Perbup 48 Tahun 2020 tentang SOTK Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo

#### **4.2.2 Transformasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada Paragraf 1 Bagian Pemerintahan Pasal 11 huruf d Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi, pada angka (7) menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Adapun jika merujuk aturan sebelumnya, yakni Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah Bagian Administrasi Pembangunan. Perpindahan Tugas pokok dan Fungsi ini tidak lain merupakan akibat adanya perubahan aturan Pemerintah Pusat yang mengatur tentang penyusunan dokumen LPPD itu sendiri, yang semula aturan pada mulai melakukan pelaporan kepada Pemerintah Pusat diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain tim penyusun LPPD yang berubah, terdapat juga beberapa perubahan indikator dan perubahan kategori status kinerja berdasarkan skor



kinerja daerah, yang mana hal ini berdampak terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Bagian Pemerintahan sendiri mulai melaksanakan fungsi sebagai sekretariat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mulai tahun 2021 (Pelaporan LPPD Tahun Anggaran 2020). Saat awal dilakukan pelaporan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidaorjo kepada Pemerintah Pusat, dilakukan pengumpulan data dengan cara manual, yakni dengan desk tatap muka serta masih menggunakan data print out atau hardcopy untuk data dukungnya.

**Gambar 4.4 File Arsip Data Bukti Dukung LPPD Tahun 2020 dan Tahun 2021**



Sumber : Arsip kegiatan bagian pemerintahan tahun 2020

**Gambar 4.5 Pelaksanaan Desk tatap muka pada proses pengumpulan data dari Perangkat Daerah Pelaksana LPPD tahun 2021**



Sumber : arsip kegiatan bagian pemerintahan tahun 2020

Adanya pandemi corona virus 19 (Covid-19) sejak tahun 2019 yang telah menimpa seluruh negara di dunia banyak mempengaruhi semua sendi kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut terjadi mulai dari aktifitas keseharian, perubahan gaya hidup yang juga berpengaruh terhadap kegiatan pemerintahan baik pada kegiatan administrasi utamanya kegiatan pelayanan yang menyebabkan adanya tatap muka karena dapat menjadi sumber peningkatan penyebaran covid-19 ditengah-tengah Masyarakat. Selain itu sistem persuratan yang masih manual dalam bentuk printout menjadi tidak optimal, karena pada saat pandemi covid-19 dilakukan WFH (Work From Home) dan WFA (Work From Arrantment) yang mempengaruhi proses penandatanganan surat, pendistribusian surat dan disposisi surat yang mana kegiatan- kegiatan tersebut dapat berpotensi sebagai sarana penularan covid-19.

Namun, terbatasnya ruang gerak dalam pelaksanaan segala bentuk kegiatan tidak terkecuali kegiatan pemerintahan mendorong terselenggarakannya transformasi digital pada segala aspek. Transformasi digital mencakup penggunaan serta kemampuan dalam menerapkan teknologi digital kepada aparatur pemerintah. Hal inilah yang menjadi cikal bakal digitalisasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2020, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo Bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Membangun Sistem pengumpulan data LPPD Berbasis elektronik yang dapat diakses oleh operator penginput data Perangkat Daerah pengampu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) darimana saja dan kapan saja, tidak mengikat harus dilakukan dengan prosedur tatap muka.

Selain itu dengan adanya perubahan dasar pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari pemerintah pusat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang apabila di

dilihat dari Aspek komposisi data yang di sajikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Aspek yang dilaporkan pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007**

No	Aspek	Jumlah Urusan	Jumlah IKK
1	Tataran Pengambil Kebijakan	13	39
2	Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi umum	8	21
3	Tataran pelaksana kebijakan umum urusan wajib dan pilihan		
	A Urusan Wajib	22	67
	B Urusan Pilihan	6	11
	C Usan Penunjang	1	6
	D Urusan Pemerintahan Umum	1	2

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

**Tabel 4.5 Aspek yang dilaporkan pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019**

No	Aspek	Jumlah Urusan	Jumlah IKK
1	Indikator Kinerja Kunci Makro	6	6
2	Indikator Kinerja Kunci Outcome		
	A Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6	41
	B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	18	46
	C Urusan Pilihan	8	18
	D Urusan Fungsi Penunjang	5	18
3	Indikator Kinerja Kunci Output		
	A Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6	237
	B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	18	213
	C Urusan Pilihan	8	44
	D Urusan Fungsi Penunjang	5	-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada jumlah IKK yang harus dipenuhi capaian serta data dukungnya, pada Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat terdapat 51 urusan dan 145 IKK, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat 37 urusan dan 632 IKK yang terdiri dari 140 IKK Outcome dan 492 IKK Output. Adapun dalam penilaian keabsahan Data Capaian dan Bukti dukung IKK, yang dinilai adalah IKK Outcome,, sedangkan IKK Output merupakan data pendukung apabila ada capaian pada IKK Output yang belum sesuai.

Adanya transformasi pemenuhan aspek beserta Indikator Kinerja Kunci pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang cukup signifikan tersebut ada beberapa indikator yang belum maksimal atau tidak tersedia datanya di Perangkat Daerah akibat kurangnya pemahaman ataupun tidak tepatnya Perangkat Daerah dalam menginterpretasikan maksud dari data yang diinginkan oleh tiap tiap indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang telah ditentukan pusat, selain itu kurangnya pemahaman tentang kelengkapan dokumen bukti dukung juga mempengaruhi kevalidan data yang di sampaikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal tersebut tentu dapat mengurangi skor penilaian pelaporan LPPD

Kabupaten Sidoarjo oleh tim evaluator daerah (Timda) maupun tim evaluator pusat (Timnas).

Berdasarkan kondisi tersebut, dan juga mengingat waktu yang terbatas dalam melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yaitu 3 bulan sejak berakhirnya Tahun anggaran Daerah, Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo, melakukan kegiatan yang disebut dengan Pra Evaluasi, yakni pelaksanaan evaluasi sekaligus pendampingan yang pelaksanaannya dilakukan oleh evaluator Internal, yakni Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, dan evaluator Eksternal yang terdiri dari Tim evaluator daerah Provinsi, (Timda) yakni Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan Daerah (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur maupun tim evaluator pusat (Timnas) yakni Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

#### **4.2.3 Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh OPD Pelaksana.

Melalui pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tersebut, dapat dilihat sejauh mana keberhasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan Kepala Daerah, dapat menjalankan kegiatan pemerintahan dengan baik. Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) wajib diverifikasi atau di validasi oleh inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Sistematika penulisan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Sistematika Laporan LPPD**

<b>SISTEMATIKA DAN MUATAN LPPD</b> <b>(Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)</b>			
<b>I</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1. 2. 3.	Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
<b>II</b>	<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1. 2.	Capaian Kinerja Makro (IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per kapota, Ketimpangan Pendapatan) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan a. 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar b. 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar c. 8 Urusan Pilihan

<b>SISTEMATIKA DAN MUATAN LPPD</b> <b>(Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)</b>			
			d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
III	BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	1. 2. 3. 4.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan a. Target Kinerja b. Realisasi c. Permasalahan dan Kendala d. Saran dan Tinadk Lanjut
IV	BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat sebagai berikut : Jenis Pelayanan Dasar Target Pencapapaian SPM oleh Daerah Realisasi Alikasi Anggaran Dukungan Personil Permasalahan dan Solusi
V	BAB V PENUTUP	1. 2. 3.	Kesimpulan Saran Penutup

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa penyusuna Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



(LPPD) mulai tahun 2020 sudah tidak lagi menggunakan format IKK II.1, II.2 dan II.3 namun menggunakan IKK Outcome dan Output yang jumlahnya meningkat sangat signifikan. Berikut adalah rekapitulasi IKK Output dan Outcome berdasarkan urusan pemerintahan yang diampu.

**Tabel 4.7 Tabel Rekapitulasi IKK Outcome dan Output Per Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

No	URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN /KOTA	Jumlah IKK Outcome	Jumlah IKK Output
<b>A</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>41</b>	<b>237</b>
1	Pendidikan	4	53
2	Kesehatan	14	26
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	78
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	33
5	Ketentraman, Ketertibab Umum dan Perlindungan Masyarakat	7	26
6	Sosial	2	21
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</b>	<b>46</b>	<b>213</b>
1	Ketenagakerjaan	5	45
2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	3	14
3	Pangan	1	8
4	Pertanahan	6	4
5	Lingkungan Hidup	3	8
6	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	8
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana	3	11
9	Perhubungan	2	5
10	Komunikasi dan Informatika	3	20

No	URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN /KOTA	Jumlah IKK Outcome	Jumlah IKK Output
11	Koperasi dan UMK	2	20
12	Penanaman Modal	1	12
13	Kepemudaan dan olahraga	3	6
14	Statistik	2	7
15	Persandian	1	4
16	Kebudayaan	1	19
17	Perpustakaan	2	8
18	Kearsiapn	2	10
<b>C</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>18</b>	<b>44</b>
1	Kelautan Dan Perikanan	1	5
2	Pariwisata	5	10
3	Pertanian	2	5
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1
5	Perdagangan	3	11
6	Perindustrian	6	5
7	Kehutanan	0	4
8	Transmigrasi	0	3
<b>D</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
1	Perencanaan dan keuangan	6	0
2	Pengadaan	3	0
3	Kepegawaian	3	0
4	Manajemen Keuangan	4	0
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	2	0
	<b>TOTAL IKK</b>	<b>123</b>	<b>494</b>

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Yang dalam pelaksanaannya, masing-masing indikator tersebut di distribusikan kepada OPD pelaksana yang ada di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing, dari 47 OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hanya 26 OPD yang melaksanakan indikator dimaksud. 26 OPD tersebut terdiri atas 20 Dinas, 4 Badan,

Inspektorat dan 1 Bagian dari Sekretariat Daerah yang pembagian perurusannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.8 Data Perangkat Daerah Pengampu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Urusannya**

No	Perangkat Daerah Pengampu	Urusan yang Diampu
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan	Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum Binas Marga dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum
4.	Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Pertanahan
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7.	Dinas Sosial	Sosial
8.	Dinas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian Perdagangan
10.	Dinas Koperasi dan UMK	Koperasi dan UMK
11.	Dinas Pangan dan Pertanian	Pangan Pertanian
12.	Dinas Perikanan	Perikanan
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Lingkungan Hidup
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.		Komunikasi dan Informatika

No	Perangkat Daerah Pengampu	Urusan yang Diampu
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persandian Statistik
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Dinas Perhubungan	Perhubungan
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Kearsipan Perpustakaan
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang : - Perencanaan dan Keuangan - Manajemen Keuangan
23.	Badan Kepegawian Daerah	Fungsi Penunjang : - Kepegawaian
24.	Sekretariat Daerah : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang : - Pengadaan
25.	Inspektorat	Fungsi Penunjang : - Perencanaan dan Keuangan - Transparansi dan Partisipasi Publik
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	IKK Makro

Sumber : Dokumen LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

#### **4.2.3.1 Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan kebutuhan data Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri DALAM Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari 47 OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,

hanya 26 OPD yang melaksanakan indikator dimaksud. 26 OPD tersebut terdiri atas 20 Dinas, 4 Badan, Inspektorat dan 1 Bagian dari Sekretariat Daerah. Adapun susunan keanggotaan dan ketugasan Tim Pelaksanan penyusunan LPPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/90/438.1.1.3/2024 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Keanggotaan TIM Koordinasi Penyusunan LPPD**

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Perangkat Daerah	Ket
1	Pengarah I	Bupati Sidoarjo	
2	Pengarah II	Wakil Bupati Sidoarjo	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	
4	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
5	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
6	Wakil Ketua III	Asisten Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
7	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
8	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo	
		b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Perangkat Daerah	Ket
		d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur	
		e. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.	
		f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		g. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo	
		h. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		i. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
		j. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	
		k. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		l. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		m. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		n. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		o. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		p. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sidoarjo	
		q. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo	

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Perangkat Daerah	Ket
		r. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Kabupaten Sidoarjo	
		s. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo	
		t. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran Pendapatan BPKAD Kabupaten Sidoarjo	
		u. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo	
		v. Perencana Ahli Muda Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		w. Perencana Ahli Muda Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		x. Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Pelaporan dan Kinerja Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		y. Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Penyusunan Program Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		z. Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Pengendalian Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		aa. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa Bagian	

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Perangkat Daerah	Ket
		Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		bb. Auditor Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, yang ditunjuk	
		cc. Analis Ahli Muda Kebijakan Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		dd. Perencana Ahli Muda Dinas, Badan Se-Kab Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja	
		ee. Perencana Ahli Muda Dinas, Badan Se-Kab Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja	
		ff. Staf Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	Yang ditunjuk

Sumber : Dokumen SK TIM Penyusunan LPPD Tahun 2024

#### **4.2.4 Strategi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo**

Dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya organisasi pemerintah, penyusunan dan penyajian sebuah dokumen serta laporan menjadi bagian dari aktifitas pemerintahan itu sendiri. Salah satunya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, lebih lanjut pelaksanaan pelaporannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah pusat, LKPJ Kepada DPRD dan informasi LPPD.



Di susunnya Laporan-laporan tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan upaya mencincipatakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut disusun dan paling lambat disampaikan kepada pemerintah pusat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang mana lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.

#### **4.2.4.1 Website Portal Data Kinerja**

Dalam rangka efektif dan efisien dalam pengumpulan data untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Urusan serta Indikator yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Website Portal Data kinerja, yaitu sebuah sistem informasi data yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang berisikan form data-data untuk memenuhi indikator tiap-tiap urusan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

**Gambar 4.8 Tampilan Website Portal Data Kinerja**

Capaian Kinerja - IKK Outcome

Pilih Instansi: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pilih Tahun: 2023

Download Excel

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN	KET	DIPERBARU PEMBA	FILE BUKTI	STATUS	AKSI
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD $\times 100\%$	57385 57383 100,00%	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 57385 peserta didik	20-02-2024_15:52:13	1365 outcome-20-02-2024_15-52-13.pdf	Sudah diverifikasi Kepala OPD Status AKPI: OK	Detail Edit Hapus
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan $\times 100\%$	182521 182979 99,75%	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar sebanyak 182521 peserta didik	20-02-2024_16:01:04	1373 outcome-20-02-2024_16-01-04.pdf	Sudah diverifikasi Kepala OPD Status AKPI: OK	Detail Edit Hapus
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah yang bersangkutan $\times 100\%$	95547 95651 99,89%	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama di kabupaten Sidoarjo sebanyak 95547 peserta didik	20-02-2024_16:09:40	1393 outcome-20-02-2024_16-09-40.pdf	Sudah diverifikasi Kepala OPD Status AKPI: OK	Detail Edit Hapus

*Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo*

Dibangunnya website portal data kinerja tidak lain adalah untuk untuk menjawab berbagai kendala yang ada, antara lain :

1. Memudahkan proses pengumpulan data bagi Perangkat Daerah Pelaksana urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dimana yang sebelumnya dilaksanakan masih dilakukan secara manual yakni Perangkat Daerah pelaksana urusan harus bertatap muka dengan TIM penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berada di bagian pemerintahan, lain tidak efisien waktu dan tenaga, hal ini juga tidak efektif dalam menjamin data yang di butuhkan sudah terpenuhi, karena database urusan yang akan dilaporkan seringkali tidak tepat,

sehingga staf Perangkat Daerah pelaksanaan urusan harus berkali-kali melakukan tatap muka sampai dengan data sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing indikator urusan. Sedangkan dengan telah dibangunnya Website Portal Data Kinerja ini, Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tidak perlu melakukan tatap muka langsung dengan TIM penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berada di bagian pemerintahan, karena pengumpulan data sudah bisa langsung melalui Website, dimana dalam website Portal Data Kinerja dimaksud, telah dilengkapi dengan fitur input data, upload bukti dukung, dan penjelasan terkait masing-masing data indikator yang harus diisi oleh Perangkat Daerah.

**Gambar 4.9 Fitur Pengumpulan Data Bagi Perangkat Daerah Penyelenggara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

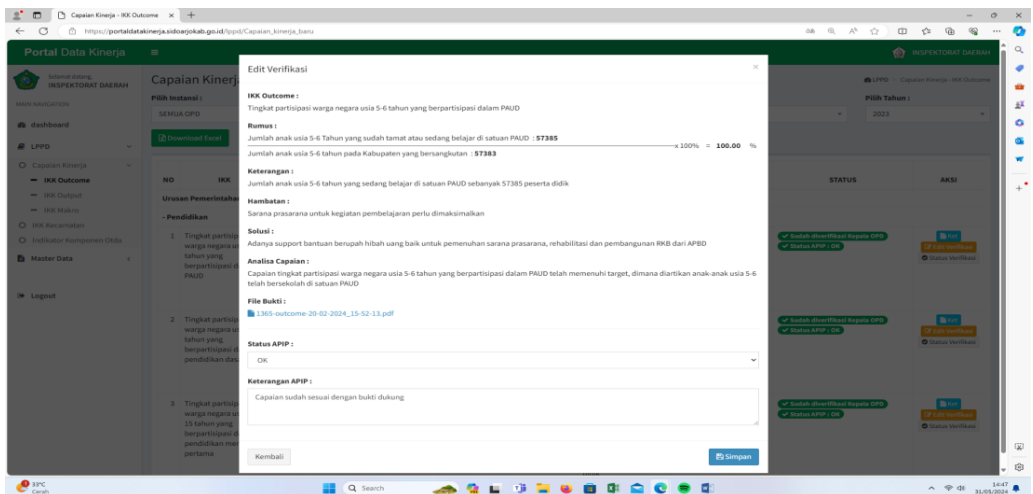
The screenshot displays the 'Portal Data Kinerja' web application interface. The main content area shows an 'Edit' form for an 'IKK Outcome'. The form includes the following sections:

- IKK Outcome:** Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- Rumus:**
  - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
  - 201530
  - Jumlah Warga Negara yang berada di Kawasan Rawan Bencana di wilayah Kabupaten
  - 201530
  - 100%
  - 100,00
- Keterangan:**
  - Rincian 2023 : Jumlah peserta KIE Tabung Muka 6.210 orang
  - didanai/dibagi dengan penyebaran informasi rawan bencana melalui media sosial (WA Group, Instagram, Website, sebanyak 2.085.720 orang (saat ini))
- Hambatan:**
  - Terbatasnya sumber daya APBD untuk menyusun KRB, tersatunya SDM dan sarana prasarana dalam pelaksanaan penyebaran informasi rawan bencana
- Solusi:**
  - Dokumen KRB sampai level desa, peningkatan kuantitas sumber daya aparatur dan sarpras
- Analisa Capaian:**
  - Masukkan Analisa Capaian
- File Bukti:** 1557-outcome-15-03-2024\_14-43-32.pdf
- Choose File:** No file chosen
- File Upload:** No file chosen

*Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo*

2. Memudahkan pelaksanaan evaluasi bagi TIM evaluator pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam hal ini Tim evaluator internal dan eksternal, dimana yang sebelumnya harus dilakukan tatap muka dalam setiap proses evaluasi, namun dengan adanya Website Portal Data Kinerja, evaluasi dapat dilakukan dengan metode virtual karena di dalam portal data kinerja telah kami berikan juga fitur evaluasi, yakni pemberian keterangan apakah sudah sesuai antara data serta bukti dukung yang diinginkan oleh indikator tiap urusan dengan data serta bukti dukung yang diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan. Selain itu juga tersedia fitur pemberian masukan oleh evaluator, yakni penyampaian perbaikan untuk dapat menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan.

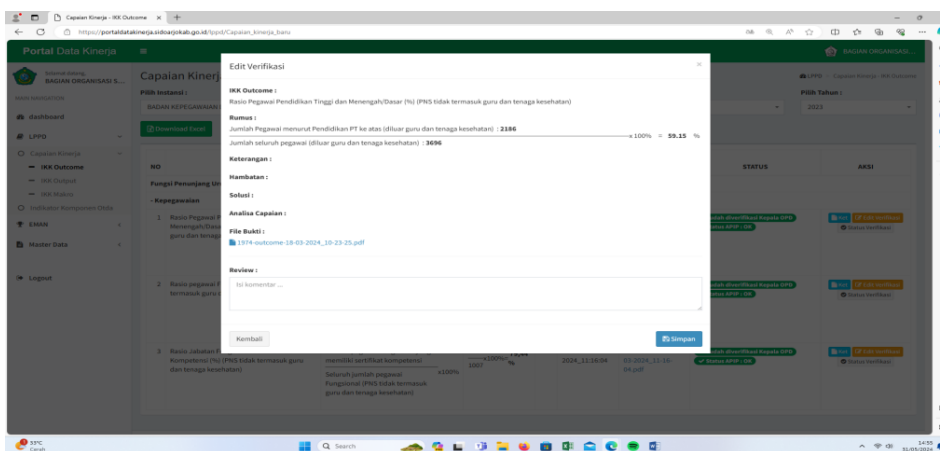
**Gambar 4.10 Fitur Evaluasi dan Rekomendasi bagi Tim evaluator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**



*Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo*

3. Memudahkan monitoring data serta pelaporan bagi jajaran pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. dimana sebelumnya tidak ada akses monitoring langsung dari jajaran pimpinan pemerintah Kabupaten Sidoarjo perihal bagaimana capaian serta urusan yang sudah tercukupi kinerja dan data dukungnya. Namun dengan adanya Website Portal Data Kinerja, kami menambahkan fitur verifikasi Kepala OPD, dimana data-data yang di inputkan harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Kepala OPD sebelum selanjutnya dilakukan evaluasi oleh TIM evaluator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), selain itu kami juga menyediakan fitur lihat dan penambahan komentar bagi seluruh Asisten, Sekertaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati. Sehingga harapannya jajaran pimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terlibat langsung dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

**Gambar 4.11** Fitur Monitoring Bagi Jajaran Pimpinan



*Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo*

4. Memudahkan penyimpanan serta sebagai sarana kompilasi data dari tahun ketahun bagi Sekretariat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Adapun yang sebelumnya dokumen dalam bentuk Hardfile biasanya rawan dalam penyimpanan, mulai dari dokumen hilang, dokumen lapuk, dan dokumen yang terpencair-pencar. Namun dengan sistem penyimpanan digital, diharapkan dapat memudahkan penyimpanan maupun pencarian data

**Gambar 4.12 Fitur Penyimbapan Berdasarkan Tahun**

CAPAIAN	KET	DIPERBARUI PEMDA	FILE BUKTI	STATUS
385 —x100%= 100,00 % 383	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 57385 peserta didik	20-02-2024_15:52:13	1365-outcome-20-02-2024_15-52-13.pdf	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <span>✓ Sudah diverifikasi Kepala</span> <span>✓ Status APIP : OK</span> </div> <div style="display: flex; gap: 5px; margin-top: 5px;"> <span>Edit Verifikasi</span> <span>Status Verifikasi</span> <span>Hapus</span> </div>

*Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo*

#### 4.2.4.2 Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi

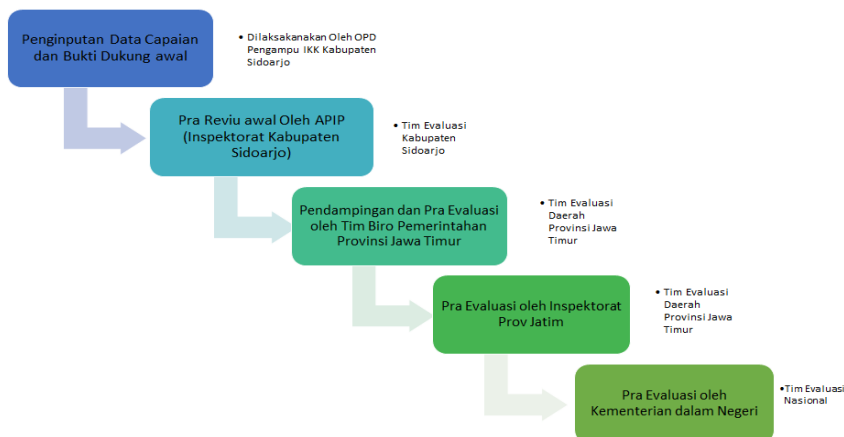
Adapun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo, Bagian pemerintahan selaku Sekretariat pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menghimpun data yang bersumber dari PD Pelaksana Urusan Pemerintahan,

melainkan juga telah membentuk instrument pendampingan serta Pelaporan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan telah di bakukan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/319/438.1.1.3/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan LPPD Kabupaten Sidoarjo, Adapun dalam SOP tersebut, bagian pemerintahan telah meruntun mulai dari penginputan awal sampai dengan reuiu akhir oleh APIP dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Evaluator eksternal yang melaksanakan pendampingan dan pra-evaluasi dipilih berdasarkan evaluator tingkat provinsi dan pusat yang dari tahun ke tahun melaksanakan evaluasi terhadap data capaian dan bukti dukung Kabupaten Sidoarjo, yang mana setiap tahun dilakukan penilaian namun penentuan yang bertindak menjadi evaluator masing-masing Kabupaten/Kota diacak yang bertindak sebagai evaluatornya, antara oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur. Adapun di tahun 2024 ini tidak di ikutsertakan BPKP selaku evaluator, dikarenakan sudah 3 tahun berturut-turut BPKP tidak ditunjuk sebagai evaluator bagi Kabupaten Sidoarjo. Pendampingan dan Pra-evaluasi ini dilakukan sebelum evaluasi yang “sebenarnya” dilakukan oleh Tim evaluator Daerah dan Pusat, sehingga diharapkan sebelum data capaian dan bukti dukung LPPD dinilai, telah dilakukan upaya dalam memaksimalkan capaian dan bukti dukung yang ada dan dalam upaya peningkatan pemahalam serta nilai capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,

menggunakan strategi Pendampingan dan Pra-evaluasi, yakni melakukan evaluasi dini terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah yang dinilai dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sebelum Laporan di Kumpulkan dan dinilai langsung oleh tim Penilai Pusat dan Daerah. Selain untuk meningkatkan kuantitas capaian Kinerja indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dengan dilakukan evaluasi dini oleh tim evaluator, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas Bukti dukung yang valid sehingga bisa meningkatkan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo di tingkat Nasional. Adapun dalam kegiatan pendampingan dan Pendampingan dan Pra-evaluasi dilaksanakan berjenjang, antara lain :

**Gambar 4.13 Pola Jenjang Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo**



*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*



Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan dan Dinas Komunikasi dan Informatika setiap diawal tahun (n+1) atau setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan pemerintahan tepatnya di minggu pertama bulan januari, bagian pemerintahan melaksanakan pendampingan serta sosialisasi pengisian Website Portal Data Kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan tata cara pengisian ian, menjelaskan apabila terdapat fitur baru ataupun staf inputing baru dari tiap-tiap perangkat daerah pengampu Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyampaian jadwal serta timeline rencana pelaksanaan pendampingan serta Pra-evaluasi oleh TIM evaluator Internal maupun Eksternal. Berikut adalah timeline Pendampingan dan Pra-evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo:

**Tabel 4.10 Timeline Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023**

NO	AKSI	WAKTU PELAKSANAAN												Pelaksana			
		JANUARI					FEBRUARI				MARET						
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III		IV		
1	Inputing Capaian Kinerja oleh PD pengampu urusan LPPD pada Website Portal Data Kinerja																PD pengampu LPPD
2	Pra-Reviu Oleh APIP Inspektorat																Inspektorat Kab. Sidoarjo

NO	AKSI	WAKTU PELAKSANAAN												Pelaksana					
		JANUARI					FEBRUARI				MARET								
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III		IV				
	Kabupaten Sidoarjo																		
3	Perbaikan oleh PD Pengampu LPPD atas hasil Pra-Review Inspektorat																		PD pengampu LPPD
4	Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur																		Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur
5	Perbaikan oleh PD Pengampu LPPD atas hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur																		PD pengampu LPPD
6	Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur																		Inspektorat Provinsi Jawa Timur
7	Perbaikan oleh PD Pengampu LPPD atas hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur																		PD pengampu LPPD
8	Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh																		Kementerian Dalam Negeri

NO	AKSI	WAKTU PELAKSANAAN												Pelaksana	
		JANUARI					FEBRUARI				MARET				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III		IV
	Kementerian Dalam Negeri														
9	Perbaikan oleh PD Pengampu LPPD atas hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Kementerian Dalam Negeri														PD pengampu LPPD
10	Finalisasi Reviu LPPD Oleh APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo														Inspektorat Kab. Sidaorjo





*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*

### **1. Inputing Capaian Kinerja oleh PD pengampu urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Website Portal Data Kinerja**

Proses pengumpulan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidaorjo diawali dengan disampaikannya surat himbuan pengisian data dan bukti dukung capaian masing-masing urusan pada portal data kinerja, untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun anggaran 2023, surat himbuan sudah mulai di sampaikan pada 19 Desember 2023 dengan maksud agar Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD dapat segera menyusun data serta bukti dukung, sehingga pada awal tahun 2024, data dan bukti dukung tersebut dapat segera disampaikan melalui Website Portal Data Kinerja. Selain itu

disampaikan juga timeline pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Praevaluasi melalui surat tersebut.

### Gambar 4.14 Surat Penyampaian Himbauan Pengisian Data LPPD Tahun 2023

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH</b> Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211 Telepon. (031) 8921946, 8921960, 8921853 Faks. (031) 8941145 Email : setda@sidoarjo.kab.go.id Website : www.sidoarjo.kab.go.id</p>	<p>Lampiran : Nomor : 100/15038/438.1.1.1/2023 Tanggal : 19 Desember 2023</p>
<p>Nomor : 100/15038/438.1.1.1/2023 Sifat : Penting Lampiran: 1 Perihal : himbauan pengisian portaldatakerja terkait capaian kinerja LPPD Tahun 2023</p>	<p>Sidoarjo, 19 Desember 2023 Kepada Yth. Sdr.(sebagaimana Terlampir) di SIDOARJO</p>
<p>Berkenaan dengan akan berakhirnya masa anggaran Tahun 2023 maka mohon kiranya saudara dapat mengisi hasil capaian kinerja tahun 2023 pada aplikasi <a href="https://portaldatakerja.sidoarjo.kab.go.id">https://portaldatakerja.sidoarjo.kab.go.id</a> Adapun maksimal waktu pengisian capaian kinerja Tahun 2023 pada aplikasi tersebut , tanggal 7 Januari 2024, adapun data yang memakai data BPS yang belum release memakai data tribulan terakhir sedangkan data keuangan bisa menggunakan data unaudited.</p> <p>Dan dalam rangka tertib administrasi untuk pengisian LPPD capaian kinerja Tahun 2023, OPD pengampu wajib menyertakan data dukung ditandatangani oleh Kepala OPD sedangkan untuk surat keterangan nihil ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>Demikian untuk menjadi perhatian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>3. Inspektorat</li> <li>4. Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5. BPBD</li> <li>6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>7. Dinas Kesehatan</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air</li> <li>9. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya danTata ruang</li> <li>10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>11. DinasSosial</li> <li>12. Dinas Tenaga Kerja</li> <li>13. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana</li> <li>14. Dinas Pangan dan Pertanian</li> <li>15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>16. Dinas Kependudukan dan CatatanSipil</li> <li>17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>18. DinasPerhubungan</li> <li>19. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>20. Dinas Koperasi dan UsahaMikro</li> <li>21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuP itu</li> <li>22. Dinas Kepemudaan, olah raga dan Pariwisata</li> <li>23. Kantor Perpustakaan dan Arsip</li> <li>24. Dinas Perikanan</li> <li>25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>26. Bagian Pengadaan</li> </ol>
<p><b>Pj. SEKRETARIS DAERAH</b> Ditandatangani secara elektronik oleh  ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE NIP.197009261990031005 <b>ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE</b> PembinaUtamaMuda NIP.197009261990031005</p>	<p><b>Pj. SEKRETARIS DAERAH</b> Ditandatangani secara elektronik oleh  ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE NIP.197009261990031005 <b>ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE</b> Pembina Utama Muda NIP.197009261990031005</p>
<p> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang elektronika dan transaksi elektronik, tundak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

## 2. Pra-Review Oleh APiP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang pertama dilaksanakana adalah Pra-reviu yang dilaksanakan oleh Tim APiP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Adapun pelaksanaan Pra-reviu dilaksanakan pada bulan januari, sesaat setelah dilakukan pengisian data dan bukti dukung

pada Website Portal Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Dalam pelaksanaan Pra-reviu, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Penyusunan LPPD melakukan permohonan reviu secara tertulis kepada inspektur Kabupaten Sidoarjo agar dapat menugaskann Tim APIP dalam melaksanakan reviu dimaksud.

### Gambar 4.15 Surat Permohonan Pra-reviu oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melaui Website Portal Data Kinerja

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211  
Telepon. (031) 8921946, 8921960, 8921853 Faks. (031) 8941145  
Email : selda@sidoarjokab.go.id Website :www.sidoarjokab.go.id

---

Sidoarjo, 17 Januari 2024

Kepada  
Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten  
Sidoarjo  
di  
SIDOARJO

Nomor : 100/819/438.1.1.1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : permohonan pra reviu melalui aplikasi portaldata dan reviu di aplikasi SILPPD

Dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam Pelaporan Kinerja Daerah, maka perlu dilakukan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) hasil capaian kinerja tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan pra-reviu agar dijadwalkan pada tanggal 22 s/d 28 Januari 2023 melalui portaldatakerja dengan *username* inspektorat *password* verifikasi dan pelaksanaan reviu LPPD pada tanggal 25 s/d 30 Maret 2023 melalui SILPPD Kemendagri.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perkenannya disampaikan terima kasih

**PJ. SEKRETARIS DAERAH**  
Dianstangani secara elektronik oleh  
ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19709261990031005  
**ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE**  
**Pembina Utama Madya**  
NIP 1970926 199003 1 005

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/Emanajemen Informatika dan Komunikasi No. 11 Tahun 2008 tentang Sistem Sertifikasi Elektronik, untuk lebih jelasnya kunjungi link: <https://www.sidoarjokab.go.id>

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Adapun berdasarkan Surat permohonan Pra-reviu oleh Bagian Pemerintahan kepada Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo,

untuk pelaksanaan Pra-reviu LPPD Tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 22-28 Januari 2024, mendasari pengisian data dan bukti dukung awal yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kegiatan Pra-reviu sendiri dilaksanakan langsung melalui Portal Data Kinerja, karena telah tersedia menu Reviu bagi Inspektorat untuk melakukan penilaian (OK atau TIDAK OK) berdasarkan data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

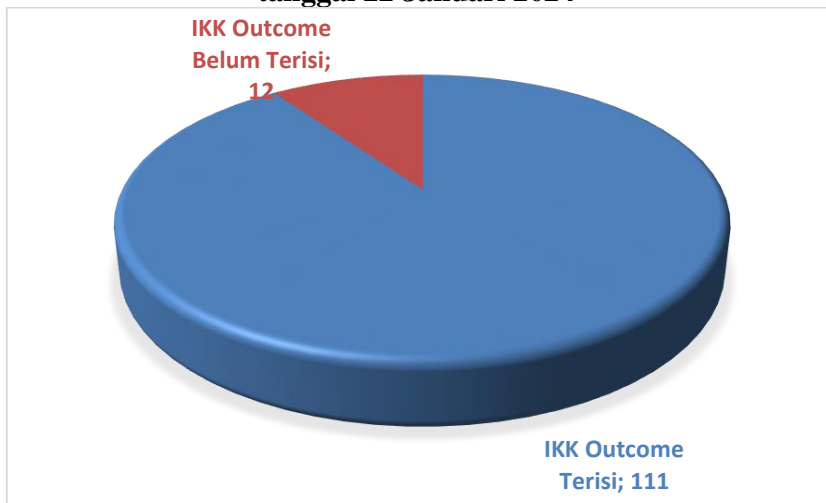
**Gambar 4.16** Fitur Reviu APIP di Website Portal Data Kinerja

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN	KET	DIPERBARUI	FILE	BUKTI	STATUS	AKSI
Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan Pelayanan Dasar									
- Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PKUD	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PKUD Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	57385 100% 57383	100% 100,00%	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PKUD sebanyak 57385 peserta didik	20-02-2024	1360-subdit 20-02-2024	Sudah diverifikasi Status APIP: OK	Verifikasi Status Verifikasi Revisi
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	182521 100% 182979	100% 99,75%	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar sebanyak 182521 peserta didik	20-02-2024	1371-outdit 20-02-2024	Sudah diverifikasi Status APIP: OK	Verifikasi Status Verifikasi Revisi
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	95547 100% 95651	100% 99,89%	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama di kabupaten Sidoarjo sebanyak 95547 peserta didik	20-02-2024	1372-outdit 20-02-2024	Sudah diverifikasi Status APIP: OK	Verifikasi Status Verifikasi Revisi
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	4617 100% 4636	100% 99,99%	Pendidikan kesetaraan di kabupaten Sidoarjo memberikan kesempatan kepada yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, pendidikan menengah melalui paket A, paket B, Paket C yang	25-03-2024	1381-outdit 20-02-2024	Sudah diverifikasi Status APIP: Belum	Verifikasi Status Verifikasi Revisi

Sumber : Website Portal Data Kinerja

Setelah dilakukan reviu di Website Portal Data Kinerja, Bagian Pemerintahan selanjutnya melakukan penyampaian hasil Pra-reviu Kepada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui data tertulis atau melalui surat kepada masing-masing Perangkat Daerah. Berikut adalah hasil dari prareviu yang dilaksanakan oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

**Gambar 4.17** Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo per tanggal 22 Januari 2024

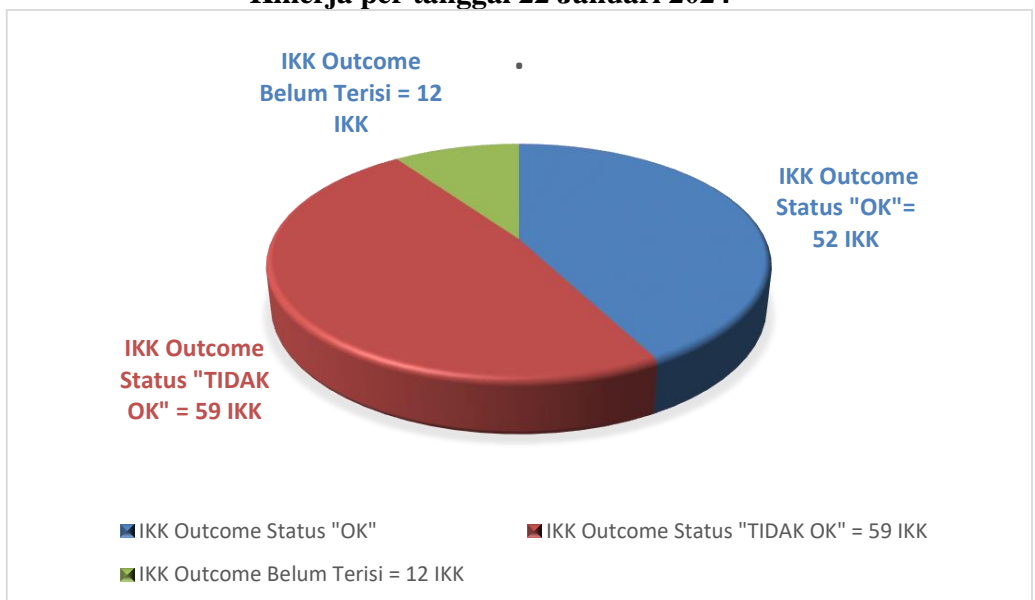


*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*

Berdasarkan data tersebut, dari 123 IKK Outcome yang harus diisi oleh seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, baru 111 IKK Outcome atau 90 persen dari serta bukti dukung yang telah di isikan pada Website Portal Data Kinerja, Dimana data yang telah masuk tersebut yang selanjutnya di reviu oleh Tim APIP Inspektorat.

Tim Reviu APIP mengecek data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), adapun yang di cek antara lain, kesesuaia Data Kinerja dan Rumus Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Permendagri yang mengatur Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perakgkat Daerah pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta Ketersediaan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Berikut adalah hasil reviu yang dilakukan oleh Tim APIP Inspektorat :

**Gambar 4.18 Hasil Pra-reviu Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 22 Januari 2024**



*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*



Dari 111 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, baru sebanyak 52 IKK Outcome atau 42,3% yang telah sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala pekrangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri yang selanjutnya oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo diberikan Status “OK”, sedangkan sisanya yakni 71 atau 57,7% masih berstatus “BELUM OK” dari 71 Indikator tersebut, 12 diantaranya dikarenakan belum dilakukan pengisian data pada website portal data kinerja, dan 59 lainnya belum sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

**Gambar 4.19 Surat Penyampaian hasil Pra-reviu oleh inspektorat**



Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Untuk data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar yang belum sesuai, Inspektorat melalui Portal Data Kinerja memberikan keterangan “TIDAK OK” dan Keterangan perihal Dimana letak kekeliruan maupun Upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk dapat melakukan perbaikan serta peningkatan capaian data untuk selanjutnya dilakukan penginputan ulang pada Website Portal Data Kinerja.

**3. Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim Evaluator Daerah Tingkat Provinsi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.**

Kegiatan setelah dilakukan perbaikan terhadap data hasil pra-reviu oleh tim APIP inspektorat yang “BELUM OK” adalah Pendampingan dan Pra-evaluasi data yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur selaku tim evaluator daerah provinsi. Sesuai dengan timeline yangtelah disusun oleh bagian pemerintahan, Pendampingan dan Pra-evaluasi dilaksanakan pada bulan Februari, sesaat setelah dilakukan perbaikan data dan bukti dukung berdasarkan hasil pra-reviu tim APIP inspektorat pada Website Portal Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Sama dengan pelaksanaan Pra-reviu, sebelum dilaksanakan Pendampingan dan Pra-evaluasi Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melakukan permohonan reviu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur agar dapat menugaskan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan praevaluasi dimaksud.

**Gambar 4.20 Surat Permohonan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur**

Lampiran :


Jadwal Pra Evaluasi

No	Kegiatan	Hari	Tanggal	Tempat	Instansi
1	Pra-evaluasi oleh masing-masing perangkat daerah pemprov jatim per urusan yang dilakukan secara online melalui website <a href="https://portaldatakerja.sidoarjo.kab.go.id">https://portaldatakerja.sidoarjo.kab.go.id</a>	Senin - Selasa	19 - 21 Februari 2024	Kantor masing-masing PD Pemprov Jatim	PD Pemprov Jatim
2	Pengiriman "hasil" pra-evaluasi dari perangkat daerah Pemprov Jatim kepada perangkat daerah pembk sidoarjo per urusan dalam bentuk asistensi	Rabu - Kamis	22 Februari 2024	Kantor Biro Adm. Pemerintahan dan Otda	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Inspektorat 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. BPBD 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 9. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 11. Dinas Sosial 12. Dinas Tenaga Kerja 13. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana

3	Pengiriman hasil pra-evaluasi dari perangkat daerah Pemprov Jatim kepada perangkat daerah pembk sidoarjo per urusan dalam bentuk asistensi		23 Februari 2024	Kantor Biro Adm. Pemerintahan dan Otda	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 8. Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Dinas Kepemudaan, olah raga dan Pariwisata 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip 11. Dinas Perikanan 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13. Bagian Pengadaan
---	--	--	------------------	--	--

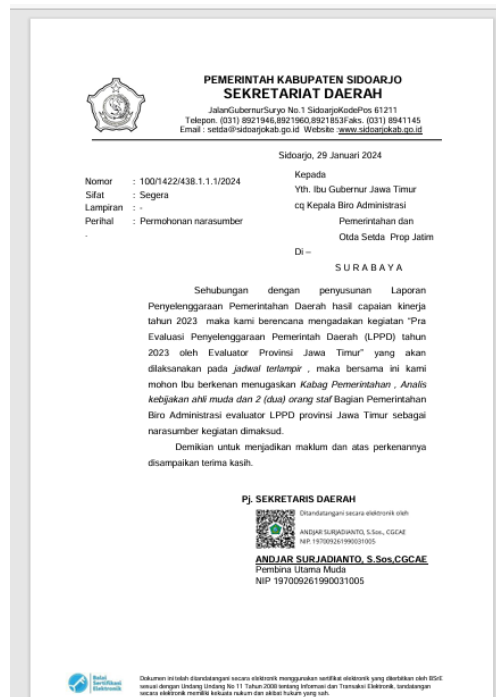
**NB : username dan password akan kami kirim via WA ke salah satu staf biro adm. Pemerintahan dan otda sda pemprov jatim**

**PJ. SEKRETARIS DAERAH**



Andjar Surjandanto, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19700261990021005

**ANDJAR SURJANDANTO, S.Sos., CGCAE**  
Pembin Utama Muda  
NIP. 19700261990021005

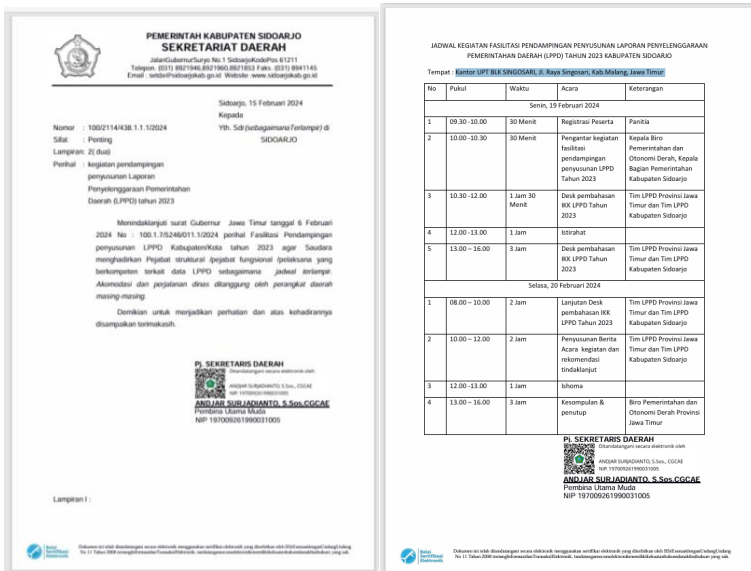


Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berbeda dengan Pra-reviu yang dilaksanakan oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, jika tim APIP melakukan pra-reviu online, tanpa tatap muka dan penyampaian dilakukan melalui Website Portal Data Kinerja dan melalui penyampaian surat kepada seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan metode desk langsung dan tatap muka. Adapun Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menghadirkan seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di tingkat

Provinsi Jawa Timur untuk melakukan desk langsung dengan Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo, untuk media penyampaian hasil evaluasi tetap melalui Website Portal Data Kinerja dan dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur membuat Berita Acara penyampaian Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi dan rekomendasi dari desk yang dilaksanakan. Berdasarkan arsip surat yang ada di Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Biro Pemerintaahn Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari senin dan selasa, 19-20 Februari 2024 bertempat di Kantor UPT BLK Singosari, Jl. Raya Singosari, Kab.Malang, Jawa Timur.

**Gambar 4.21 Surat Undangan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**



Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

**Gambar 4.22 Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

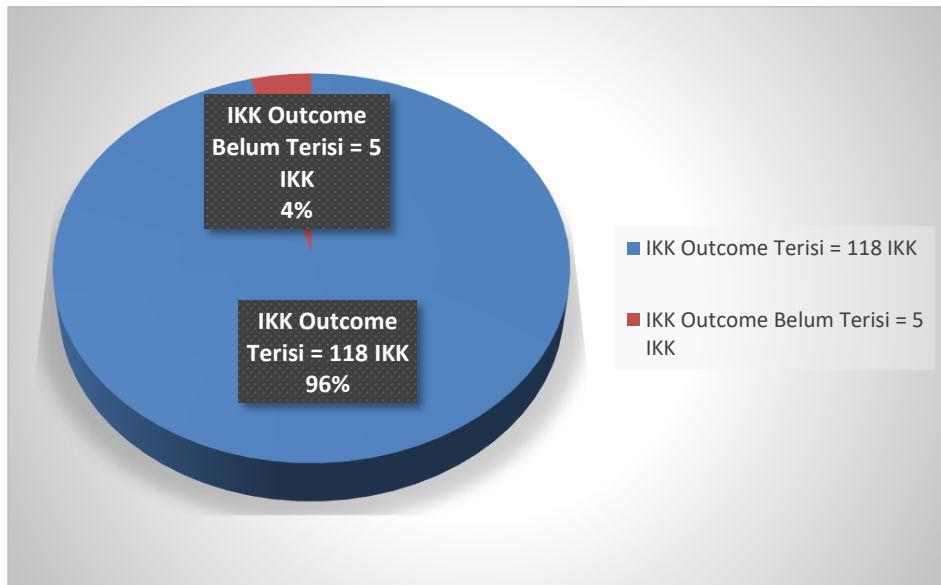


Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tidak berbeda dengan yang dilakukann Tim Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Tim evaluator dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga mengecek data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksan LPPD mendasari hasil pra-reviu oleh Tim APIP, adapun yang di cek antara lain, kesesuaia Data Kinerja dan Rumus Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

dalam Permendagri yang mengatur LPPD, Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD, serta Ketersediaan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Berikut adalah hasil reuiu yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur :

**Gambar 4.23 Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidaorjo per tanggal 20 Februari 2024**

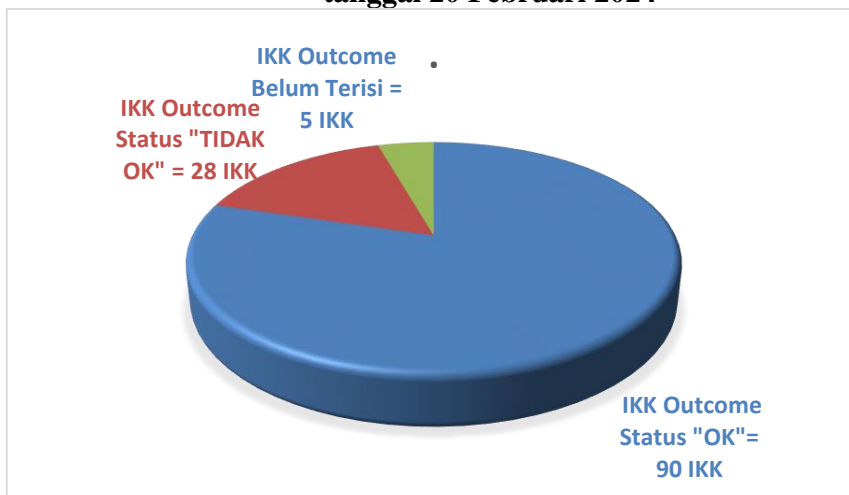


*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*

Berdasarkan hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, terdapat peningkatan keterisian data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD di Kabupaten

Sidoarjo, yang sebelumnya saat Pra-reviu Tim APIP Kabupaten Sidoarjo dari 123 IKK Outcome terdapat 111 IKK Outcome yang sudah terisi, dan 12 IKK Outcome yang belum terisi, adapun setelah dilakukan reviu dan penyampaian rekomendasi oleh Tim APIP dan dilakukan Pra evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dari 123 IKK Outcome, terdapat 18 IKK Outcome yang sudah terisi dan sisanya sebanyak 5 IKK Outcome yang belum terisi. Adapun untuk Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD, serta Ketersediaan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing urusan, berikut adalah hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur :

**Gambar 4.24 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 20 Februari 2024**



*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*



Dari 118 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD per tanggal 20 Februari 2024, sudah sebanyak 90 IKK Outcome atau 73,17% yang telah sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri yang selanjutnya oleh tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur diberikan Status “OK”, sedangkan sisanya yakni 33 atau 26,83% masih berstatus “BELUM OK” dari 33 Indikator tersebut, 5 diantaranya dikarenakan belum dilakukan pengisian data pada website portal data kinerja, dan 28 lainnya belum sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri LPPD.


#### **4. Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim Evaluator Daerah Tingkat Provinsi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur**

Setelah Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo melakukan perbaikan terhadap IKK Outcome hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang “BELUM OK”. Sesuai dengan timeline yang telah disusun oleh bagian pemerintahan, selanjutnya dilakukan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Pra-evaluasi ini dilakukan sesaat setelah dilakukan perbaikan data dan bukti dukung oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD berdasarkan hasil pra-reviu tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur secara tatap muka dan desk pada Tanggal 19-20

Februari 2024 yang hasil evaluasinya disampaikan ke Perangkat Daerah Pelaksana LPPD Kabupaten Sidoarjo melalui Website Portal Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.

Sama dengan pelaksanaan Pra-Review Tim APIP Kabupaten Sidoarjo dan Pendampingan dan Pra-evaluasi dengan Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sebelum dilaksanakan Pendampingan dan Pra-evaluasi Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Penyusunan LPPD melakukan permohonan review secara tertulis kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur agar dapat menugaskan Evaluator LPPD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan praevaluasi dimaksud

### Gambar 4.25 Surat Permohonan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur


 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p> <p><small>Jalan Gubernur Suryo No 1 Sidoarjo Kode Pos 61211 Telepon : (031) 8921846-8921900-8921853 Fax : (031) 8941145 Email : selda@sidoarjab.go.id Website : www.sidoarjab.go.id</small></p>	
Sidoarjo, 19 Februari 2024	
Nomor : 100/2252/438.1.1.1/2024	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Inspektur Pemerintah
Lampiran : Tiga (3)	Provinsi Jawa Timur
Perihal : Permohonan narasumber	d -
	<b>SURABAYA</b>

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hasil capaian kinerja tahun 2023 maka kami berencana mengadakan kegiatan "Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 oleh Evaluator Provinsi Jawa Timur" yang akan dilaksanakan pada *jadwal terlampir*, maka bersama ini kami mohon Saudara berkenan menugaskan 3 (tiga) orang auditor sebagai narasumber kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

Dikandatangani secara elektronik oleh

 **ANDJAR SURJADANTO, S.Sos., CGCAE**  
NIP. 197009261990031005


**ANDJAR SURJADANTO, S.Sos., CGCAE**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 197009261990031005

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran

Jadwal Pra Evaluasi					
No	Kegiatan	Hari	Tanggal	Tempat	Instansi
1	Pra-evaluasi oleh auditor per urusan yang dilakukan secara online melalui website Mps (portaldatakinerja.sidoarjo.go.id)	Senin - Selasa	28 - 29 Februari 2024	Kantor Inspektoral jatin	Inspektoral Pemprov Jatin
2	Penyampaian hasil pra-evaluasi inspektoral provins jatin kepada perangkat daerah pemkab sidoarjo per urusan dalam bentuk sistemat	Rabu - Kamis	4 Maret 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>3. Inspektoral</li> <li>4. Badan Pengendalian Daerah</li> <li>5. SPMD</li> <li>6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>7. Dinas Kesehatan</li> <li>8. Dinas Pekerjaan Umum Dira Marga dan Sumber Daya Air</li> <li>9. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata ruang</li> <li>10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>11. Dinas Sosial</li> <li>12. Dinas Tanamkerta</li> <li>13. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana</li> </ol>
3	Penyampaian hasil pra-evaluasi dari perangkat daerah Pemprov Jatin kepada perangkat daerah pemkab sidoarjo per urusan dalam bentuk sistemat		5 Maret 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pangan dan Pertanian</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</li> <li>3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>5. Dinas Perhubungan</li> <li>6. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</li> <li>8. Dinas Perencanaan Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>9. Dinas Kepemukiman, Jalan Raya dan Perilaku</li> <li>10. Kantor Perputakaan dan Arup</li> <li>11. Dinas Peternakan</li> <li>12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>13. Dinas Perdagangan</li> </ol>

NB : username dan password akan kami kirim via WA ke salah satu staf biro adm. Pemerintahan dan oleh esdta provins jatin

**PI SEKRETARIS DAERAH**  
SEKREJATI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
  
**ANDJAN SURJAMANTO, S.Sos.CCAGAE**  
Pemkab. Sidoarjo  
 NIP 19709261990031005

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektoral Provinsi Jawa Timur hampir sama dengan Pra-reviu yang dilaksanakan oleh tim APIP Inspektoral Kabupaten Sidoarjo, yakni melakukan pra-reviu online, tanpa tatap muka dan penyampaian dilakukan melalui Website Portal Data Kinerja. Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Inspektoral Jawa Timur dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 28-29 Februari 2024, dilakukan secara online Website Portal Data Kinerja.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur, melakukan evaluasi berdasarkan hasil inputan perbaikan Perangkat Daerah yang telah di evaluasi oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yakni data cut-off 27 Februari 2024. Berikut adalah hasil Pra evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur :

**Gambar 4.26 Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo per tanggal 20 Februari 2024**

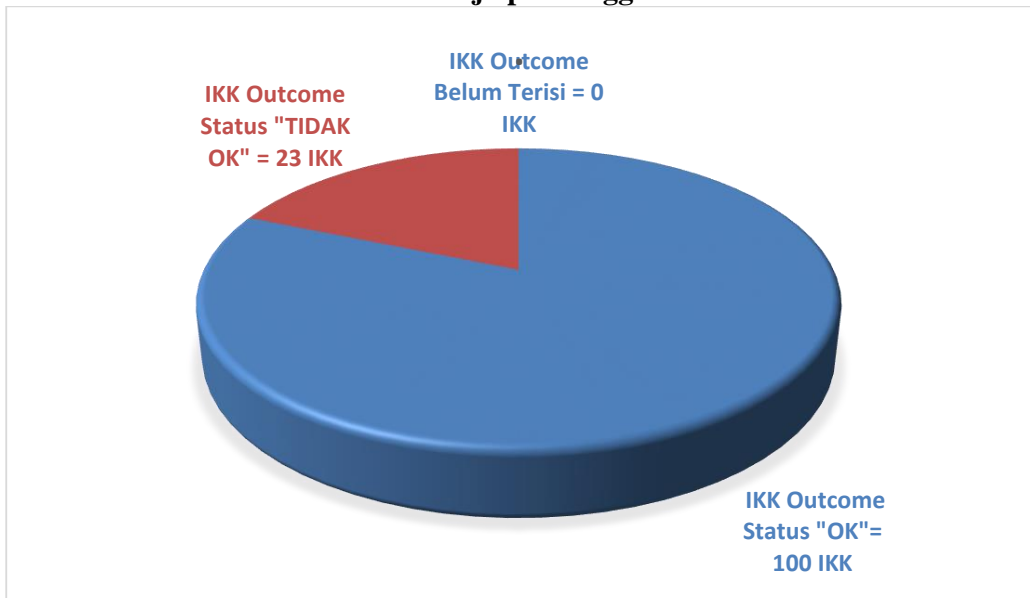


*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*

Berdasarkan hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penginputan data dengan maksima, terlihat dari sudah 100% atau sebanyak 123 IKK Outcome telah diinputkan oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Adapun untuk Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD, serta Ketersediaan Surat Pengantar yang

telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing urusan, berikut adalah hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur :

**Gambar 4.27 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 28 Februari 2024**



*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*

Dari 123 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD per tanggal 28 Februari 2024, sudah sebanyak 102 IKK Outcome atau 82,9% yang telah sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala pekrangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri yang selanjutnya oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur diberikan Status “OK”, sedangkan sisanya yakni 21 atau 17,1%

masih berstatus “BELUM OK” dikarenakan belum sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri LPPD.

Penyampaian hasil dari Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur disampaikan melalui Website Portal Data Kinerja, adapun Bagian Pemerintahan selaku sekretariat penyusunan LPPD melakukan percepatan serta pengoptimalan bagi IKK Outcome yang berstatus “BELUM OK” dengan mengundang Perangkat Daerah Terkait untuk dilakukan Desk untuk mengetahui Kendala dalam mengumpulkan data dan bukti dukung.

Penyampaian hasil Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui Rapat pengoptimalan data serta bukti dukung, yang dilaksanakan pada hari jumat, 1 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Delta Praja Sekterariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. dengan menghadirkan Perangkat Daerah Pelaksana LPPD yang masih berstatus “BELUM OK” dan dilakukan penyampaian oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, berikut adalah dokumentasi kegiatan rapat :

**Gambar 4.28 Foto Kegiatan Rapat penyampaian hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur**




Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

#### **5. Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim Evaluator Nasional yakni Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri**

Pendampingan dan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Nasional yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi terkahir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelum dilakukan Reviu akhir oleh APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Tidak berbeda denga Pendampingan dan Pra-reviu yang dilaksanakan sebelumnya, sebelum dilakukan Pendampingan dan Pra-evaluasi, Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo melalui Bagian Pemerintahan selaku sekretariat pelaporan LPPD menyampaikan surat permohonan Pendampingan dan Pra-evaluasi secara tertulis kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, agar dapat menugaskan Evaluator LPPD Nasional Wilayah Jawa Timur dalam melaksanakan pendampingan dan praevaluasi dimaksud.

**Gambar 4.29 Surat Penyampaian Permohonan Pendampingan dan Pra-evaluasi ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p> <p><small>Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 81211 Telepon. (031) 8921046, 8921980, 8921853 Faks. (031) 8941145 Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : <a href="http://www.sidoarjokab.go.id">www.sidoarjokab.go.id</a></small></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Sidoarjo, 21 Februari 2024</p>
<p>Nomor : 100/2314/438.1.1.1/2024 Sifat : Penting Lampiran : - Hal : Permohonan narasumber</p>	<p>Kepada Yth. Bpk. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cq. Pih. Direktur Evaluasi Kinerja &amp; Peningkatan Kapasitas Daerah</p>
<p>di -</p> <p style="text-align: center;"><b>J A K A R T A</b></p>	
<p>Sehubungan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hasil capaian kinerja tahun 2023 tahun anggaran 2024 maka kami berencana mengadakan kegiatan "Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) hasil kinerja tahun 2023" adapun kegiatan pra evaluasi akan kami lakukan dalam bentuk evaluasi capaian kinerja IKK Outcome dan output dan penyampaian hasil evaluasi dalam sebuah kegiatan dalam bentuk FGD antara evaluator kemendagri dan seluruh perangkat daerah di kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Maret Tahun 2024 melalui website portaldatakerja dengan <b>username : kemendagri</b>, <b>password : sidoarjokab</b> dan penyampaian hasil pra evaluasi oleh evaluator kemendagri kepada seluruh perangkat daerah dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 melalui <b>zoommeeting</b> maka bersama ini kami mohon Saudara menugaskan pejabat/staf yang menangani evaluasi satu orang pejabat eselon 3, satu orang pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda dan 2 (dua) orang staf yang membidangi Kebijakan LPPD sebagai narasumber kegiatan dimaksud</p> <p>Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya disampaikan terimakasih.</p>	
<p><b>Pj. SEKRETARIS DAERAH</b></p> <p><small>Ditandatangani secara elektronik oleh</small></p> <p><b>ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGAE</b> NIP. 19700926199031005</p> <p><b>ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGAE</b> Pembina Utama Muda NIP.197009261990031005</p>	

*Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo*



Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) berbeda dengan pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Daerah. Kegiatan Pra-evaluasi dilaksanakan secara online melalui website portal data kinerja adapun penyampaiannya kepada Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dilaksanakan secara Hybrid yakni menggabungkan peserta yang hadir secara fisik dengan peserta yang berpartisipasi dari jarak jauh. Teknologi konferensi audio dan video dalam hal ini zoom meeting digunakan untuk mengaktifkan koneksi antara kedua grup peserta. Jadi, dalam rapat hibrida, beberapa peserta berada di lokasi fisik yang sama, sementara yang lainnya mengikuti rapat melalui perangkat komunikasi online. Pada kegiatan penyampaian ini, Perangkat Daerah diundang oleh Bagian Pemerintah untuk mengikuti kegiatan pra-evaluasi secara langsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo, dan Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) menyampaikan hasil pra-evaluasinya melalui media zoom meeting . Data dan Bukti Dukung yang di evaluasi tersebut merupakan hasil inputan perangkat daerah pelaksana LPPD yang sudah dioptimalkan berdasarkan hasil pendampingan dan pra-evaluasi dari Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo, Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Tim Inspektorat Provinsi Jawa Timur cut-off 6 Maret 2024.

Sesuai dengan surat permohonan pendampingan dan Pra-evaluasi, kegiatan pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat

Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) dilakukan pada tanggal 7 dan 8 Maret, adapun untuk kegiatan pendampingan dan penyampaian hasil Pra-evaluasi yang seharusnya dilaksanakan pada Kamis, tanggal 14 Maret 2024, diundur menjadi tanggal Jumat, 15 Maret 2024, berikut adalah dokumentasi dan hasil rapat pendampingan dan pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD).

**Gambar 4.30 Foto Kegiatan Rapat penyampaian hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) secara *Hybrid***

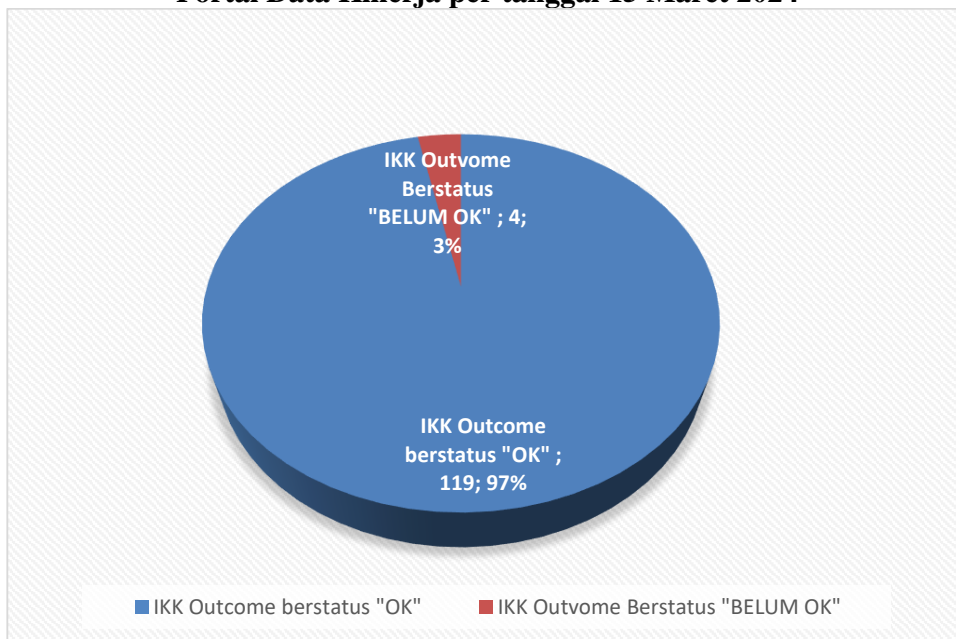


*Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo*

Untuk keterisian data, sesuai dengan hasil pendampingan dan pra-evaluasi yang dilakukan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, sudah dilakukan pengisian keseluruhan IKK Outcome oleh seluruh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD, yakni sudah 123 IKK Outcome yang terisi, atau 100% IKK Outcome sudah terisi data serta bukti dukungannya.

Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) melakukan evaluasi berdasarkan hasil inputan perbaikan Perangkat Daerah yang telah di evaluasi oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo dan Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Tim Inspektorat Provisni Jawa Timur, yakni data cut-off 6 Maret 2024. Berikut adalah hasil Pra evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD)

**Gambar 4.31 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 15 Maret 2024**



*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*

## **6. Review LPPD yang dilaksanakan oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.**

Sesuai dengan surat permohonan Reviu oleh Bagian Pemerintahan kepada Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, untuk pelaksanaan reviu LPPD Tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan melalui SILPPD (Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yakni website pelaporan LPPD yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan reviu dilakukan pada tanggal 25-30 Maret 2024, berdasarkan data capaian serta bukti dukung yang sebelumnya telah di pra-reviu oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, dan dilakukan pendampingan serta Pra-evaluasi oleh Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Inspektortat Provinsi Jawa Timur dan Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD). Adapun yang bertugas menginput data yang telah disesuaikan dengan hasil pendampingan serta pra-evaluasi tersebut dari Website Portal Data Kinerja ke website SILPPD adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Pelaporan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk keterisian data, sesuai dengan hasil pendampingan dan pra-evaluasi yang dilakukan sampai dengan pendampingan dan pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), sudah dilakukan pengisian keseluruhan IKK Outcome oleh seluruh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD, yakni sudah 123 IKK Outcome yang

terisi, atau 100% IKK Outcome sudah terisi data serta bukti dukungnya.

Hasil pelaksanaan Reviu APIP disampaikan melalui Catatan Hasil Reviu (CHR) yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Sidaorjo Kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo. Dari tanggal yang ditentukan untuk dilaksanakan Reviu oleh Bagian Pemerintahan kepada tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo yakni 25-30 Maret 2024. Inspektorat telah menyelesaikan reviu LPPD dimaksud pada tanggal 27 Maret 2024, dan di tanggal 28 Maret sduah diterbitkan CHR terhadap LPPD Tahun 2023, berikut adalah catatan hasil Reviu :

**Gambar 4.32 Finalisasi Catatan Hasil Reviu (CHR) tim APIP insepktorat Kabupaten Sdoarjo terhadap Data dan Bukti Dukung LPPD Tahun 2024 pada Website SILPPD Kementerian Dalam Negeri**

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO INSPEKTORAT DAERAH		No. Dok. No. Reviu Tanggal	Uraian UR/02/4 : 28 Maret 2024
<b>CATATAN HASIL REVIU</b>			
<p>Selanjutnya dengan Surat Perintah Tugasi dari Inspektur Kabupaten Sidaorjo Nomor 7961.3/700438.4/2024 Tanggal 8 Maret 2024 untuk melaksanakan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Kabupaten Sidaorjo, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:</p>			
<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>		<b>Indeks</b>	<b>IKK</b>
<b>Penyempurnaan LPPD selanjutnya:</b>			
1. Penyempurnaan SKL		KKR/0	1
<p>Dalam LPPD, IKK disusun sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.</p>			
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja		KKR/0	1
<p>SCP Prinsip Inventarisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sidaorjo Nomor 189/708438.1.1.3/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang merupakan inventarisasi data capaian LPPD, Penyusunan LPPD, Reviu SKL LPPD, Instruksi dan Rencana Aksi LPPD, dan penyusunan LPPD jangka 16 April Sidaorjo Nomor 101.3.3/90438.1.1.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidaorjo Tahun 2023/24, 2024.</p>			
3. Metodologi Pengukuran Kinerja		KKR/0	1
<p>Metodologi Pengukuran Kinerja sesuai dengan SCP Prinsip Inventarisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sidaorjo Nomor 189/708438.1.1.3/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang merupakan inventarisasi data capaian LPPD, Penyusunan LPPD, Reviu SKL LPPD, Instruksi dan Rencana Aksi LPPD, dan penyusunan LPPD jangka 16 April Sidaorjo Nomor 101.3.3/90438.1.1.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidaorjo Tahun 2023/24, 2024.</p>			
4. Analisis, Pembobotan, dan Interpretasi Kinerja		KKR/0	1
<p>Analisis, Pembobotan dan Interpretasi Kinerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidaorjo dengan menggunakan SKL hasil masing-masing Perangkat Daerah yang sudah dibuat.</p>			

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO INSPEKTORAT DAERAH		No. Dok. No. Reviu Tanggal	Uraian UR/02/4 : 28 Maret 2024
<p>Selanjutnya dengan Surat Perintah Tugasi dari Inspektur Kabupaten Sidaorjo Nomor 7961.3/700438.4/2024 Tanggal 8 Maret 2024 untuk melaksanakan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Kabupaten Sidaorjo, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:</p>			
<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>		<b>Indeks</b>	<b>IKK</b>
<b>Penyempurnaan LPPD selanjutnya:</b>			
1. Penyempurnaan SKL		KKR/0	1
<p>Dalam LPPD, IKK disusun sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.</p>			
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja		KKR/0	1
<p>SCP Prinsip Inventarisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sidaorjo Nomor 189/708438.1.1.3/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang merupakan inventarisasi data capaian LPPD, Penyusunan LPPD, Reviu SKL LPPD, Instruksi dan Rencana Aksi LPPD, dan penyusunan LPPD jangka 16 April Sidaorjo Nomor 101.3.3/90438.1.1.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidaorjo Tahun 2023/24, 2024.</p>			
3. Metodologi Pengukuran Kinerja		KKR/0	1
<p>Metodologi Pengukuran Kinerja sesuai dengan SCP Prinsip Inventarisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sidaorjo Nomor 189/708438.1.1.3/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang merupakan inventarisasi data capaian LPPD, Penyusunan LPPD, Reviu SKL LPPD, Instruksi dan Rencana Aksi LPPD, dan penyusunan LPPD jangka 16 April Sidaorjo Nomor 101.3.3/90438.1.1.3/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidaorjo Tahun 2023/24, 2024.</p>			
4. Analisis, Pembobotan, dan Interpretasi Kinerja		KKR/0	1
<p>Analisis, Pembobotan dan Interpretasi Kinerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidaorjo dengan menggunakan SKL hasil masing-masing Perangkat Daerah yang sudah dibuat.</p>			



<p>4) Analisis, Pembabatan dan Interpretasi Kinerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan memfungsikan IKK hasil monitoring Pengabdian Desa yang sudah dibuat</p> <p>2). Keaslian Matrik LPD sudah sesuai</p> <p>Matrik LPD secara garis besar sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Efisiensi No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman Kinerja Pemerintah Daerah, serta diutamakan penulisan sudah digambarkan Bab per Bab mulai Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V, namun selanjutnya perlu diutamakan penulisan bab Bab awal pedoman.</p> <p>3). Keaslian Sistemika LPD</p> <p>Kemudian diteliti secara garis besar telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Efisiensi No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman Kinerja Pemerintah Daerah, serta diutamakan penulisan sudah digambarkan Bab per Bab mulai Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V, namun selanjutnya perlu diutamakan penulisan bab Bab awal pedoman.</p> <p>2. Penyajian atau Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p> <p>a. Capaian Kinerja Makro</p> <p>berdasarkan review melalui <a href="https://siskad.kemendagri.go.id">https://siskad.kemendagri.go.id</a> dan 6 (enam) RK Makro tahun 2023 tidak ada capaian yang tidak berhasil OK.</p> <p>b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>1) Laporan realisasi RK Kabupaten Sidoarjo sebanyak 123 IKK, salah satunya OK sebanyak 122 IKK, direvisi melalui <a href="https://siskad.kemendagri.go.id">https://siskad.kemendagri.go.id</a> dengan:</p> <p>2) Babur tidak melebihi urusan pemerintahan (kemudian 2)</p> <p>3) Babur capaian kinerja RK hasil per bidang urusan pemerintahan (kemudian 3)</p> <p>4) Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan Capaian indikator kinerja per urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang bertitik tolak, di revisi melalui <a href="https://siskad.kemendagri.go.id">siskad.kemendagri.go.id</a> sehingga akan diupdate terupdate, mengupdate hal yang perlu dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti.</p> <p>1. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah terdapat dalam Bab B. 3 Rancangan Awal LPD Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan IE MERNYAN RB No. 5 Tahun 2021 tentang Laporan Kinerja Pemerintah Daerah nomor 1 huruf C bahwa Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah mencakup Penencanaan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dapat diimpikan bahwa capaian dari 6 tujuan dengan 3 indikator Tujuan, secara keseluruhan indikator dalam kategori Sangat Baik. Jika dirata-</p>	<p>rata capaian kinerja tujuan tersebut tercapai 117,78% atau Sangat Baik. Selanjutnya dari 13 sasaran dengan 31 indikator sasaran, ada 26 (dua puluh enam) indikator sasaran dinilai Sangat Baik, 1 (satu) indikator yang belum dinilai, hal yang oleh Kementerian atau lembaga terkait. Berdasarkan hasil penilaian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 103,20% atau dalam kategori Sangat Baik. Jika dilihat dari ketepatan tujuan dan sasaran dengan 9 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 110,49%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Sangat Baik.</p> <p>4. Tugan pembabatan</p> <p>Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Program dan Kegiatan yang merupakan bagian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugan Pembabatan. Adapun Program dan Kegiatan yang didaftar dari Pemerintah Pusat berupa: Desa Adat Khauas (DAK) Fisk, Dana Adat Khauas (DAK) Non Fisk, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khauas (BKU). Selanjutnya untuk Program, selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan Tugan pembabatan secara khusus kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khauas (BKU). Bantuan ini dimaksudkan untuk memperlancar kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Kegiatan yang merupakan Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digotong melalui kegiatan Moerrenbang.</p> <p>5. Penyajian Penempatan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Diujikan dalam Bab IV rancangan dokumen LPD, dengan ketentuan : Dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, Bidang Urusan Ketertanman, Kertanian Urusan dan Perindrihan Masyarakat dan Social, capaiannya sudah 100%.</p> <p>Konkrit/Peubahan yang Belum Dilakukan/Tidak Ditempat</p> <p>Atas ketidapan-ketidapan tersebut diatas, telah kami komunikasikan dan kami sampaikan kepada Tim Penyusun LPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal LPD dengan melakukan perbaikan sebagai berikut:</p> <p>a. Keaslian matrik dan sistemika draf LPD</p> <p>Selanjutnya penomoran bab Bab diutamakan Pedoman Penyusunan LPD</p>
---	---

4. Capaian Kinerja Makro

Melakukan perbaikan LPD Tahun 2023 Bab 6.1 pada Bab Makro, ketepatan Penulisan Tahun 2023 atau 0.00 sesuai/diupdate

4. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah -  
Melakukan perbaikan LPD Tahun 2023 Bab 3 pada pasal/kegiatan Capaian IKK sesuai dengan RK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Kemudian Pengantar

*Azon kami tidak lanjut*

Jakarta 18 Maret 2024

TIM PENYUSUN LPD  
Wakil Pemangkas Daerah

TIM BERSU  
1. Yana Budha, STP, M.Si  
2. Tessa Karika Suroti, S.Kom, S.H  
3. D. Indraya P.T.A, M.M.A.  
4. Nur Hafidha, S.E.  
5. Nurul Hafidha, A.Md  
6. Rizki Andika, A.Md

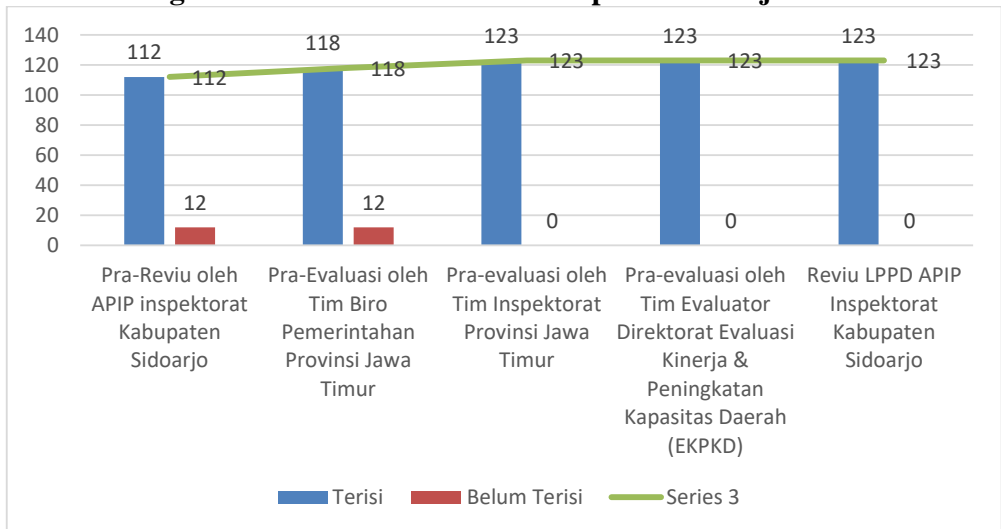
Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil Catatan Hasil Reviu tersebut bahwasanya dari 123 IKK Outcome yang diampu dan sudah diisiikan data serta bukti dukungnya oleh Kabupaten Sidoarjo, sudah 123 IKK yang bersatatus “OK”. Dimana berarti sudah 100% IKK Outcome sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala

perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri LPPD.

Selanjutnya dilakukan kompilasi serta penelaahan data capaian serta data dukung mulai dari data awal yang pertama kali dilakukan Pra-reviu oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo pada Website Portal Data Kinerja, dilaksanakan pendampingan dan pra-evaluasi oleh Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Inspektortat Provinsi Jawa Timur dan Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), sampai dengan terlaksanaakannya finalisasi pelaksanaan Reviu LPPD oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo pada website SILPPD Kementerian Dalam Negeri, Berikut adalah trend keterisian data LPPD di Kabupaten Sidoarjo :

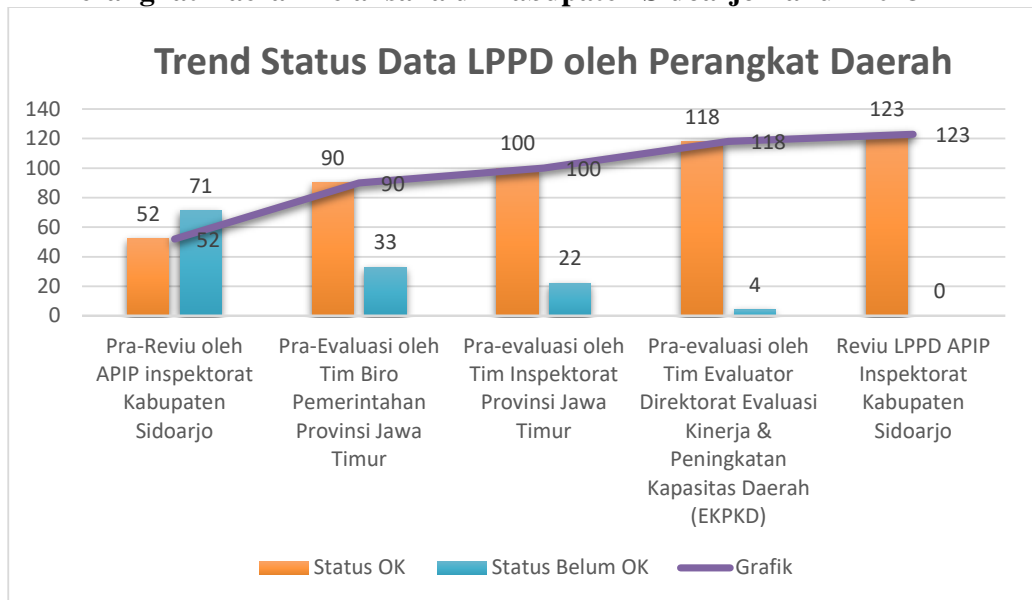
**Gambar 4.33 Grafik Trend Keterisian Data dan Bukti Dukung LPPD oleh Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023**



*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*



**Gambar 4.34 Grafik Trend Status Data dan Bukti Dukung LPPD oleh Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023**



*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis*

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa baik keterisian data Terus meningkat seiring dengan dilakukannya pendampingan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tiap-tiap evaluator. Mulai yang awalnya saat kegiatan Pra-reviu hanya terisi sebanyak 112 dari 123 IKK Outcome yakni 91% terisi, namun dengan dilakukannya pendampingan dan pra-evaluasi LPPD sudah 123 IKK Outcome yang terisi, sehingga pada finalisasi Reviu LPPD, Keterisian data menjadi menjadi 100%. Sedangkan untuk status Kinerja LPPD juga menunjukkan adanya peningkatan data capaian yang signifikan, karena diawal hanya terdapat 52 dari 123 IKK outcome yakni 42,27% yang sudah sesuai data serta bukti dukungunya dengan status “OK”, namun dengan dilakukan pendampingan pra-evaluasi LPPD,

keseluruhan IKK Outcome sudah yakni 123 IKK atau 100% sudah sesuai data serta bukti dukungnya dan mendapat status “OK” dari TIM APIP.

Begitupula dengan indeks capaian masing-masing indikator yang selama pendampingan dan pra-evaluasi oleh Tim evaluator daerah dan Nasional juga mengalami peningkatan, karena memang saat dilaksanakan pendampingan dan pra-evaluasi bukan hanya dilakukan evaluasi terhadap data yang telah di input melainkan juga disampaikan bagaimana data yang di inputkan dapat meningkat kuantitas dan kualitasnya. Tim evaluator daerah dan nasional tentu sudah mengetahui bagaimana seharusnya data dari tiap-tiap indikator disajikan, sehingga selain menjelaskan kepada Perangkat Daerah Pelaksana LPPD adanya indikator dan data dukung yang belum sesuai juga memberikan masukan mengenai kiat-kiat serta data apa yang seharusnya digunakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD untuk meningkatkan capaian LPPD yang dilaporkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah hasil dari masing-masing pendampingan dan pra-evaluasi berdasarkan Urusan dan Capaian yang diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.

**Tabel 4.11 Tabel hasil capaian dari kegiatan Pra-reviu serta pendampingan dan evaluasi oleh evaluator internal dan eksternal**

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	109.03 %	109.03 %	100.00 %	100.00 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	108.87 %	108.87 %	99.75 %	99.75 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	117.57 %	117.57 %	99.89 %	99.89 %
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	63.67 %	63.67 %	100.00 %	100.00 %
5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0.15 %	0.15 %	0.15 %
6	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96.68 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
7	Persentase penderita DM yang mendapatkan	98.60 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	pelayanan kesehatan sesuai standar				
8	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	108.81 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
9	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	146.16 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
10	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84.78 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
11	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	67.21 %	86.89 %	100.00 %	100.00 %
12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99.57 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
13	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.90 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
14	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	103.58 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
15	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95.12 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
16	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
17	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97.32 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
18	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99.88 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
19	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	%	100%	100%
20	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	85.66 %	85.66 %	85.66 %	85.66 %
21	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota				
22	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	97.55 %	97.55 %	97.55 %	97.55 %
23	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	%	43.23 %	100.00 %	100.00 %
24	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98.81 %	98.81 %	98.81 %
25	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
26	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	97.35 %	97.35 %	97.35 %	97.35 %
27	Rasio tenaga operator/teknisi/anali s yang memiliki sertifikat kompetensi	%	%	%	89.30 %
28	Rasio proyek yang menjadi kewenangan	%	%	%	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
29	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
30	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	%	%	%	100%
31	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	%	44.51 %	80.38 %	80.38 %
32	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0.21 %	0.00 %	0.00 %
33	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
34	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
35	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	78.67 %	78.67 %	100.00 %	100.00 %
38	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
39	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	38.98 %	38.98 %	38.98 %	100.00 %
40	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				
41	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
42	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
43		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %



NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
44	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	62.39 %	62.39 %	62.39 %	62.39 %
45	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	14016.00 %	14016.00 %	14016000479.79 %	148791532.93 %
46	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	53.53 %	53.53 %	79.79 %	79.79 %
47	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	67.99 %	67.99 %	67.99 %	67.99 %
48	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	72.38 %	72.38 %	72.38 %	72.38 %
49	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.04 %	0.05 %	0.04 %	100.00 %
50		18.86	17.66	18.86	18.86

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
51	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.52 %
52	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	%	%	100.00 %
53	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	88.89 %	57.74 %	100.00 %
54	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	%	%	100.00 %
55	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100.00 %	100.00 %	3.89 %
56	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
57	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	13.22 %	13.22 %	13.22 %	10.17 %
60	Perekaman KTP Elektronik	99.89 %	99.89 %	99.89 %	99.89 %
62	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	51.72 %	51.72 %	51.72 %	51.72 %
63	Kepemilikan akta kelahiran	98.20 %	98.20 %	98.20 %	98.20 %
64	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	77.78 %	77.78 %	77.78 %	77.78 %
65	TFR (Angka Kelahiran Total)				
66	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern	70.59 %	70.59 %	70.59 %	70.59 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
67	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.23 %	8.23 %	8.42 %	8.42 %
68	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
69	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	83.33 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %
70	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	%	100.00 %	100.00 %
71	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	%	65.09 %	72.83 %
72	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	93.19 %	93.19 %	93.19 %
73		%	%	-2.87 %	-2.87 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota				
74	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2.23 %	2.23 %	52.11 %
75	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10.39 %	10.39 %	10.39 %	10.39 %
76	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
77	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
78	Tingkat keamanan informasi pemerintah	83.26 %	83.26 %	83.26 %	83.26 %
79	Terlestariannya Cagar Budaya	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
80	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
81		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
82	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
83	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
84	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %
85	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5.26 %	5.26 %	5.26 %	5.26 %
86	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	%	8.56 %	8.56 %
87	Rasio PAD	%	%	40.85 %	40.85 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
88	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
89	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				
90	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	%	61.68 %	61.68 %
91	Opini Laporan Keuangan				
92	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama		0.00 %	0.00 %	0.00 %
93	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	0.00 %	1811.21 %	1811.21 %	1811.21 %
94	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	1931.46 %	67.84 %	67.84 %	67.84 %
95	Prosentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Ne dan geri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan	67.84 %	9.69 %	9.69 %	9.69 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	barang/jasa pemerintah daerah				
96	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9.69 %	145.15 %	59.15 %	59.15 %
97	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	145.15 %	27.25 %	27.25 %	27.25 %
98	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.25 %	79.44 %	79.44 %	79.44 %
99	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	%	=	=	27,20%
100	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	=	10.18 %	10.20 %	10.20 %
101	Assets Management			3	4
102	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total	10.18 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %



NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya				
10 3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
10 4	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	100.00 %	99.17 %	99.17 %	99.17 %
10 5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	99.17 %	86.19 %	86.19 %	86.19 %
10 6	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	86.19 %	68.13 %	68.13 %	68.13 %
10 7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	65.47 %	100.00 %	58.21 %	58.21 %
10 8	Tingkat Hunian Akomodasi	100.00 %	%	%	3.54 %
10 9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	6.94 %	6.94 %	6.94 %
11 0		6.94 %	674.48 %	674.48 %	674.48 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				
111	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1593.29 %	91.72 %	-91.72 %	-61.89 %
112	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	91.71 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
113	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
114	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	84.79 %	84.79 %	84.79 %
115	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100.00 %	118.88 %	118.88 %
116	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0.83 %	0.83 %	0.83 %
117	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	%	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
118	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	%	100.00 %	100.00 %
119	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	%	100.00 %	100.00 %
120	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%			100.00 %
121	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota				100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
12 2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				100.00 %
12 3	Transmigrasi				100.00 %

Keterangan :



Capaian yang dapat ditingkatkan

Capaian yang disesuaikan dengan rumus indikator Urusan

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dalam pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi tidak hanya sekedar dilakukan koreksi terhadap data capaian serta kesesuaian bukti dukung yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana, melainkan dilakukan juga pendampingan yakni penjelasan tentang data yang sesuai dengan rumus indikator urusan dan upaya penyesuaian penghitungan bagaimana agar dapat ditingkatkan baik di tahun-n maupun tahun yang akan datang. Berdasarkan data tersebut, dari 123 IKK Outcome yang telah diisi isikan oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD dan setelah dilaksanakan Pendampingan serta Pra-evaluasi oleh Evaluator Daerah dan evaluator nasional, dari terdapat 44 IKK Outcome yang telah berhasil dilakukan upaya peningkatan capaian dan 12 IKK telah di arahkan untuk menggunakan data capaian yang sesuai dengan yang diinginkan oleh indikator Urusan LPPD.

Hal tersebut merupakan strategi yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Dokumen LPPD, yang harapannya dari tahun ke tahun Status Kinerja Kabupaten Sidoarjo tidak menurun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Keberadaan Sekretariat Penyusunan LPPD dalam hal ini Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD, dan Tim evaluator baik internal maupun eksternal merupakan pilar utama dalam suksesnya penyelenggaraan LPPD di kabupaten Sidoarjo. Ketiga pilar tersebut harus memiliki koordinasi an sinergitas yang tinggi terkait berbagai aspek yang memastikan tersusunnya dokumen LPPD yang dapat dipertanggungjawabkan baik capaian serta data dukungannya.

Sesuai yang teori oleh Geoff mulgan (2009) berkaitan dengan indikator strategi, strategi yang baik harus memenuhi indikator-indikator yang merupakan bagian dari pelaksanaan strategi yakni :

### **1. Tujuan (*Purposes*)**

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dilakukannya penelitian ini, bahwasanya tujuan dari dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah untuk mengatasi kendala-kendala penyusunan LPPD akibat dari adanya perubahan dasar pelaksanaan Penyusunan LPPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah, yang merubah hampir keseluruhan strusktur dari dokumen LPPD. Adanya penataan aparatur dalam hal ini berupa mutasi dan promosi juga menjadi

kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD, dikarenakan pergantian personil yang menangani penyusunan LPPD seringkali tidak dibarengi dengan transfer ilmu maupun pengetahuan dalam melaksanakan penyusunan data capaian serta data dukung yang diperlukan dalam penyusunan LPPD. Selain itu, penetapan target skor dan status LPPD yang telah disahkan dalam dokumen rencana aksi Dimana dalam tahun-ke tahun diharuskan mengalami peningkatan juga menjadi tujuan dari dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Seperti halnya yang sebutkan oleh Asmara Hadi, S.STP, M.AP Selaku Kepala Bagian Pemerintahan bahwa :

*“Tujuan dari dilaksanakannya Strategi Penyusunan LPPD ini adalah agar pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi lebih efektif dan efisien”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memanfaatkan segala sarana, prasarana, personal dan anggaran seefektif dan seefisien mungkin dengan hasil yang maksimal, agar kendala dalam penyusunan LPPD dapat ditekan ataupun dihilangkan.

## **2. Lingkungan (environment)**

Indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari sebuah perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar (change of ambient condition) yang apabila di analisa dari dari

pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, grafik trend keterisian data dan status kesesuaian serta keabsahan data capaian dan data dukung yang telah diisikan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, maka terdapat perubahan kearah yang positif, mulai dari keterisian data diawal yang hanya terisi 112 IKK Outcome yang terisi dan hanya terdapat 52 IKK Outcome yang telah sesuai data dan bukti dukungnya dari jumlah keseluruhan IKK adalah 123 IKK, yang mana setelah dilakukan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo yakni pelaksanaan pendampingan dan pra-evaluasi bagi Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap masing-masing IKK Outcome Urusan yang ada, maka seluruh IKK Outcome yakni sebanyak 123 IKK telah dipenuhi data dan sesuai seluruh bukti dukungnya. Seperti halnya yang sebutkan oleh Mohammah Lukman Arif Selaku Analis Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa :

*“Pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo memberikan pengaruh yang baik terhadap skor dan kinerja LPPD karena memudahkan pengumpulan data dan evaluasi yang dilakukan berlapis meminimalisir adanya kekeliruan data dan tim evaluator eksternal memberikan masukan dalam bentuk Upaya peningkatan capaian”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan, diketahui bahwa strategi penyusunan LPPD berupa dibentuknya Sistem Informasi Portal Data Kinerja serta pelaksanaan pendampingan dan pra-evaluasi telah memberikan

dampak positif bagi tim koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo yakni peningkatan bagi peningkatan skor dan status kinerja LPPD.

### **3. Pengarahan (Direction)**

Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, pengarahan dilakukan sebagai upaya menggerakkan Perangkat Daerah untuk dapat mencapai tujuan yang dilaksanakan yakni peningkatan skor dan status kinerja LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Pengarahan terdiri dari Koordinasi, motivasi, Komunikasi dan Perintah. Yang mana Bagian Pemerintahan memiliki peran yang sangat penting selaku Sekretariat Penyusunan LPPD dalam melaksanakan setiap pelaksanaan pengarahan yang ada.

- a. Koordinasi dalam hal ini dilaksanakannya rapat berkala dalam proses penyusunan LPPD guna menginventarisasi kendala serta bagaimana Solusi yang sesuai dengan kendala tersebut
- b. Motivasi juga merupakan bentuk pengarahan yang diberikan oleh Bagian Pemerintahan kepada Perangkat Daerah pelaksana, motivasi diberikan setiap kali dilaksanakan tahapan pendampingan dan pra-evaluasi LPPD dengan membandingkan capaian tahun N dengan capaian N-1, sehingga perangkat daerah dapat membuat rencana aksi peningkatan capaian dari tahun ke tahunnya.
- c. Komunikasi yang dilakukan Bagian Pemerintahan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD dan evaluator



LPPD internal dan eksternal telah dibangun sedemikian rupa yakni melalui media website portal data kinerja, melalui zoom meeting, sarana konsultasi chat dan telepon dengan media komunikasi *whatsapp* dan juga tatap muka langsung melalui desk dan rapat-rapat lainnya, sehingga dalam penyampaian hasil evaluasi dapat diterima dengan baik oleh Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD .

- d. Perintah (Command) Perintah dalam pelaksanaan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan persuasive, yakni melalui surat penyampaian timeline maupun surat himbauan pelaksanaan revisi data capaian serta bukti dukung bagi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD yang masih belum sesuai data capaian serta data dukungnya.

Adapun hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Tyas Kurnia Sari, SE selaku perencana pada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo :

*“Penyusunan LPPD kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kerjasama dan sinergi berupa koordinasi, motivasi, komunikasi dan penyampaian perintah antar OPD sebagai perangkat daerah pelaksana urusan LPPD dengan bagian pemerintahan sebagai pembina penyusunan LPPD yang sesuai dengan ketentuan berjalan optimal, sehingga tujuan strategi penyusunan LPPD dapat tercapai”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, di dapatkan informasi bahwa kegiatan oengarahan berupa koordinasi, movivasi, komunikasi dan penyampaian perintah dalam Tim Koordinasi Penyusunan LPPD telah dilaksanakan

dengan baik, sehingga tujuan-dilaksnakannya Strategi penyusunan LPPD dapat tercapai.

#### **4. Aksi (Action)**

Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai pelaksana aksi, yakni penyusun langkah-langkan strategi sekaligus penggerak seluruh Tim Koordinasi LPPD dalam pelaksanaan Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan langkah-langkah dilakukan melalui disusunnya timeline pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penggerak bagi seluruh tim dilakukan dengan menyampaikan timeline yang telah disusun kepada seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Setelahnya Perangkat Daerah Pelaksana LPPD melakukan aksi berupa pengisian data serta bukti dukung yang sesuai dengan IKK Outcome masing-masing urusan dan sesaat sebelum dokumen selesai disusun, Tim evaluator internal dalam hal ini APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi berupa Reviu pberdasarkan data capain dan bukti dukung yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Asmara Hadi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

*“Masing-masing anggota dari Tim Koordinasi LPPD telah menjalankan perannya dengan optimal, sesuai dengan rencana atau timeline pelaksanaan strategi yang telah disusun, sehingga tujuan pelaksanaan strategi dapat terwujud”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa masing-masing Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan perannya dengan baik sehingga bisa tercapai tujuan dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

## **5. Belajar (Learning)**

Berdasarkan hasil pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, bahwasanya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Hal ini Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo telah dapat mengidentifikasi apasaja kendala-kendala dalam pelaksanaan setiap IKK di masing-masing urusan LPPD melalui dilaksanakannya Pendampingan dan pra evaluasi oleh TIM evaluator daerah provinsi dan evaluator nasional, yang mana dalam pelaksanaanya, Perangkat Daerah pelaksana LPPD diberikan masukan serta strategi dan upaya bagi masing-masing perangkat daerah pelaksana LPPD. Seperti halnya yang sebutkan oleh Mohammad Lukman Arif Selaku Analis Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa :

*“Pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo memberikan pemahaman berupa rencana pelaksanaan kedepan dalam meningkatkan capaian*

*kinerja LPPD dan evaluasi yang dilakukan berlapis meminimalisir adanya kekeliruan data dan tim evaluator eksternal memberikan masukan dalam bentuk Upaya peningkatan capaian”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo memberikan pemahaman dan membuka wawasan bagi Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat melaksanakan peningkatan capaian serta penyusunan rencana aksi penyelenggaraan urusan LPPD berdasarkan hasil pendampingan dan pra evaluasi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi setiap indikator dalam teori Geoff Mulgan tentang pelaksanaan Strategi.

#### **4.2.5 Faktor Internal dan Eksternal dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo melalui Analisis SWOT**

Berdasarkan hasil uraian dari wawancara mendalam yang dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari faktor Internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan juga dari faktor eksternal yang terdiri dari pelyang dan ancaman pada pelaksanaan strategi pemerintah. Guna menjawab pertanyaan faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan strategi penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo, dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal.

Adapun faktor internal dan eksternal yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku sekretariat pelaporan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

#### **4.2.5.1 Faktor Internal**

##### **1. Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan adalah sesuatu yang dapat diandalkan atau diunggulkan oleh sebuah organisasi. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi organisasi. Kekuatan terdapat : (a) Jaringan internet (b) Motivasi Aparatur, (c) Sarana dan Prasarana dan (d) Adanya dasar hukum. Dijelaskan sebagai berikut

##### **A. Adanya Jaringan internet**

Jaringan Internet (Network) adalah sebuah sistem informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan sejumlah computer serta perangkat lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses internet termasuk untuk terhubung ke situs Portal Data Kinerja yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu

<https://portaldatakinerja.sidoarjokab.go.id/> agar nantinya dapat memudahkan proses pengumpulan data dan penyusunan dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo, seperti halnya yang disampaikan oleh Asmara Hadi, S.STP, M.AP selaku Kepala Bagian Pemerintahan bahwa :

*“Menurut saya, yang menjadi kekuatan kami adalah menerapkan sistem informasi Portal Data Kinerja yang berbasis Online tentunya harus didukung oleh adanya jaringan internet yang memadai, bukan hanya di Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pengumpulan data, tetapi juga di setiap kantor-kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD. Kondisi daerah di Kabupaten Sidoarjo yang sudah seluruhnya terfasilitasi internet memudahkan proses pengumpulan data berbasis online maka dalam hal itu kami memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan pemerintah yaitu sudah tersedianya akses jaringan internet di setiap wilayah Kabupaten Sidoarjo, termasuk Kantor-kantor Perangkat Daerah pelaksana LPPD. dimana berdasarkan hal tersebut seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan LPPD dapat melaksanakan pengumpulan data, termasuk kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi berbasis online. Hal ini juga mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan e-government di Kabupaten Sidoarjo, serta dengan adanya sistem jaringan internet maka akan lebih memudahkan untuk dilaksanakan monitoring serta evaluasi oleh pimpinan di Kabupaten Sidoarjo karena setiap pelaksanaan kegiatan dapat di monitoring dari manasaja dan kapan

saja dan apabila ada update perubahan data dari Perangkat Daerah dapat segera di tindaklanjut oleh sekretariat pengumpulan data LPPD, tidak menunggu di jam kerja saja. Seperti yang disampaikan oleh Mohammad Lukman Arif, SE selaku analis perencanaan sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo selaku Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD mengatakan bahwa :

*“Yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyusunan LPPD khususnya pengumpulan data berbasis Online melalui Sistem Informasi Portal Data Kinerja adalah adanya jaringan internet di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya jaringan ditiap-tiap Perangkat Daerah, sehingga pengumpulan data bisa dilakukan darimana saja dan kapan saja, tidak mengharuskan dilakukan tatap muka dan di jam kerja saja”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyusunan LPPD berbasis online adalah jaringan Internet yang telah tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya jaringan ditiap-tiap Perangkat Daerah, sehingga Perangkat Daerah dapat melakukan update data darimana saja dan kapan saja.

## **B. Adanya Motivasi Aparatur**

Motivasi yang tinggi dimiliki oleh aparatur pemerintah di Kabupaten Sidoarjo khususnya Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dalam melaksanakan setiap tahapan penyusunan LPPD yang telah disusun oleh Bagian Pemerintaha selaku sekretariat pengumpulan LPPD di Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa meningkatkan

kinerja serta profesionalisme sehingga tujuan mempertahankan dan meningkatkan Skor Kinerja LPPD yang bersumber dari data capaian serta data dukung yang akan di laporkan dalam dokumen LPPD juga dapat tercapai. Seperti yang telah disampaikan oleh Kasiatun selaku Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

*“Yang menjadi kekuatasn dalam menjalankan Strategi pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini mulai dari pengumpulan di Portal Data Kinerja sampai dengan pelaksanaan pendampingan serta pra-evaluasi adalah motivasi dari Aparatur Perangkat Daerah Pelaksana dan Tim penyusunan LPPD karena itu sangat berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya strategi dapat dilakukan, terlebih ini adalah evaluasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat, yang dinilai secara nasional”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan informan, maka penelilti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan pemerintah dalam strategi penyusunan LPPD Motivasi aparatur yang ada pada tiap-tiap Perangkat Daerah Pelaksana LPPD. Adanya motivasi pada perangkat daerah tersebut sehingga setiap aparatur berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan bukti dukung dengan baik, tidak hanya pelaporannya saja yang meningkat, tetapi juga kinerja nyata di lapangan. Selanjutnya ditambahkan oleh Candra Yuniati, S.IP selaku Tim Peyusun Dokumen LPPD Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

*“Saya rasa motivasi juga menjadi unsur terpenting, karena untuk apa membuat strategi yang baik tetapi pelaksana dalam hal ini aparatur yang melaksanakan tidak memiliki motivasi dalam menjalankan strategi atau tugasnya masing-masing, maka dari itu saya piker kami disini selaku Tim penyusunan*



*LPPD di Kabupaten Sidoarjo memiliki motivasi untuk terus melaksanakan meninkatan dalam melaksanakan tiap-tiap urusan sesuai tugasnya masing-masing dengan baik.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kekuatan pada strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu adanya motivasi aparatur pelaksana urusan LPPD yang menunjang lancarnya pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

### **C. Adanya Sarana dan Prasarana**

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari suatu strategi dilaksanakan. Hal itu diakibatkan karena dalam melaksanakan pengisian data melalui Sistem Informasi berbasis Online yakni Portal Data kinerja dan pelaksanaan pendampingan dan pra-evaluasi juga dilakukan dengan online melalui aplikasi yang sama, diperlukan perangkat komputer maupun laptop untuk melakukan pengolahan data dan penginputan data untuk selanjutnya diinputkan dalam sistem portal data kinerja yang mana di Kabupaten Sidoarjo, sudah hamper seluruh staf difasilitasi dengan perangkat komputer maupun laptop, selain itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid juga memerlukan perangkat software dan hardware yang memadai, adapun semua sarana dan prasarana tersebut sudah tersedia di Kabupaten Sidoarjo, dan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Sidoarjo, sehingga pelaksan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Dini

Chaya, S.Kom, Kepala Sub Perencanaan Sub Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selaku Perangkat Daerah Pelaksana LPPD mengatakan bahwa :

*“Seperti yang bisa dilihat diseluruh kantor di Kabupaten Sidaorjo, sudah hampir seluruh Aparatur di Kabupaten Sidaorjo telah difasilitasi dengan Komputer dan Laptop, karena memang sebagian sistem pemerintahan sudah berbasis online. Sedangkan untuk perangkat komunikasi lainnya, kami berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidaorjo untuk penggunaanya”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informasn, maka peneliti dapat menagambil kesimpulan bahwa sarana-dan prasarana dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo sudah cukup memadai yakni berupa komputer dan laptop untuk melakukan pengolahan data dan penginputan data untuk selanjutnya diinputkan dalam sistem portal data kinerja yang mana di Kabupaten Sidoarjo

#### **D. Adanya Dasar Hukum yang Jelas**

Setiap tahunnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Dearah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Penyusunan Dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Penyusunan LPPD sesuai dengan tahun anggaran yang disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah, berikut adalah beberapa Surat Keputusan yang telah dibentuk selama 3 tahun terakhir :

**Tabel 4.12 Daftar Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo**

Tahun	No SK	Tentang
2021	188/47/438.1.1.3/2022	Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Tahun anggaran 2022
2022	188/41/438.1.1.3/2023	Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Tahun anggaran 2023
2023	100.3.3.2/90/438.1.1.3/2024	Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Tahun anggaran 2024

*Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo*

Didalam Surat Keputusan Kepala daerah tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo diatur tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah pelaksana LPPD sehingga tidak terdapat tumpang tindih pelaksanaan urusan pemerintahan khususnya Urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. sesuai dengan hasil wawancara dengan Dinda Andyarta Putra Yawandae, A.Md, Akun selaku Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa :

*“Bisa dikatakan bahwa kekuatan kami untuk dapat terus melaksanakan strategi penyusunan LPPD yaitu adanya dasar hukum yang jelas tentang masing-masing tugas pokok dan fungsi, sehingga kami selaku sekretariat penyusunan dokumen LPPD dalam menyusun strategi juga memperhatikan masing-masing tugas pokok dan fungsi”*

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasn diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu kekuatan dari pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah sudah ada dasar hukum yang mengatur tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

## **2. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan adalah suatu kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya ada pada organisasi baik itu keterampilan maupun kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi itu sendiri. Adapun tyang menjadi kelemahan dalam strategi penyusunan dokumen LPPD adalah : (a) Kurangnya Skill dan (b) Kurangnya Anggaran.

### **A. Kurangnya Skill**

Kurangnya skill yang dimiliki oleh aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan penginputan data berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan LPPD dikarenakan penginputan yang dilakukan online berbasis Sistem informasi Portal Data Kinerja, sehingga untuk Aparatur Perangkat Daerah yang tidak terbiasa dengan sistem online akan mengalami beberapa kesulitan dalam penggunaan komputer, selaiun itu adanya rotasi pegawai yang menangani LPPD di Perangkat Daerah, menyebabkan adanya pergantian orang baru dimana tidak tersampaiakannya informasi tata cara penginputan data di Portal

Data Kinerja. Sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Dinda Andyarta Putra Yawandae, A.Md.Akun Auditor Terampil Inspektorat Kabupaten Sidoarjo selaku Tim APIP Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

*“Yang menjadi kelemahan pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya skill yang disebabkan oleh adanya rotasi pegawai yang menangani LPPD di Perangkat Daerah, menyebabkan adanya pergantian orang baru dimana tidak tersampaiakannya informasi tata cara penginputan data di Portal Data Kinerja dan juga aparatur baru seringkali tidak memahami maksud indikator LPPD, serta saat dilakukan pendampingan orang yang hadir beda dengan yang menangani, sehingga informasi tidak tersampaikan maksimal”*

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasni diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu kelemahan dari pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya skill dari aparatur pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

## **B. Kurangnya Anggaran**

Anggaran sangat penting untuk dialokasikan untuk menopang kelancaran dalam pelaksanaan pembiayaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan keseluruhan sesuai dengan timeline strategi yang telah ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, serta anggaran yang telah dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas namu pada nyatanya anggaran untuk pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten

Sidoarjo seringkali tidak menjadi anggaran prioritas untuk di alokasikan di Bagian pemerintahan oleh TAPD. Padahal anggaran tersebut sangat penting untuk pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Evaluator Eksternal, dikarenakan Kabupaten Sidoarjo harus menganggarkan Honorarium sebagai Narasumber pelaksanaan pendampingan dan Pra-evaluasi. Sama dengan yang dikatakan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, bahwa :

*“Selama ini, Kelemahannya strategi penyusunan LPPD adalah kurangnya anggaran, karena memang dalam pelaksanaan strategi ini yang terpenting adalah kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi, dimana dalam pelaksanaannya kita harus menganggarkan honorarium bagi masing-masing evaluator, sehingga apabila anggaran ini tidak “goal” atau tidak lolos dalam pembahasan TAPD, kegiatan strategi penyusunan LPPD tidak dapat dilaksanakan”*

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu kelemahan dari pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya anggaran bagi pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

#### **4.2.5.2 Faktor Eksternal**

##### **1. Peluang (*Opportunity*)**

Peluang merupakan berbagai hal atau suatu kondisi yang menguntungkan bagi suatu organisasi, serta kecenderungan-kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang. Dalam menganalisis peluang, keadaan dan kondisi yang merupakan

peluang yang ada diluar suatu organisasi atau instansi juga memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari (a) Adanya Kebijakan Pemerintah, (b) Pesatnya perkembangan Teknologi

#### **A. Adanya Kebijakan Pemerintah**

Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pelaksanaan penyusunan Dokumen LPPD melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur ruang lingkup LPPD, LKPI, dan RLPPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni Peraturan bagi setiap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadikan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan maksimal, sesuai yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, bahwa :

*“Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang mewajibkan dilaksanakan penyusunan LPPD bagi pemerintah daerah termasuk Kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat penyusunan LPPD dapat melakukan penekanan terhadap perangkat daerah pelaksana LPPD, sehingga strategi penyusunan LPPD dapat dilaksanakan dengan maksimal”*

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasn diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu

peluang dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan dilaksanakan upaya dalam penyusunan LPPD bagi Pemerintah Daerah.

## **B. Pesatnya Perkembangan Teknologi**

Pesatnya perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini tidak dapat dipungkiri memberikan dampak yang signifikan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berbasis e-government yang mewajibkan setiap Aparatur Perangkat Daerah dapat mengoperasikan Sistem Informasi Berbasis elektronik, salah satunya Sistem Informasi Portal Data Kinerja yang dibangun dengan tujuan menjadikan kegiatan penyusunan LPPD lebih efektif dan efisien, karena yang sebelumnya dilaksanakan harus dengan tatap muka dan di jam kerja, maka dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan penyusunan dapat dilaksanakan melalui sistem darimana saja, kapan saja dan diakses oleh siapa saja. Sesuai dengan pernyataan dari Nur Aini, S.KM, selaku perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo selaku Perangkat Daerah Pelaksana LPPD mengatakan bahwa :

*“Peluang yang sangat dimanfaatkan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat penyusunan LPPD adalah membangun sistem informasi berbasis elektronik, yang sangat memudahkan kami selaku Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD dalam menyampaikan data kepada Bagian Pemerintahan, karena biasa diakses kapan saja dan dimana saja, tidak kaku harus dilakukan dengan metode tatap muka”*



Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu peluang dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah pesatnya perkembangan teknologi yang juga dimanfaatkan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat penyusunanl dokumen LPPD untuk membangun juga Sistem informasi Portal Data Kinerja, sehingga pelaksanaan Penyusunan LPPD dapat terlaksana dengan maksimal.

## **2. Ancaman (Treats)**

Ancaman merupakan hal-hal diluar organisasi yang tidak menguntungkan bagi keberlangsungan organisasi, yang mana jika tidak dapat diatasi maka akan menjadi hambatan bagi organisasi baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi organisasi. Faktor Adapun yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD adalah adanya (a) Kebocoran keamanan Sistem dan (b) Perubahan Kebijakan, penjelasannya yaitu :

### **A. Kebocoran Sistem Keamanan**

Adanya kemungkinan kebocoran sistem informasi, mengingat dunia digital yang dapat diakses oleh semua orang dari seluruh penjuru dunia, menjadikan Portal Data Kinerja harus di lengkapi dengan sistem keamanan yang lebih tinggi, mengingat data pentingnya data yang tersimpan dalam sistem tersebut, karena apabila terjadi kebocoran keamanan, makan memungkinkan

terjadinya data hilang atau tidak sesuai, sehingga menyebabkan pengelolaan dan analisa data yang memakan waktu lama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasiatun selaku Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

*“Yang kami takutkan sebagai ancaman adalah adanya hacker yang mengganggu sistem keamanan di portal data kinerja, karena saat ini Portal Data Kinerja selain sebagai media pengumpulan data, juga sebagai penyimpanan arsip pelaporan LPPD, yang mana apabila data itu hilang, kami juga kerepotan dalam menyusun kembali data-data dari Perangkat Daerah Pelaksana LPPD”*

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu ancaman dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah Kebocoran Sistem Informasi yang dapat menyebabkan hilangnya data yang tersimpan dalam jaringan sistem tersebut, karena selain sebagai media pengumpulan data, Sistem data Portal kinerja merupakan sarana penyimpanan arsip pengumpulan data yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.

## **B. Perubahan Kebijakan**

Adanya perubahan indikator terhadap pelaksanaan penyusunan LPPD oleh pemerintah pusat yang tanpa dilengkapi dengan penjelasan teknis yang memadai menjadikan Perangkat Daerah Pelaksana LPPD menjadi kesulitan dalam menyajikan data yang sesuai dengan yang diinginkan indikator LPPD. Selain itu

keterbatasan pemahaman dari Sekretariat Penyusunan LPPD dalam menjelaskan perubahan indikator yang ada juga menjadikan penyampaian serta penyusunan dokumen LPPD menjadi tidak maksimal, seperti yang disampaikan oleh Tyas Kurnia Sari, selaku Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa :

*“Adanya perubahan indikator, baik perubahan rumus, maupun perubahan indikator keseluruhan menjadi sebuah ancaman bagi pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, karena terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah maupun Bagian pemerintah untuk mengartikan dari adanya perubahan indikator yang ada”*

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu ancaman dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah adanya perubahan kebijakan yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya pengumpulan data, dikarenakan biasanya perubahan indikator tidak dibarengi dengan penjelasan yang memadai, sehingga menyebabkan data yang dikumpulkan dalam strategi penyusunan LPPD dapat tidak maksimal.

Tabel 13 Matriks analisis SWOT

	<b>STRENGTHS</b>	<b>WEAKNESSES</b>
	1. Adanya Jaringan Internet 2. Adanya Motivasi Aparatur 3. Adanya Sarana Dan Prasarana 4. Adanya Dasar Hukum	1. Kurangnya Skill 2. Kurangnya Anggaran
<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>STRATEGI SO</b>	<b>STRATEGI WO</b>
1. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat 2. Pesatnya Perkembangan Teknologi	<p><b>1) Adanya Dasar Hukum</b>            Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang tugas dan pokok Tim Koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan sebuah pijakan yang kuat bagi Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD untuk memberikan penekanan bagi Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dalam melaksanakan dan melaporkan capaian serta bukti dukung sehingga pelaporan dokumen LPPD dapat dengan maksimal disampaikan.</p> <p><b>2) Adanya jaringan dan Pesatnya Perkembangan Teknologi.</b>            Dengan adanya jaringan internet yang memadai diseluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya Kantor-kantor Perangkat Daerah pelaksana LPPD maka akan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengembangkan e-government di daerah, salah satunya yakni pengembangan Portal Data Kinerja sebagai Sistem informasi pengumpula data dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.</p>	<p><b>1) Meningkatkan Skill SDM</b>            Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD</p> <p><b>2) Peningkatan tenaga, Sarana dan Prasarana</b>            Jumlah tenaga aparatur yang masih belum memadai juga menyebabkan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, karena dari 37 Urusan, 123 IKK Outcome dan 494 IKK Output, hanya terdapat 3 Staf Bagian Pemerintahan yang melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan LPPD Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya tambahan tenaga, diharapkan akan meningkatkan kualitas dari dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo.</p>
<b>THREATS</b>	<b>STRATEGI ST</b>	<b>STRATEGI WT</b>

<p>1. Kebocoran Sistem Keamanan</p> <p>2. Adanya Perubahan Kebijakan</p>	<p><b>1) Adanya dukungan kewenangan</b></p> <p>Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia didukung alokasi anggaran yang memadai untuk melakukan kegiatan penyampaian strategi penyusunan LPPD sehingga seluruh rangkaian strategi penyusunan LPPD dapat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Termasuk juga pengamanan sistem informasi, sehingga data yang tersimpan dalam porta data kinerja dapat terjamin keamanannya</p> <p><b>2) Menggunakan azas profesionalitas</b></p> <p>Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada, sikap optimis dan profesional dari aparaturnya penyelenggaraan urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.</p>	<p><b>1) Meningkatkan Skill dan pengetahuan</b></p> <p>Meningkatkan skill dan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD.</p> <p><b>2) Menerapkan azas profesionalitas</b></p> <p>Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada, sikap optimis dan profesional dari aparaturnya penyelenggaraan urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.</p> <p><b>3) Menerapkan azas kerja</b></p> <p>Menerapkan bahwa kerja adalah ibadah meyakini bahwa kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang dipertanggungjawabkan sehingga, dalam menyampaikan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan sesuai dengan kondisi senyatanya dan berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean government</i>).</p>
--	--	---

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam organisasi, maka sangat diperlukan penelitian dengan kecermatan adar mampu menemukan strategi yang cepat dan tepat dalam

menagtasi masalah yang timbul dalam organisasi. Dengan menggunakan analisis SWOT, maka antara faktor internal dan eksternal dapat dijadikan sebuah interaksi, sehingga menghasilkan suatu solusi atau bentuk upaya dalam menangani setiap hambatan yangterjadi. Dari hasil interaksi faktor di Kabupaten Sidoarjo adalah mengupayakan 4 strategi yaitu :

### **1. Kekuatan untuk memanfaatkan peluang**

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada antara lain yaitu :

#### 1) Adanya Dasar Hukum

Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang tugas dan pokok Tim Koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan sebuah pijakan yang kuat bagi Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD untuk memberikan penekanan bagi Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dalam melaksanakan dan melaporkan capaian serta bukti dukung sehingga pelaporan dokumen LPPD dapat dengan maskimal disampaikan.

#### 2) Adanya jaringan dan Pesatnya Perkembangan Teknologi.

Dengan adanya jaringan internet yang memadai diseluruh wilayah Kabupaten Sidaorjo khususnya Kantor- kantor Perangkat Daerah pelaksana LPPD maka akan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengembangkan e-government di daerah, salah satunya yakni pengembangan

Portal Data Kinerja sebagai Sistem informasi pengumpul data dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

## **2. Kekuatan untuk menghindari ancaman**

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman antara lain yaitu :

### 1) Adanya dukungan kewenangan

Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia didukung alokasi anggaran yang memadai untuk melakukan kegiatan penyampaian strategi penyusunan LPPD sehingga seluruh rangkaian strategi penyusunan LPPD dapat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Termasuk juga pengamanan sistem informasi, sehingga data yang tersimpan dalam portal data kinerja dapat terjamin keamanannya

### 2) Menggunakan azas profesionalitas

Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada, sikap optimis dan profesional dari aparatur penyelenggaraan urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

### **3. Mengurangi Kelemahan mengejar peluang**

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu sebagai berikut :

#### 1) Meningkatkan Skill SDM

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD

#### 2) Peningkatan tenaga, Sarana dan Prasarana

Jumlah tenaga aparatur yang masih belum memadai juga menyebabkan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, karena dari 37 Urusan, 123 IKK Outcome dan 494 IKK Output, hanya terdapat 3 Staf Bagian Pemerintahan yang melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan LPPD Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya tambahan tenaga, diharapkan akan meningkatkan kualitas dari dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

### **4. Mengurangi Kelemahan untuk menghindari ancaman**

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu sebagai berikut :

#### 1) Meningkatkan Skill dan pengetahuan



Meningkatkan skill dan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD.

2) Menerapkan azas profesionalitas

Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada, sikap optimis dan profesional dari aparatur penyelenggaraan urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

3) Menerapkan azas kerja

Menerapkan bahwa kerja adalah ibadah meyakini bahwa kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang dipertanggungjawabkan sehingga, dalam menyampaikan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan sesuai dengan kondisi senyatanya dan berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukaan, Strategi Penyusunan LPPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk jawaban dari pelaksanaan analisis SWOT yang ada, karena jika dilihat dari sisi SO (*Strenghts Opportunities*)

atau Kekuatan pemanfaatan peluang, melalui Strategi Penyusunan LPPD yakni ditetapkannya SK Tim koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, memudahkan pelaksanaan pembagian tugas dan koordinasi serta komunikasi dalam penyusunan LPPD serta Penggunaan Sistem Informasi Portal Data Kinerja, sebagai upaya pengoptimalan kekuatan berupa adanya jaringan internet yang kuat di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya Tim koordinasi penyusunan LPPD .

Dari sisi analisa kekuatan untuk menghindari ancaman, atau ST (*Strenghts Threats*) kekuatan dalam hal ini adanya motivasi aparatur merupakan suatu sikap profesionalitas yakni adaptif bagi aparatur yang tergabung dalam Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan indikator yang mungkin muncul dalam penyusunan LPPD, selain itu dilaksanakannya Pendampingan dan Pra-evaluasi juga sebagai upaya penyampaian penjelasan tiap-tiap perubahan indikator yang berubah dari tahun ke tahun.

Dalam mengurangi kelemahan dengan mengejar peluang, atau (*Weaknesses Opportunities*) kelemahan kurangnya skill dari aparatur yang tergabung dalam Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, melalui pendampingan dan pra-evaluasi dapat dilakukan peningkatan pengetahuan dan skill dalam Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian serta skor LPPD dari tahun ke tahunnya.

Sedangkan dalam upaya (*Weaknesses Threats*) mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman, melalui strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, yakni pendampingan dan pra-evaluasi LPPD di Kabupaten Sidoarjo maka kekurangan berupa kurangnya skill dan adanya perubahan indikator dalam penyusunan LPPD setiap tahunnya dapat diminimalisir, karena melalui pendampingan dan pra-evaluasi LPPD oleh evaluator daerah dan nasional yang dilaksanakan hasilnya berupa peningkatan pemahaman dalam Menyusun data serta bukti dukung yang sesuai dengan IKK Urusan LPPD yang hasil akhirnya adalah peningkatan skor capaian dan status kinerja LPPD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendasari pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 berdasarkan strategi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun oleh Bagian Pemerintaha selaku Sekretariat Pelaporan LPPD di Kabupare Sidoarjo, peneliti dapat menarik beberpaa Kesimpulan penelitian, yaitu :

- a. Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan skor dan status kinerja LPPD di Kabupaten Sidaarjo dapat dikatakan sudah berhasil. Dalam Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi 5 indikator dalam teori Strategi Geoff Mulgan, diantaranya yaitu : Tujuan, Lingkungan, Arah atau Tindakan dan Pembelajaran. Tim koordinasi pelaksanaan penyusunan LPPD dalam melaksanakan strategi penyusunan LPPD yakni melalui Sistem Informasi Portal Data Kinerja serta kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi sudah sangat tepat. Dalam hal ini dapat menjadi contoh untuk Pemerintah Daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama mengenai cara mempertahankan dan meningkatkan skor dan status kinerja LPPD. Dapat Diketahui dari segi konseptual beberpa indikator yang mempengaruhi teori Strategi

Pemerintahan menurut Geoff Mulgan (2009) terdiri dari beberapa tahapan, antaranya :

- 1. Tujuan :** awal disusunnya strategi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah terdapatnya berbagai kendala dalam pelaksanaan penyusunan LPPD dan juga tuntutan telah ditetapkannya target capaian skor dan status kinerja LPPD yang senantiasa meningkat dari- tahun ketahun.
- 2. Lingkungan:** dari segi indikator lingkungan dalam hal ini adalah bagaimana output setelah strategi dilaksanakan, Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD yang telah memahami strategi peningkatan capaian di tiap-tiap indikator berdasarkan hasil pendampingan dan pra evaluasi yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari strategi penyusunan LPPD di Sidoarjo akan mendapat masukan serta Gambaran dari evaluator yang ada mengenai bagaimana seharusnya setiap program dan kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah secara ideal, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan serta keberlangsungan sistem pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Arah:** dari segi indikator arah, melalui pendampingan dan pra evaluasi yang merupakan bagian dari Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, tiap-tiap Perangkat Daerah yang belum maksimal dalam melaksanakan urusan LPPD akan dijelaskan dan diarahkan bagaimana memahami rumus indikator urusan LPPD, sehingga pelaksanaan urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

- 4. Tindakan:** Dalam segi indikator Tindakan, Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo sendiri disusun oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo selaku Sekretariat Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo sebagai suatu Tindakan inisiatif dalam menghadapi kendala penyusunan dan tuntutan target Status Kinerja LPPD yang telah disahkan dalam Dokumen Renstra Kabupaten Sidaorjo tahun 2021-2026.
  - 5. Pembelajaran:** Dari Segi indikator pembelajaran, Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo sudah cukup berhasil dalam meningkatkan skor dan status kinerja LPPD di Kabupaten Sidaorjo. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan status OK dalam setiap tahapan pendampingan dan pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh tim evaluator daerah dan nasional serta peningkatan skor dari tahun 2021 yakni 3,61 sedangkan di tahun 2022 yakni 3,78 dengan status sama “tinggi”.
- b. Faktor internal dan eksternal untuk menunjang strategi pemerintah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari faktor internal yang terdiri dari kekuatan yaitu jaringan internet, motivasi aparatur, sarana dan prasarana dan adanya dasar hukum. Adapun kelemahan yaitu kurangnya skill, dan kurangnya anggaran. Sedangkan pada factor eksternal terdiri dari peluang yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah. Adapun ancaman yaitu Kebocoran Sistem Keamanan dan Adanya Perubahan Kebijakan. Berdasarkan analisa SWOT yang dilaknkaan, Strategi Penyusunan LPPD yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk strategi ideal dalam pelaksanaan analisis SWOT yang ada.

## 5.2 Saran

Sebagai akhir dari penulisan tesis ini, dengan mendasar pada penelitian yang peneliti lakukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo, peneliti memberikan saran agar :

1. Sebaiknya strategi pemerintah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo harus lebih memperhatikan setiap kendala-kendala yang dihadapi
2. Dalam penerapan Strategi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat difokuskan untuk peningkatan pemahaman aparatur dalam melakukan analisa data yang akan dilaporkan dalam dokumen LPPD, penyediaan anggaran serta mampu menghadapi pengaruh dari adanya perubahan indikator urusan LPPD.
3. Sebaiknya pemerintah khususnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo dapat membakukan strategi penyusunan LPPD menjadi sebuah petunjuk teknis, sehingga apabila terjadi rotasi data, aparatur yang bertugas melaksanakan penginputan maupun penyusunan dokumen LPPD dapat dengan mudah mengikuti petunjuk teknis yang telah disusun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., & Amala, R. (2016). *Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal Manajemen, 20(2), 262-277.
- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada
- Arischa, K. L., & Frinaldi, A. (2023). *Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)*. Tanah Pilih, 3(1), 11-18.
- Amin, Widjaja. 2009. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Harvindo.
- Bambang, Hariadi. 2003. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Craphindo Persada.
- Creswell, Jhon W. 2015 *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Elip dkk. 2020. *Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LLPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro*. Volume 6N.
- Fathurrahman, F. (2015). *Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Oleh Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat*.
- Fitriasari, D., Martani, D., & Khairurizka, R. (2013). *Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap PP No. 3/2007*. *Prosiding PESAT*



- Hamzah, A. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Ma. JPMIS.*
- Hatten, Kenneth J, dan Hatten, Marry Louise.1998. *Effctive Strategic Management.* Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284
- Keraf, Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90-113.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.* Jurnal Akuntansi Pemerintahan.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 5-7
- Momuat, H. N., Mokat, J. E., & Mamonto, F. H. (2020). Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(1).
- Mulgan, Geoff. 2009. *The Art of Public Strategy.* New York, Amerikan Serikat: Oxford University Press Inc.
- Panggato, M. R. D. (2022). *Efektivitas Koordinasi Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Putri, I. J. R. (2024). *Efektivitas Bagian Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Riwu Kaho, J. 1996. *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Bina Aksara Jakarta.hlm. 20.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafrilia, N. (2022). *Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").
- S. Nasution. 2011. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Coorporate*. PT. Bumi aksara. Jakarta.

*Halaman Ini Sengaja Dikosongi*

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumentasi proses penelitian



**Gambar 1 : Wawancara Bersama Bapak Asmara Hadi, S.STP, M.AP selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo**



**Gambar 2 : Wawancara Bersama ibu Candra Yuniarti, SIP. Selaku staf penyusun Dokumen LPPD di Bagian Pemerintahan**



**Gambar 3 : Wawancara Bersama ibu Kasiatun Selaku staf penyusun Dokumen LPPD di Bagian Pemerintahan**



**Gambar 4 : Wawancara Bersama Bapak Mohammad Lukman Arif, SE, selaku Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten Sidaorjo**



**Gambar 5 : Wawancara Bersama ,Ibu Nur Aini, S.KM selaku Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten Sidaorjo**



**Gambar 6 : Wawancara Bersama ibu Tyas Kurnia Sari selaku Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten Sidaorjo**

## Lampiran 2 Pedoman Wawancara

### Pedoman Wawancara Narasumber 1

**Subjek** :

#### **Penelitian**

Pihak yang bertanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo, Dalam Hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

#### **Daftar Pertanyaan**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1	Strategi	1	Strategi apasaja yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD dalam Pelaksanaan LPPD di Kabupaten Sidoarjo sehingga Skor LPPD Kabupaten Sidoarjo selalu meningkat dari tahun ke tahun?	Bagian Pemerintahan dalam proses penyusunan LPPD, khususnya pengumpulan data berupa capaian dan bukti dukung dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan sejak tahun 2021 telah membangun sistem Informasi berbasis elektronik, yakni melalui Website Portal Data Kinerja yang telah dibangun oleh Bagian Pemerintahan Bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, adapun di dalam website tersebut telah dibentuk fitur-fitur yang memudahkan proses monitoring dan evaluasi data dari pimpinan tertinggi sampai dengan staf pelaksana. Selain itu kami juga melakukan evaluasi internal yang melibatkan pihak eksternal sebelum dilakukan evaluasi oleh tim evaluator LPPD, yang kami sebut

No	Variabel	No	Pertanyaan	Jawaban
				dengan istilah Pra-Evaluasi. Pra evaluasi sendiri dilakukan 4 kali, yang pertama evaluasi dilakukan oleh tim APIP, kedua oleh BPKP Provinsi Jawa Timur, Ketiga oleh PD Pelaksana Urusan Provinsi Jawa Timur, dan yang Keempat oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, hal ini untuk meminimalisir adanya kekeliruan pemahaman tentang rumus maupun data yang diperlukan dan untuk menggali potensi peningkatan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh PD Pelaksana.
		2	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Dalam Pembangunan Sistem Portal Data Kinerja, Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sidoarjo memiliki penting karena selaku yang melakukan Pembangunan sistem. Untuk kegiatan Pra-evaluasi yang dilibatkan antara lain, Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, PD pelaksana Urusan LPPD Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
		3	Sudah berapa lama Strategi tersebut diterapkan dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Sejak Tahun 2021, yakni pelaporan LPPD di tahun 2020 yang dilaporkan tahun 2021 sehingga untuk saat ini sudah berjalan 3 tahun.
		4	Apakah kewenangan/ peran Bapak/ibu dalam	Bagian Pemerintahan memiliki peran sebagai pengoordinasi segala pelaksanaan yang berkenaan dengan



No	Variabel	No	Pertanyaan	Jawaban
			pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	peningkatan kualitas pelaporan LPPD di Kabupaten Sidoarjo
		5	Bagaimana Arsitektur Anggaran dalam pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo? Apakah ada anggaran khusus? a. Jika ada anggaran di peruntukan untuk kegiatan apa? b. Jika ada, darimana sumbernya?	Untuk mata anggaran khusus pelaksanaan LPPD melekat pada anggaran pelaksanaan Otonomi Daerah, yang mana untuk pelaksanaan Pembangunan website portal data kami tidak menganggarkan karena memang dari Diskominfo menyediakan layanan Pembangunan website bagi Perangkat Daerah, adapun kami menganggarkan khusus untuk memberikan honorarium bagi pihak eksternal bagian pemerintahan yang melakukan pra evaluasi untuk kegiatan LPPD
		6	Apakah ada masalah terkait dengan anggaran dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Selama ini, Kelemahannya strategi penyusunan LPPD adalah kurangnya anggaran, karena memang dalam pelaksanaan strategi ini yang terpenting adalah kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi, dimana dalam pelaksanaannya kita harus menganggarkan honorarium bagi masing-masing evaluator, sehingga apabila anggaran ini tidak "goal" atau tidak lolos dalam pembahasan TAPD, kegiatan strategi penyusunan LPPD tidak dapat dilaksanakan
		7	Sarana dan Prasarana	Karena pelaporan LPPD yang diisikan oleh PD Pelaksana

No	Variabel	No	Pertanyaan	Jawaban
			<p>apasaja yang dimiliki dalam menunjang pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo? menurut bapak/ibu bagaimana tentang kecukupan dan kesesuaian sarana dan prasarana tersebut?</p>	<p>dilakukan melalui Website, maka staf pelaksana yang bertugas menginput data harus dapat mengoperasikan Komputer. Adapun selama ini tidak pernah ada complain mengenai kesulitan pengisian karena selain sudah dilakukan pelatihan inputing data, computer sudah tersedia di tiap-tiap kantor di Kabupaten Sidoarjo, dan apabila ada kesulitan pengisian kami menyediakan pendampingan pengisian melalui ruang Komputer di Kantor BKD Kabupaten Sidoarjo.</p>
		8	<p>Berapa jumlah pegawai internal Bagian Pemerintahan yang menangani langsung strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo? menurut Bapak/ibu apakah sudah sesuai jumlah personil dalam menangani penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?</p>	<p>Di tahun 2021 kemarin jumlah staf pelaksana yang terlibat melaksanakan penyusunan LPPD sebanyak 4 Orang, adapun untuk saat ini dikarenakan adanya mutasi staf yang melaksanakan adalah 3 orang, ini sangat kurang karena melihat jumlah Urusan yang diampu oleh Kabupaten Sidoarjo sebanyak 123 IKK</p>
		9	<p>Menurut Bapak/ibu, apakah perlu tenaga khusus</p>	<p>Karena pelaksanaan pelaporan sudah berbasis elektronik, kami berharap seluruh staf yang menangani merupakan staf yang dapat</p>

No	Variabel	No	Pertanyaan	Jawaban
			untuk melaksanakan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	mengoprasikan computer dengan baik
2	Implementasi Strategi	1	Bagaimana alur pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Yang pertama dilakukan pengisian melalui aplikasi Website Portal Data Kinerja berbasis elektronik, selanjutnya dilakukan Pra evaluasi untuk meningkatkan mutu dan capaian Pelaporan urusan pemerintahan
		2	Apa yang membedakan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dengan penyusunan LPPD pada umumnya?	Kalua daerah lain untuk pengumpulan data kemungkinan ada yang masih manual dan belum banyak yang menerapkan Pra Evaluasi
		3	Kapan mulai dilaksanakan tahapan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Strategi dilaksanakan mulai saat berakhirnya masa anggaran tahun n, yakni awal tahun selanjutnya atau Tahun n+1, semisal akan dilakukan penyusunan LPPD tahun 2023, maka dilakukan pada 1 januari 2024,
		4	Apakah Sudah disusun timeline pelaksanaan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Time line kami susun pertahun dengan memperhatikan perkiraan hari libur serta beberapa kegiatan lainnya yang bersamaan dengan pelaporan LPPD
		5	Jika iya, Apakah sudah terdapat produk hukum	Belum ada penetapan Timeline secara baku, namun sudah kami

No	Variabel	No	Pertanyaan	Jawaban
			yang mengatur pelaksanaan Tahapan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	susun SOP pelaksanaan Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo
		6	Jika iya, dalam bentuk produk hukum apa?	Dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah
		7	Dalam rangka penyampaian Strategi kepada OPD pelaksana LPPD, metode apa yang digunakan?	Pada awal tahun akan dilaksanakan penyusunan pelaporan LPPD, bagian pemerintahan melakukan sosialisasi tentang tata cara pengisian di Portal Data Kinerja (terutama bagi petugas pengisian baru) dan penyampaian jadwal pra evaluasi
3	Kekuatan	1	Apa yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Menurut saya, yang menjadi kekuatan kami adalah menerapkan sistem informasi Portal Data Kinerja yang berbasis Online tentunya harus didukung oleh adanya jaringan internet yang memadai, bukan hanya di Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pengumpulan data, tetapi juga disetiap kantor-kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD. Kondisi daerah di Kabupaten Sidoarjo yang sudah seluruhnya terfasilitasi internet memudahkan proses pengumpulan data berbasis online maka dalam hal itu kami memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
4	Kelemahan	1	Apa yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan	Selama ini, Kelemahannya strategi penyusunan LPPD adalah kurangnya anggaran, karena memang dalam pelaksanaan strategi ini yang terpenting adalah kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi,

No	Variabel	No	Pertanyaan	Jawaban
			Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	dimana dalam pelaksanaannya kita harus menganggarkan honorarium bagi masing-masing evaluator, sehingga apabila anggaran ini tidak “goal” atau tidak lolos dalam pembahasan TAPD, kegiatan strategi penyusunan LPPD tidak dapat dilaksanakan
5	Peluang	1	Apa yang menjadi peluang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang mewajibkan dilaksanakan penyusunan LPPD bagi pemerintah daerah termasuk Kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat penyusunan LPPD dapat melakukan penekanan terhadap perangkat daerah pelaksana LPPD, sehingga strategi penyusunan LPPD dapat dilaksanakan dengan maksimal
6	Ancaman	1	Apa yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Ancaman yang dihadapi oleh bagian pemerintahan adalah adanya perubahan yang menangani LPPD atau Rotasi, yang mana informasi tidak tercapaikan, sehingga menyebabkan pelaksanaan penyusunan LPPD tidak maksimal

## Pedoman Wawancara Narasumber 2

**Subjek** :

### Penelitian

Tim Penyusun atau staf pelaksana yang menangani penyusunan

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) di Kabupaten Sidoarjo, Dalam Hal ini Staf Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

### Daftar Pertanyaan

No	Variabel	No	Pertanyaan	Candra Yuniarti, S.IP	Kasiatun
1	Strategi	1	Bagaimana pelaksanaan Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Pelaksanaan penyusunan LPPD dikabupaten sidaorjo dilaksanakan secara online dengan melibatkan evalautor internal dan eksternal	Di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan penyusunan LPPD dengan melibatkan evaluator internal dan eksternal
		2	Apakah terdapat Strategi Khusus Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Ada, yakni berbasis online	Ada, menggunakan metode aplikasi
		3	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Yang terlibat antara lain OPD pelaksana urusan LPPD, Evaluator LPPD, dan penyusun dokumen LPPD	Hampir seluruh Perangkat Daerah terlibat dalam pelaksanaan penyusunan LPPD
		4	Sudah berapa lama Strategi tersebut diterapkan dalam penyusunan	Sejak tahun 2021	Pelaksanaan pertama kali yakni tahun 2022, melaporkan

No	Variabel	No	Pertanyaan	Candra Yuniarti, S.IP	Kasiatun
			LPPD di Kabupaten Sidoarjo?		capaian tahun 2021
		5	Apakah kewenangan/ peran Bapak/ibu dalam pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Sebagai tim penyusun dokumen LPPD	Sebagai tim penyusun dokumen LPPD
		6	Apakah ada masalah terkait dengan anggaran dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Ada kekhawatiran anggaran di kepras pada tahun anagran perlangsung, sehingga tidak maksila pelaksanaan staregi penyusunan LPPD	Setiap tahun perlu dialokasikan anggaran untuk hororaium guna pendampingan dan pra-evalausi LPPD, namun seringkali anggaran di kepras
		7	Sarana dan Prasarana apasaja yang dimiliki dalam menunjang pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo? menurut bapak/ibu bagaimana tentang	Diperlukan komputer dan jaringan internet yang memadai	Diperlukan komputer dan jaringan internet yang memadai

No	Variabel	No	Pertanyaan	Candra Yuniarti, S.IP	Kasiatun
			kecukupan dan kesesuaian sarana dan prasarana tersebut?		
2	Implementasi Strategi	1	Bagaimana alur pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Sudah terlaksana sesuai dengan yang disusun dalam timeline walaupun beberapa tanggalnya ada yang melesekt dikarenakan faktor eksternal	Sudah terlaksana dengan baik
		2	Apa yang membedakan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dengan penyusunan LPPD pada umumnya?	Sistemnya online dan ada praevaluasi	Sistemnya online dan ada praevaluasi
		3	Kapan mulai dilaksanakan tahapan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Sejak bulan desember, sesaau sebelum tahun anggaran barakhir	Sejak bulan desember, dan awal tahun sesaau sebelum tahun anggaran barakhir
		4	Apakah Sudah disusun timeline pelaksanaan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	sudah	Sudah dibentuk dan disampaikan ke OPD



No	Variabel	No	Pertanyaan	Candra Yuniarti, S.IP	Kasiatun
		5	Jika iya, Apakah sudah terdapat produk hukum yang mengatur pelaksanaan Tahapan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Sudah ada SOP	Sudah ada SOP
		6	Jika iya, dalam bentuk produk hukum apa?	Keputusan Kepala Daerah	Keputusan Kepala Daerah
		7	Dalam rangka penyampaian Strategi kepada OPD pelaksana LPPD, metode apa yang digunakan?	Dilakukan dengan bersurat, desk dan komunikasi personal	Dilakukan dengan surat, sosialisai dan pendekatan personal, agar penyampaian dpat tersampaikan dengan maksimal
3	Kekuatan	1	Apa yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Saya rasa motivasi juga menjadi unsur terpenting, karena untuk apa membuat strategi yang baik tetapi pelaksana dalam hal ini aparatur yang melaksanakan tidak memiliki motivasi dalam menjalankan strategi atau tugasnya masing-	Yang menjadi kekuatasn dalam menjalankan Strategi pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini mulai dari pengumpulan di Portal Data Kinerja sampai dengan pelaksanaan pendampingan serta pra-evaluasi adalah motivasi dari Aparatur

No	Variabel	No	Pertanyaan	Candra Yuniarti, S.IP	Kasiatun
				masing, maka dari itu saya piker kami disini selaku Tim penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo memiliki motivasi untuk terus melaksanakan meninkatan dalam melaksanakan tiap-tiap urusan sesuai tugasnya masing-masing dengan baik	Perangkat Daerah Pelaksana dan Tim penyusunan LPPD karena itu sangat berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya strategi dapat dilakukan, terlebih ini adalah evaluasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat, yang dinilai secara nasional
4	Kelemahan	1	Apa yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Ada kekhawatiran anggaran di kepras pada tahun anaggran perlangsung, sehingga tidak maksila pelaksanaan staregi penyusunan LPPD	Setiap tahun perlu dialokasikan anggaran untuk hororaium guna pendampingan dan pra-evalausi LPPD, namun seringkali anggaran di kepras
5	Peluang	1	Apa yang menjadi peluang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi	Yang menjadi peluang adalah adanya sistem internet yang memadai	Peluang dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD adalah tupoksi bagian

No	Variabel	No	Pertanyaan	Candra Yuniarti, S.IP	Kasiatun
			penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?		oemerintahan yang diatu dalam perbup tupoksi sebagai koordinator neyusunan dokumen LPPD
6	Ancaman	1	Apa yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Ancaman yang dihadapi oleh bagian pemerintahan adalah adanya perubahan yang menangani LPPD atau Rotasi, yang mana informasi tidak tercampaikan, sehingga menyebabkan pelankasanaan penyusunan LPPD tidak maksimal	Yang kami takutkan sebagai ancaman adalah adanya hacker yang mengganggu sistem keamanan di portal data kinerja, karena saat ini Portal Data Kinerja selain sebagai media pengumpulan data, juga sebagai penyimpanan arsip pelaporan LPPD, yang mana apabila data itu hilang, kami juga kerepotan dalam menyusun kembali data-data dari Perangkat Daerah Pelaksana LPPD

### Pedoman Wawancara Narasumber 3

**Subjek :**

#### Penelitian

Organisasi Perangkat Daerah yakni pegawai/operator dalam organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam mengumpulkan data Kinerja Capaian LPPD kepada Tim Penyusun atau staf pelaksana di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

#### Daftar Pertanyaan

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
1	Strategi	1	Bagaimana pelaksanaan Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Pelaksanaan LPPD di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat sangat memudahkan pelaksanaan pengumpulan data. Karena berbasis elektronik sehingga bisa diakses kapanpun dimanapun.	efektif dan efisien	Penggunaan website portal data kinerja sangat membantu untuk mengukur capaian kinerja OPD baik IKK outcome maupun IKK output, juga dapat digunakan	efektif

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
						sebagai progres capaian kinerja di tahun	
		2	Apakah kewenangan/ peran Bapak/ibu dalam pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Sebagai penyedia data dlam hal ini capaian dan bukti dukung	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo
		3	Menurut Bapak/ ibu, apakah strategi penyusunan LPPD yang dilakukan oleh bagian pemerintahan optimal dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di Kabupaten Sidoarjo?	Sudah optimal karena memudahkan pengumpulan data dan evaluasi yang dilakukan berlapis meminimalisir adanya kekeliruan data dan tim evaluator	strategi penyusunan LPPD oleh bagian pemerintahan tidak terkait langsung dengan capaian kinerja di masing-masing OPD	Penyusunan LPPD kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kerjasama dan sinergi antar OPD sebagai perangkat daerah pelaksana urusan LPPD dengan	strategi penyusunan LPPD oleh bagian pemerintahan tidak terkait langsung dengan capaian kinerja di masing-masing OPD

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
				eksternal memberikan masukan dalam bentuk Upaya peningkatan capaian		bagian pemerintahan sebagai pembina penyusunan LPPD yang sesuai dengan ketentuan berjalan optimal, dibuktikan hasil laporan LPPD kabupaten Sidoarjo menempati urutan ke 2 terbaik di Jawa Timur di tahun 2023.	
2	Implementasi Strategi	4	Apakah terdapat pedoman teknis dalam pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD di	Pedoman teknis selama ini belum tersedia, namun sosialisasi dan pemdampin	Belum. Sudah cukup dimengerti bagaimana cara input data di portal data	Ada, sudah dilakukan sosialisasi dari bagian pemerintahan	Strategi penyusunan LPPD telah tersosialisasi kepada OPD.

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
			Kabupaten Sidoarjo? Jika Ada, apakah sudah dilakukan sosialisasi? Jika Belum, apakah menaruh saudara perlu disusun panduan teknis penyusunan LPPD?	gan dilakukan dengan sangat maksimal, perlu disusun panduan teknis, karena apabila ada mutasi atau rotasi pegawai memudahkan untuk staf baru melakukan dan memahami inputing data dalam website Portal Data Kinerja			
		3	Apakah Sudah disusun timeline pelaksanaan Strategi Penyusunan	Setiap Awal Tahun, Bagian pemerintahan telah menyampaikan	Ada. Timeline disusun di awal tahun	Telah terdapat jadwal penyusunan LPPD	Sudah, Penyusunan timeline pelaksanaan stragtegi penyusunan LPPD

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
			LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Timeline jadwal pelaksanaan penginputan dan Pra evaluasi			sangatlah penting dan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan di tahun berjalan.
		2	Kapan mulai dilaksanakan tahapan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Pada minggu pertama januari sudah dilaksanakan Sosialisasi Penyusunan LPPD	Awal tahun	Pada tahun N-1	Di tribulan 1 tahun 2024
3	Kekuatan	1	Apa yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyusunan LPPD khususnya pengumpulan data berbasis Online melalui Sistem	selain sarana dan prasarana yang memadai, motivasi pegawai khususnya aparaturnya yang melaksanakan urusan LPPD sangat	Kekuatan bagi pelaksanaan strategi penyusunan lppd adalah kemampuan menyusun strategi itu sendiri	Seperti yang bisa dilihat diseluruh kantor di Kabupaten Sidoarjo, sudah hampir seluruh Aparatur di Kabupaten Sidoarjo telah difasilitasi



No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
				Informasi Portal Data Kinerja adalah adanya jaringan internet di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya jaringan ditiap-tiap Perangkat Daerah, sehingga pengumpulan data bisa dilakukan darimana saja dan kapan saja, tidak mengharuskan dilakukan tatap muka dan di jam kerja saja	penting untuk dibangun, karena tanpa hal tersebut, sebaik apapun strategi pelaksanaan LPPD tidak dapat dilaksanakan		dengan Komputer dan Laptop, karena memang sebagian sistem pemerintahan sudah berbasis online. Sedangkan untuk perangkat komunikasi lainnya, kami berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo untuk penggunaanya
4	Kelemahannya	1	Apa yang menjadi	Kelemahannya adalah	Yang menjadi	Adanya perubahan	Adanya perubahan

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
			kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	adanya rotasi pegawai yang meangani LPPD	kelemahan adalah kurangnya motivasi aparatur prnginput adata LPPD, karena sebaik apapun disusun strategi, jika pelaksananya tidak dapat maksimal melaksanakan maka tidak akan dapat terlaksana	indikator pelaksanaan LPPD	indikator dalam pelaporn LPPD
5	Peluang	1	Apa yang menjadi peluang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di	Adanya jaringan internet yang meadai	Peluang yang sangat dimanfaatkan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat penyusunan LPPD	Pelaksanaan pendampingan secara terusmenerus yang lama-kelamaan akan membentuk	Peluan tersebut adalah tupoksi yang sudah ditetapkan menjadikan tidak aada lagi

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
			Kabupaten Sidoarjo?		adalah membangun sistem informasi berbasis elektronik, yang sangat memudahkan kami selaku Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD dalam menyampaikan data kepada Bagian Pemerintahan, karena biasa diakses kapan saja dan dimana saja, tidak kaku harus dilakukan dengan metode tatap muka	Perangkat daerah menjadi mandiri	tumpangtindih tupoksi

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
6	Ancaman	1	Apa yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Kendala dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD diantaranya kesulitan terpenuhinya sumber data kependidikan dari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo (peserta didik usia PAUD (RA/BA),	anggaran yang seringkali terbatas	Sejauh ini, adanya portal data membantu kami di OPD. Katukata data itu dibutuhkan dimanapun, tetap kami bisa mengaksesnya	Adanya perubahan indikator, baik perubahan rumus, maupun perubahan indikator keseluruhan menjadi sebuah ancaman bagi pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, karena terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah maupun Bagian pemerintah untuk mengartikan dari adanya perubahan

No	Variabel	No	Pertanyaan	Mohammad Lukman, SE	Nur Aini, S.KM	Tyas Kurnia Sari, SE	Dini Chaya, S.Kom
							indikator yang ada

#### Pedoman Wawancara Narasumber 4

##### Subjek Penelitian :

Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data yang ada

Pelaksana LPPD. Dalam hal ini yakni TIM APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

No	Variabel	No	Pertanyaan	Dinda Andyarta Putra Yawandae, A.Md.Akun.
1	Strategi	1	Bagaimana pelaksanaan Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Pelaksanaan LPPD di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat memudahkan pelaksanaan evaluasi data. Karena berbasis elektronik sehingga hasil evaluasi dapat dimonitoring langsung oleh pimpinan dan PD yang dievaluasi dapat langsung menindaklanjuti hasil evaluasi yang ada
		2	Apakah kewenangan/ peran Bapak/ibu dalam pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Sebagai tim evaluator internal Kabupaten Sidoarjo
		3	Menurut Bapak/ ibu, apakah strategi penyusunan LPPD yang dilakukan oleh bagian pemerintahan optimal dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di Kabupaten Sidoarjo?	Sudah optimal memudahkan pelaksanaan evaluasi data. Karena berbasis elektronik sehingga hasil evaluasi dapat dimonitoring langsung oleh pimpinan dan PD yang dievaluasi dapat langsung menindaklanjuti hasil evaluasi yang ada dan Pra- evaluasi yang dilakukan berlapis meminimalisir adanya kekeliruan data dan tim evaluator

				eksternal memberikan masukan dalam bentuk Upaya peningkatan capaian
2	Implementasi Strategi	4	Apakah terdapat pedoman teknis dalam pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo? Jika Ada, apakah sudah dilakukan sosialisasi? Jika Belum, apakah menuruh saudara perlu disusun panduan teknis penyusunan LPPD?	Pedoman teknis selama ini belum tersedia, namun sosialisasi dan pendampingan dilakukan dengan sangat maksimal, perlu disusun panduan teknis, karena apabila ada mutasi atau rotasi pegawai memudahkan untuk staf baru melakukan dan memahami inputing data dalam website Portal Data Kinerja
		3	Apakah Sudah disusun timeline pelaksanaan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Setiap Awal Tahun, Bagian pemerintahan telah menyampaikan Timeline jadwal pelaksanaan penginputan dan Pra evaluasi
		2	Kapan mulai dilaksanakan tahapan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Pada minggu pertama januari sudah dilaksanakan Sosialisasi Penyusunan LPPD
3	Kekuatan	1	Apa yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Bisa dikatakan bahwa kekuatan kami untuk dapat terus melaksanakan strategi penyusunan LPPD yaitu adanya dasar hukum yang jelas tentang masing-masing tugas pokok dan fungsi, sehingga kami selaku sekretariat penyusunan dokumen LPPD dalam menyusun strategi juga memperhatikan masing-masing tugas pokok dan fungsi
4	Kelemahan	1	Apa yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Yang menjadi kelemah pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya skill yang disebabkan oleh adanya rotasi pegawai yang menangani LPPD di Perangkat Daerah, menyebabkan adanya pergantian orang baru dimana tidak tersampaiakannya informasi tata cara penginputan data di Portal Data Kinerja dan juga aparatur baru

				seringkali tidak memahami maksud indikator LPPD, serta saat dilakukan pendampingan orang yang hadir beda dengan yang menangani, sehingga informasi tidak tersampaikan maksimal
5	Peluang	1	Apa yang menjadi peluang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Peluangnya adalah sudah terjalin komunikasi yang baik dengan para evalautor pusat an daerah, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan kegiatan koordinasi mudah dilaksanakan
6	Ancaman	1	Apa yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo?	Menurut hemat saya, berdasar sharing juga dibanding dengan daerah lain, penyusunan LPPD Sidoarjo sudah relatif baik, bahkan menjadi percontohan sehingga menurut saya tidak terdapat ancaman yang serius







UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

---

**LEMBAR REVISI**

JENIS UJIAN :

TESIS

Nama : Lila Karina Dewantari  
NIM : 1162200025  
Hari/ Tanggal : Sabtu, 6 Juli 2024

Catatan Perbaikan:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Surabaya, .....  
Persetujuan Revisi/Perbaikan

Tim Penguji,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....Tandai Salah Satu

**Lampiran 4 LOA Publikasi Jurnal Sinta 5****JURNAL KAJIAN PEMERINTAH (JKP)***JOURNAL OF GOVERNMENT, SOCIAL AND POLITICS*

PROGRAM PASCASARJANA - UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jl. KH. Nasion No.113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Telp (085265763318)

Nomor : 20/PPS/JKP-UIR/06/2024

Lamp : -

Hal : Letter of Acceptance (LoA)

Kepada Yth:

**Lila Karina Dewantari dkk**

Di -

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan artikel bapak/ibu yang sedang diajukan ke redaksi Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): *journal of government, social and politics* dengan judul:

**“STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DI KABUPATEN SIDOARJO”**

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel bapak/ibu layak di muat di Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): *journal of government, social and politics* pada Volume 10 Nomor 1 Periode Maret Tahun 2024.

Demikian surat keterangan LoA ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatian an kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Editor in Chief JKP

Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos.,M.Si

## Lampiran 5 Hasil Check Turnitis Tesis

TESIS\_LILA KARINA DEWANTARI.docx

ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>adminweb.sidoarjokab.go.id</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>jurnal.apmd.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>sjdih.sidoarjokab.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repo.apmd.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>jurnal.ubl.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

